e-ISSN 2809-7025
p-ISSN 2809-7068

BRAWIJAYA JOURNAL of SOCIAL SCIENCE

BJSS, Volume 5 Issue 2, Juni 2026

Articles

MODEL STAG HUNT DALAM STUDI KASUS KONFLIK AGRARIA REMPANG DI KEPULAUAN RIAU
(Selvia Ranti, Akim & Windy Dermawan)

SUARA PEREMPUAN DALAM NARASI STUNTING: SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW BERBASIS ANALISIS GENDER
(Ika Hutaminingsih)

ARSITEKTUR FEMINIS, RUANG GENDER, DAN PENGALAMAN PEREMPUAN: SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW
(Andini Puspita Sucahyawati, Susilo Kusdiwanggo & Ema Yunita Titisari)

COMMUNITY PARTICIPATION AND RURAL DEVELOPMENT SUSTAINABILITY IN SOME SELECTED COMMUNITIES OF EDO STATE, NIGERIA
(Victor Ebonine & John Aigboje Kadiri)

STRUKTUR INTELEKTUAL PENELITIAN VISUAL POLLUTION DAN PERCEIVED AUTHENTICITY PADA KAWASAN URBAN HERITAGE: ANALISIS BIBLIOMETRIK
(Muhammad Kemal Basthulbirri, Jenny Ernawati & Herry Santosa)

RESHAPING ACCOUNTABILITY IN VILLAGE FUND MANAGEMENT: A REFLECTIVE ANALYSIS FROM 2019 TO 2023
(Nicolaus Petrus Likuwatan Werang & Maria Lusiana Florentin Werang)

Brawijaya Journal of Social Science (BJSS)
https://bjss.ub.ac.id/

Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Brawijaya

e-ISSN 2809-7025
p-ISSN 2809-7068

BRAWIJAYA JOURNAL of SOCIAL SCIENCE

Volume 5, Issue 2, Juni 2026

Susunan Redaksi

EDITOR IN CHIEF
Ali Maksum, Universitas Brawijaya, Indonesia

MANAGING EDITOR
Ayu Kusumastuti, Universitas Brawijaya, Indonesia
Esti Zaduqisti, Universitas Brawijaya, Indonesia

EDITOR
Genta Mahardhika Rozalinna, Universitas Brawijaya, Indonesia
Astrida Fitri Nuryani, Universitas Brawijaya, Indonesia
Dewi Puspita Rahayu, Universitas Brawijaya, Indonesia
Nike Kusumawanti, National Sun Yat-sen University, Taiwan
Pratama Yudha Pradheksa, Rensselaer Polytechnic Institute, US
Lutfi Amiruddin, Universitas Brawijaya, Indonesia
Wida Ayu Puspitosari, Universitas Brawijaya, Indonesia
Ambo Upe, Universitas Halu Uleo, Indonesia

LAYOUT AND COPY EDITOR
Khansa Raihan Athallah Hakim, Universitas Brawijaya, Indonesia
Tiara Chaulian Arianti M, Universitas Brawijaya, Indonesia
Salwa Azhira, Universitas Brawijaya, Indonesia
Alaudin Nadzmi Muhtar, Universitas Brawijaya, Indonesia
Muhammad Tsaqif Caesarardhi, Universitas Brawijaya

CONTACT
Brawijaya Journal of Social Science
Jurusan Sosiologi, Universitas Brawijaya
Mailing Address: Lantai 3 Gedung A Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Jl. Veteran Malang (65145)
E-Mailing Address: bjss@ub.ac.id

Brawijaya Journal of Social Science

e-ISSN 2809-7025
p-ISSN 2809-7068

BRAWIJAYA JOURNAL of SOCIAL SCIENCE

Volume 5, Issue 2, Juni 2026

Daftar Isi

SUSUNAN REDAKSI .....**ii**

DAFTAR ISI .....**iii**

MODEL *STAG HUNT* DALAM STUDI KASUS KONFLIK AGRARIA REMPANG DI KEPULAUAN RIAU (Selvia Ranti, Akim & Windy Dermawan) 103

SUARA PEREMPUAN DALAM NARASI STUNTING: *SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW BERBASIS* ANALISIS GENDER (Ika Hutaminingsih) 118

ARSITEKTUR FEMINIS, RUANG GENDER, DAN PENGALAMAN PEREMPUAN: *SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW* (Andini Puspita Sucahyawati, Susilo Kusdiwanggo & Ema Yunita Titisari) 149

COMMUNITY PARTICIPATION AND RURAL DEVELOPMENT SUSTAINABILITY IN SOME SELECTED COMMUNITIES OF EDO STATE, NIGERIA (Victor Ebonine & John Aigboje Kadiri) 169

STRUKTUR INTELEKTUAL PENELITIAN *VISUAL POLLUTION* DAN *PERCEIVED AUTHENTICITY* PADA KAWASAN URBAN HERITAGE: ANALISIS BIBLIOMETRIK (Muhammad Kemal Basthulbirri, Jenny Ernawati & Herry Santosa) 188

RESHAPING ACCOUNTABILITY IN VILLAGE FUND MANAGEMENT: A REFLECTIVE ANALYSIS FROM 2019 TO 2023 (Nicolaus Petrus Likuwatan Werang & Maria Lusiana Florentin Werang) 209

MODEL *STAG HUNT* DALAM STUDI KASUS KONFLIK AGRARIA REMPANG DI KEPULAUAN RIAU

[1]Selvia Ranti
Universitas Padjadjaran
selvia24002@mail.unpad.ac.id
[2]Akim
Universitas Padjadjaran
akim@unpad.ac.id
[3]Windy Dermawan
Universitas Padjadjaran
windy.dermawan@unpad.ac.id

Keywords:
Rempang Conflict, Non-Zero Sum Game, Stag Hunt, Win-Win Solution

Konflik Rempang, Non-Zero Sum Game, Stag Hunt, Win-Win Solution

Abstract
This article aimed to analyze conflict resolution using the stag hunt model as an analytical framework in the case study of the agrarian conflict in Rempang, Riau Islands. This research used a qualitative approach with a case study method through in-depth analysis of relevant literature, applying Game Theory (Non-Zero Sum Game and win-win solution). The results showed that this conflict involved both domestic and cross-border actors, including multinational corporations and foreign investors, and was triggered by the granting of Land Use Rights (HGU) without the principle of social justice, which sparked community resistance. The stag hunt payoff matrix used a relative scale of 1 to 4, where a value of 4 indicated the most mutually beneficial outcome, and a value of 1 indicated the worst outcome for a cooperative party that was betrayed. Through open communication, recognition of customary rights, and value co-creation, both parties had the potential to move toward the optimal payoff (4,4). However, the cooperation achieved thus far remained procedural rather than substantive, given the ongoing power asymmetry between indigenous communities and the state or corporations.

Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis resolusi konflik dengan menggunakan model *stag hunt* sebagai kerangka analisis dalam studi kasus konflik agraria Rempang di Kepulauan Riau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui analisis mendalam terhadap studi pustaka yang relevan. Menerapkan *Game Theory (Non-Zero Sum Game* dan *win-win*

BRAWIJAYA JOURNAL of SOCIAL SCIENCE

Vol. 5, No. 2, 2026

DOI: https://doi.org.10.21776/ub.bjss.2026.005.02.1

Submitted: 2025-07-03
Accepted: 2026-05-26

solution). Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik ini melibatkan aktor domestik maupun aktor lintas negara, termasuk perusahaan multinasional dan investor asing, serta dipicu oleh pemberian Hak Guna Usaha (HGU) tanpa prinsip keadilan sosial yang memicu resistensi masyarakat. Matriks *payoff* model *stag hunt* menggunakan skala relatif 1 hingga 4, di mana nilai 4 menunjukkan hasil paling menguntungkan secara bersama, dan nilai 1 menunjukkan kondisi paling merugikan bagi pihak kooperatif yang dikhianati. Melalui komunikasi terbuka, pengakuan hak adat, dan penciptaan nilai bersama, kedua pihak berpotensi bergerak menuju payoff optimal (4,4). Namun, kerja sama yang tercapai sejauh ini masih bersifat prosedural, bukan substantif, mengingat ketimpangan kekuasaan yang masih berlangsung antara masyarakat adat dengan negara atau korporasi.

1. Pendahuluan

Konflik agraria merupakan situasi antara dua atau lebih pihak, baik individu maupun kelompok, yang sama-sama memperjuangkan kepentingan atas tanah dan sumber daya yang berkaitan dengannya, seperti air, tanaman, tambang, hingga udara (Pasulle, 2019). Konflik agraria muncul sebagai salah satu akibat dari kesenjangan, yang secara umum melibatkan banyak pihak dan banyak peraturan, sehingga konflik agraria umumnya adalah konflik yang kompleks. Konflik semacam ini sering dipahami sebagai persoalan domestik, namun dalam beberapa kasus, konflik agraria justru berkembang menjadi arena tarik-menarik kepentingan lintas batas negara, yang melibatkan aktor-aktor di luar batas teritorial negara yang bersangkutan (Salsabila et al., 2023).

Di Indonesia, konflik agraria merupakan persoalan struktural yang telah berlangsung sejak era kolonial dan masih berlanjut hingga era reformasi (Anggraeni & Hamidah, 2024). Konflik ini menggambarkan pertentangan antara hak masyarakat atas tanah dan kepentingan investasi serta kebijakan pemerintah. Data Konsorsium Reformasi Agraria (KPA) dalam Laporan Situasi Konflik dan Kebijakan Agraria 2021, menunjukkan bahwa terdapat 207 konflik agraria di 32 Provinsi yang tersebar di 507 desa dan kota (KPA, 2021). Salah satu kasus yang menonjol adalah konflik di pulau Rempang, Kepulauan Riau, yang melibatkan masyarakat adat, pemerintah, dan berbagai aktor investor asing secara bersamaan.

Konflik agraria di Rempang tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi ketegangan yang telah berlangsung selama lebih dari dua dekade. Akarnya, dapat ditelusuri sejak tahun 2001, ketika pemerintah pusat dan Badan Pengusahaan (BP) Batam menerbitkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang kemudian beralih kepada PT. Makmur Elok Graha (MEG). Sejak saat itu, status kepemilikan lahan masyarakat adat yang telah menempati Pulau Rempang selama lebih dari 200 tahun di 16 desa adat menjadi tidak jelas secara hukum (Puspita et al., 2024). Pada 2004, PT. MEG dan BP Batam

menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) untuk mengembangkan kawasan tersebut menjadi kawasan wisata yang menyasar pasar Singapura dan Malaysia, namun rencana ini tidak berjalan hingga tahun 2022 (Nindita & Feng, 2025).

Dimensi internasional konflik mulai terlihat jelas pada Juli 2023, ketika Presiden Joko Widodo dan Presiden Xi Jinping menyepakati investasi Xinyi Glass sebesar USD 1,16 miliar untuk proyek Rempang Eco City. Komitmen ini kemudian berkembang menjadi investasi senilai USD 11,5 miliar, atau sekitar Rp. 381 Triliun pada tahun 2080, terdiri dari pengembangan industri, jasa/komersial, agrowisata, perumahan, dan energi terbarukan (Dong, 2023; Zulfikar & Purnama, 2023). Proyek ini ditetapkan sebagai Program Strategis Nasional (PSN) 2023 melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 7 Tahun 2023.

Puncak konflik terjadi pada 7 dan 11 September 2023, ketika aparat gabungan TNI dan Polri memasak patok batas lahan tanpa persetujuan warga, yang kemudian memicu bentrokan disertai gas air mata dan Meriam air. Sekitar 7.500 warga dari 16 desa terdampak rencana relokasi, dan 43 orang ditetapkan sebagai tersangka (Tempo, 2024). Hingga Mei 2025, baru 99 keluarga atau 338 jiwa yang telah direlokasi ke Tanjung Banon Sementara itu, pertanyaan mengenai pengakuan hak ulayat dan keterlibatan publik dalam perencanaan tata ruang masih belum terjawab (Business and Human Rights Centre, 2023; Nindita & Feng, 2025).

Terdapat empat aktor yang telibat dalam konflik agararia di Rempang. Pertama, masyarakat adat pulau Rempang yang mengklaim tanah sebagai warisan leluhur. Kedua, pemerintah pusat dan BP Batam yang mendorong proyek ini sebagai bagian dari PSN. Ketiga, PT. MEG selaku pemegang HPL dan pengembang utama. Keempat, investor asing, terutama Xinyi Group dari Cina dikaitkan dengan potensi keterlibatan dalam *Belt and Road Intiative* (BRI), serta potensi pendanaan dari *Asia Infrastructure Investment Bank* (AIIB) dan investor dari Singapura dan Malaysia (Addurjani et al., 2024; Bhakti et al., 2023; Fuzain, 2023).

Dalam melaksanakan penelitian, sangat penting untuk melakukan *previous study* yang komprehensif guna menunjukkan *novelty* dari penelitian. Beberapa penelitian terdahulu mengenai konflik agraria secara umum, seperti (Dona et al., 2025; Jaya et al., 2024; Matondang, 2019; Tatan et al., 2022; Yuningsih et al., 2023), lebih banyak mengkaji mengenai dimensi hukum domestik dan relasi kuasa. Penelitian ini relevan sebagai landasan, tetapi belum menyentuh dimensi lintas negara yang justru menjadi ciri khas konflik agraria di Rempang. Penelitian yang secara khusus membahasa konflik agraria di Rempang, seperti (Fuzain, 2023; Ghuffran et al., 2024; Izka et al., 2024; Rahmawati et al., 2023; Valentine et al., 2023), umumnya bersifat deskriptif, berfokus pada kajian mengenai gambaran deskriptif mengenai kronologi, aktor, dan dampak konflik, namun belum menawarkan kerangka resolusi konflik yang sistematis.

Di sisi lain, penelitian mengenai model *stag hunt* dan *win-win solution* dalam hubungan internasional (Adiansah et al., 2021; Buresh, 2022; Ceasar, 2024; Majeski & Fricks, 1995; Skyrms, 2001), menunjukkan bahwa model ini cukup efektif untuk menganalisis situasi di mana kerja sama menghasilkan hasil yang lebih baik dibanding

tindakan sepihak, namun belum mengkaji apabila model ini diterapkan dalam konflik agraria. Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini akan difokuskan pada kajian resolusi konflik melalui kerangka analisis model *stag hunt* sebagai strategi *win-win solution* untuk membaca konflik agararia di Rempang, termasuk dimensi lintas batas negaranya. Hal ini akan berkaitan dengan sejauh mana prinsip-prinsip hubungan internasional, seperti penghormatan hak asasi manusia dan kedaulatan negara, yang kemudian dapat diintegrasikan dalam penyelesaian konflik agraria di Rempang.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan mendekatan kualitatif dengan metode studi kasus *(case study)* Tunggal *embedded* oleh Yin (2018), karena berupaya menjawab pertanyaan "bagaimana" konflik agraria Rempang dapat dianalisis melalui model *stag hunt,* sebuah fenomena kontemporer yang masih berlangsung dan melibatkan banyak faktor kontekstual yang saling berkaitan. Data dikumpulkan melalui teknik kepustakaan *(library research),* bersumber dari dokumen resmi, artikel jurnal, laporan lembaga, dan artikel berita dari media kredibel. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber oleh Creswell (2014), setiap klaim faktual dikonfirmasi melalui minimal dua sumber berbeda, dengan prioritas pada sumber yang kredibel dan terbaru (2023-2025), serta data normatif dikonfirmasi melalui dokumen resmi seperti Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 7 Tahun 2023.

Analisis data dilakukan dengan dua teknik, yaitu: 1) *explanation building,* membangun narasi konflik Rempang dari akar hingga dinamika antar aktor, dan 2) *pattern matching,* membandingkan pola konflik tersebut dengan struktur insentif dalam model *stag hunt* untuk melihat apakah logika kerja sama dan konfrontasi pada model tersebut sesuai dengan kondisi empiris yang ada di lapangan (Yin, 2018). Kesesuaian antara kedua pola ini menjadi dasar bagi penarikan kesimpulan mengenai bagaimana model *stag hunt* dapat digunakan sebagai kerangka analisis resolusi konflik agraria Rempang.

2. 1 Kajian Teoritis

2.1.1 *Win-Win Solution* dalam *Game Theory*

Game theory dalam ilmu sosial digunakan untuk menjelaskan bagaimana aktor dalam politik internasional bertindak berdasarkan kalkulasi untung-rugi, memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian (Dougherty & Pfaltzgraff, 1986). Dalam *game theory,* interaksi antar aktor digambarkan sebagai skenario kompetitif yang terdiri dari pemain, strategi, dan hasil. Tujuan setiap pemain adalah memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kepentingannya sendiri sambil memperhitungkan respons yang mungkin diberikan oleh aktor lain.

Secara umum, *game theory* terbagi menjadi dua jenis, yaitu *Zero sum game,* di mana keuntungan satu pihak adalah kerugian pihak lain, seperti dalam *chicken game.*

Dan *non-zero sum game,* di mana kerja sama justru bisa menghasilkan keuntungan bersama, seperti dalam negosiasi. Tindakan negosiasi ini pada dasarnya melibatkan interaksi strategis antaraktor yang memiliki kepentingan berbeda. Dalam konteks ini, *game theory* menawarkan pendekatan sistematis untuk memahami peroses tersebut, serta mengidentifikasi kemungkinan hasil yang dapat dicapai. Penelitian ini menggunakan pendekatan *non-zero sum game,* karena masih membuka ruang bagi kolaborasi dan hasil yang menguntungkan semua pihak yang berkonflik (Lees, 2022).

Dalam hubungan internasional, terdapat empat jenis pendekatan negosiasi *(negotiation approach)* oleh para spesialis Harvard Negotiation Project, yaitu (Fisher et al., 2000):

1. *Win-lose approach,* satu pihak menang, pihak lain kalah.
2. *Lose-lose approach*, kedua pihak sama-sama dirugikan.
3. *Compromise approach*, kedua pihak mengalah sebagian untuk mencapai solusi tengah.
4. *Win-win approach*, kedua pihak mencari solusi kreatif agar kepentingan utama masing-masing terpenuhi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *win-win approach* atau *win-win solution*, yaitu pendekatan negosiasi yang bertujuan mencapai kesepakatan saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Pendekatan ini memandang interaksi bukan sebagai arena kompetisi, melainkan ruang kerja sama, sehingga hasil optimal bisa dicapai oleh semua pihak yang terlibat (Buresh, 2022).

2.1.1.1 Model *Stag Hunt*

Model *stag hunt* (perburuan rusa) pertama kali diperkenalkan oleh Rosseau pada tahun 1773, yang kemudian dikembangkan oleh Wagner untuk menjelaskan model interaksi sosial yang menggambarkan dilema antara kerja sama dan kepentingan individu (Skyrms, 2001). Dalam perkembangannya, *stag hunt* dimodelkan sebagai permainan dua pemain dengan dua kemungkinan keseimbangan *(nash equilibrium).* Keseimbangan pertama adalah kerja sama penuh, ketika dua pemain memilih berburu rusa, yang menghasilkan keuntungan paling besar. Keseimbangan kedua adalah ketika kedua pemain memilih berburu kelinci, yang dapat lebih aman tetapi menghasilkan keuntungaan lebih kecil. Dengan demikian, pemain dihadapkan pada pilihan antara hasil yang paling menguntungkan dan pilihan yang dianggap paling aman (Golman & Page, 2010).

Gambar 1. Model *Stag Hunt* (Perburuan Rusa)

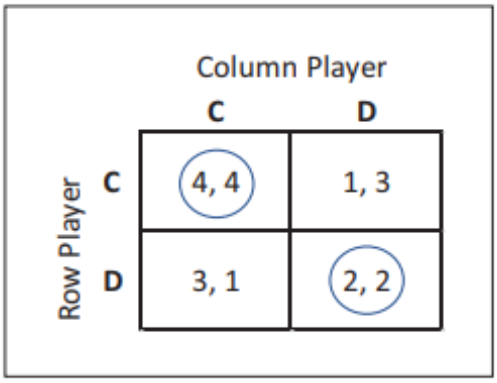

Sumber: Lees, 2022

Dalam model *stag hunt*, seperti tertera pada gambar 1 di atas, pilihan C *(cooperate)* merepresentasikan kerja sama, sedangkan D *(defect)* menunjukkan tindakan membelot atau tidak bekerja sama. Apabila kedua pemain memilih C, maka hasilnya adalah CC (4,4) yang merupakan kondisi paling menguntungkan bagi kedua pihak. Sebaliknya, jika keduanya memilih D, hasilnya adalah DD (2,2) yang mencerminkan kondisi kurang optimal. Hasil paling merugikan terjadi pada kondisi CD atau DC (1,3 atau 3,1), yaitu ketika satu pihak memilih bekerja sama sementara pihak lainnya tidak memenuhi komitmen tersebut (Lees, 2022).

Berbeda dengan *Prisoner's Dillema* yang hanya memiliki satu keseimbangan (saling konfrontasi), *stag hunt* memiliki dua keseimbangan stabil, yaitu kerja sama penuh (CC) dan konfrontasi penuh (DD). Dengan demikian, model ini dikategorikan sebagai *coordination game,* yang menunjukkan bahwa pilihan setiap aktor dipengaruhi oleh ekspektasinya terhadap tindakan pihak lain (James, 2025). Karakteristik tersebut menjadikan model *stag hunt* lebih relevan dalam menganalisis negosiasi, karena komunikasi dan kepercayaan dapat mendorong aktor menuju kerja sama yang lebih menguntungkan.

Meskipun demikian, terdapat beberapa keterbatasan dalam penerapannya pada konflik agraria. Pertama, model *stag hunt* mengasumsikan para aktor berapa pada posisi yang relatif setara. Dalam konflik Rempang, masyarakat adat tidak memiliki kekuatan tawar yang seimbang dengan negara dan investor yang didukung instrument hukum, aparat, serta sumber daya ekonomi yang besar. Akibatnya, pilihan yang terserdia bagi masing-masing pihak tidak berada dalam kondisi yang setara.

Kedua, model *stag hunt* mengasumsikan bahwa *payoff* setiap aktor dapat dibandingkan secara langsung. Namun, dalam konflik Rempang, *payoff* masyarakat adat mencakup identitas dan keterikatan pada tanah leluhur yang sulit diukur secara ekonomi, sedangkan *payoff* pemerintah dan investor lebih berkaitan denga

kepentingan ekonomi dan politik. Penyederhanaan kedua bentuk kepentingan tersebut ke dalam satu matriks berisiko mengabaikan nilai-nilai sosial dan kultural yang penting.

Ketiga, model *stag hunt* menganggap kerja sama sebagai pilihan sukarela. Dalam kondisi ketimpangan kekuasaan, kerja sama dari pihak yang lebih lemah dapat terjadi karena keterbatasan pilihan, bukan karena kepercayaan. Dalam kasus Rempang, relokasi yang dipandang sebagai bentuk persetujuan masyarakat berlangsung berlangsung di tengah tekanan aparat dan keterbatasan alternatif hukum.

Dengan mempertimbangkan keterbatasan tersebut, model *stag hunt* dalam penelitian ini digunakan sebagai alat analisis, bukan representasi langsung dari realitas. Dalam penelitian ini, *game theory* menjelaskan logika pengambilan keputusan strategis, *non-zero sum game* dan *win-win solution* menggambarkan hasil yang diharapka, sedangkan model *stag hunt* digunakan untuk menganalisis dinamika hubungan antara masyarakat adat, pemerintah, dan investor dalam konteks ketimpangan kekuasaan. Pada tahap *pattern matching* (Yin, 2018), kerangka ini digunakan untuk menilai kesesuaian pola konflik Rempang dengan logika kerja sama dan konfrontasi dalam *stag hunt,* serta melihat sejauh mana ketimpangan kekuasaan membatasi tercapainya kerja sama CC (4,4) secara genuin, bukan sekadar prosedural.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Konflik Agraria Rempang di Kepulauan Riau

Kepulauan Riau (Kepri) merupakan provinsi yang menempati posisi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi se-Sumatera, dan masuk ke dalam provinsi dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi terbesar di Indonesia. Pada triwulan tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kepri mencapai angka 6,51%, di mana pertumbuhan tersebut berada pada posisi tertinggi keempat se-Indonesia. Laporan oleh Bank Indonesia menyatakan bahwa salah satu kenaikan ekonomi berasal dari industri manufaktur logam, elektronik, optik, dan alat angkut laut (Addurjani et al., 2024). Batam, salah satu kota di provinsi Kepri menjadi tujuan wisatawan, dimana pada September 2023, sebanyak 80 persen (sekitar 102.000) kunjungan wisatawan mancanegara ke provinsi tersebut berasal dari pintu masuk kota Batam.

Capaian ekonomi Kepri yang tinggi tersebut menjadi latar belakang penting untuk memahami konflik agraria di Rempang, sebab Pulau Rempang sendiri merupakan salah satu kawasan yang diproyeksikan menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi melalui proyek Rempang Eco City (Munawaroh et al., 2024). Namun, di balik proyeksi pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan, pulau ini justru menjadi titik konflik akibat tumpang tindih klaim atas lahan yang melibatkan masyarakat, adat, pemerintah, dan investor. Untuk memahami bagaimana konflik ini berkembang, berikut disusun kronologi konflik secara berurutan.

Tabel 1. Kronologi Konflik Agraria Rempang

Tahun	Peristiwa dan Keterangan
2001	HPL di terbitkan pemerintah pusat dan BP Batam, lalu beralih ke PT. MEG. Status lahan masyarakat adat menjadi tidak jelas secara hukum.
2004	MoU pengembangan wisata seluas 5.000 hektar yang menyasar pasar Singapura dan Malaysia. Rencana ini tidak berjalan hingga 2022.
April 2023	Pemerintah mengangkat kembali proyek dan menetapkan Rempang Eco City berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 7 Tahun 2023
Juli 2023	Kesepakatan Investasi Xinyi Glass sebesar 1,16 miliar, berkembang menjadi komitmen USD 11,5 miliar atau Rp. 381 triliun
September 2023	Bentrokan pertama pada 7 September, di mana aparat memasang patok lahan tanpa persetujuan warga, adanya penggunaan gas air mata. Terjadinya eskalasi konflik pada 11 September berupa demo di delan kantor BP Batam, disertai gas air mata dan meriam air, 43 warga ditetapkan sebagai tersangka
2023-2025	99 keluarga (338 jiwa) direlokasi ke Tanjung Banon per Mei 2025. Isu hak ulayat dan partisipasi publik masih berlanjut. Adanya warga yang bersikeras mempertahankan hak tanah leluhur dan menolak direlokasi.

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2025

Kronologi pada Tabel 1 menunjukkan bahwa konflik agraria di Rempang merupakan akumulasi berbagai keputusan yang saling berkaitan selama lebih dari dua dekade. Krisis di *Rempang Eco City* semakin karena adanya bentrokan antara masyarakat setempat yang tidak bersedia pindah dengan aparat pemerintah. Warga berkeberatan karena mereka tidak boleh meninggalkan tempat kelahirannya, dengan alasan bahwa hak-hak masyarakat adat lebih tinggi dibandingkan kendali negara. Namun, meski sudah lebih dari dua abad memiliki bukti hukum asal usul 16 desa adat di Pulau Rempang yang dihuni oleh berbagai suku seperti Suku Melayu dan Suku Laut, Pemerintah tetap acuh tak acuh terhadap masyarakat tersebut karena gagal memberikan perlindungan hukum yang memadai atas tanah. Konflik agrarian di Rempang semakin memanas dengan terjadinya kericuhan pada saat demo penolakan pengembangan Kawasan *Rempang Eco City* pada 7 dan 11 September. Dari kerusuhan tersebut, sebanyak 43 warga ditetapkan sebagai tersangka (Tempo, 2024)

Mengutip Antara, Menko Polhukam Moh. Mahfud MD menegaskan kasus di Rempang itu bukan penggusuran, tetapi pengosongan lahan, karena hak atas tanah itu

telah diberikan oleh negara kepada entitas perusahaan sejak 2001 dan 2002. “Sebelum investor masuk, tanah ini rupanya belum digarap dan tidak pernah dijenguk sehingga pada 2004 dan seterusnya menyusul dengan beberapa keputusan, tanah itu diberikan hak baru kepada orang lain untuk ditempati. Padahal, SK haknya itu sudah dikeluarkan pada 2001, 2002 secara sah,” oleh Mahfud MD (Valentine et al., 2023).

Gambar 2. Skema Konflik dengan Alat Analisis Bawang Bombay *(The Onion)*

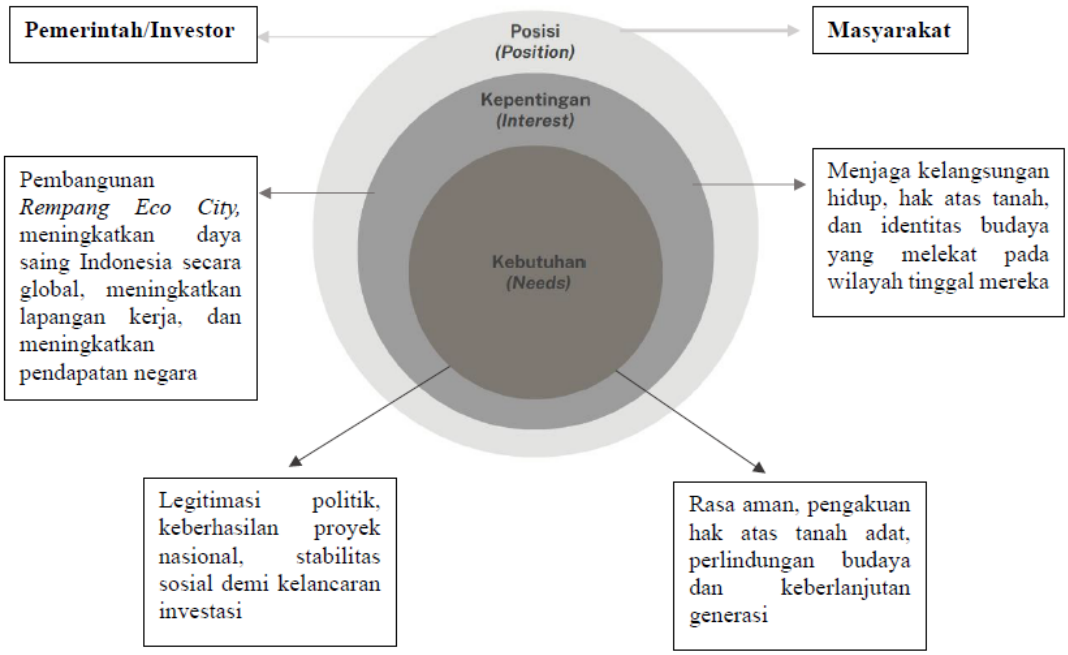

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2025

Untuk memahami konflik agararia di Rempang secara lebih mendalam, penelitian ini menggunakan Analisis Bawang Bombay *(The Onion).* Dapat dipahami bahwa konflik agraria Rempang sebenarnya bukan hanya proyek fisik Rempang Eco City. Pada lapisan permukaan, konflik tampak sebagai persoalan pembangunan, relokasi, dan kompensasi. Namun, pada lapisan yang lebih dalam terdapat kebutuhan yang lebih mendasar, seperti pengakuan identitas masyarakat adat, kepastian atas ruang hidup mereka, serta keberlanjutan budaya yang melekat pada tanah leluhur. Di sisi lain, pemerintah berkepentingan menjaga legitimasi pembangunan dan stabilitas investasi.

Berdasarkan analisis tersebut, terdapat empat kelompok pemangku kepentingan utama dalam konflik Rempang. Pertama, masyarakat lokal yang memiliki klaim historis atas lahan dan menjadi pihak yang paling terdampak. Kedua, BP Batam sebagai otoritas pembangunan dan pemegang kewenangan administratif kawasan. Ketiga, investor swasta, terutama Xinyi Group, beserta kemungkinan keterlibatan investor regional dan lembaga pembiayaan internasional. Keempat, kepentingan konservasi lingkungan yang tetap relevan mengingat besarnya skala pembangunan yang direncanakan. Empat kelompok yang teridentifikasi dalam hal ini adalah masyarakat agraris lokal dengan klaim

lahan historis, otoritas pembangunan pemerintah (BP Batam), investor swasta terutama Xinyi Group dan juga indikasi keterlibatan investor Singapura, Malaysia, dan AIIB, serta kepentingan konservasi lingkungan (Najoan, 2024).

3.2 Analisis Penyelesaian Konflik Agraria Rempang di Kepulauan Riau dengan Model *Stag Hunt* Sebagai Strategi *Win-Win Solution*

Non-zero sum game adalah situasi di mana hasil akhir tidak selalu berupa "kalah-menang," melainkan dapat menghadilkan keuntungan bersama bagi para pihak yang berkonflik (Woods, 2018). Berdasarkan kronologi dan pemetaan aktor pada bagian sebelumnya, peluang transformasi dari kondisi *zero-sum* ke *non- zero sum* dalam konflik Rempang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Peluang *Non-Zero Sum Game* dalam Konflik Agraria Rempang di Kepulauan Riau

Faktor *Zero-Sum*	**Transformasi ke *Non-Zero Sum***
Relokasi paksa	Pembangunan bertahap engan melibatkan masyarakat ke dalam perencanaan tata ruang, disertai pengakuan hak ulayat dan kepastian hukum atas lahan.
Kompensasi sepihak	Kompensasi holistik, termasuk kepemilikan saham proyek, pelatihan kerja, dan infrastruktur sosial bagi masyarakat terdampak.
Monopoli keputusan	Forum dialog multi pihak (pemerintah, investor, masyarakat, dan LSM), guna merancang skema bagi hasil *(win-win solution)* yang transparan.

Sumber: Diolah oleh Penulis 2025

Faktor pertama adalah relokasi paksa, yang mencerminkan pendekatan *zero-sum* karena hanya dihadapkan pada dua pilihan menerima relokasi atau menghadapi tindakan aparat. Pendekatan ini dapat diarahkan menjadi *non-zero sum* dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan relokasi, termasuk dalam menentukan lokasi, waktu, dan mekanismenya, disertai pengakuan formal atas hak ulayat mereka. Faktor kedua adalah kompensasi sepihak, yang bersifat *zero-sum* karena ditetapkan tanpa proses negosiasi yang setara. Transformasinya dapat dilakukan melalui kompensasi yang lebih komprehensif. Faktor ketiga adalah monopoli pengambilan keputusan oleh pemerintah dan investor. Kondisi ini bersifat *zero-sum* karena masyarakat tidak terlibat secara setara dalam menentukan arah pembangunan. Transformasinya adalah pembentukan forum dialog multi pihak yang melibatkan pemerintah, investor, masyarakat adat, dan LSM dalam proses pengambilan keputusan.

Ketiga transormasi tersebut pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi kepentingan bersama dan memperluas manfaat yang dapat diperoleh semua pihak,

bukan sekadar membagi sumber daya yang terbatas (Kim, 2007). Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada posisi tawar masyarakat adat. Apakah masyarakat tersebut memiliki kapasitas dalam menegosiasikan pilihan-pilihan tersebut secara setara, atau hanya menerima keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan investor. Dengan demikian, penelitian ini menjawab pertanyaan tersebut secara lebih sistematis, struktur insentif dalam konflik agraria Rempang dapat dipetakan ke dalam matris *payoff* model *stag hunt,* sebagai betikut.

Tabel 3. *Matriks Payoff* Model *Stag Hunt*

Masyarakat/ Pemerintah dan Investor	**Kerja Sama (Rusa)**	**Konfrontasi (Kelinci)**
Kerja Sama (Rusa)	CC= (4,4)	CD= (1,3)
Konfrontasi (Kelinci)	DC= (3,1)	DD= (2,2)

Sumber: Lees, 2022)

Matriks *stag hunt* pada Tabel 3 di atas digunakan untuk memetakan dinamika konflik Rempang. Kotak DD (2,2) yang menggambarkan konfrontasi dari kedua pihak, sesuai dengan peristiwa pad 7 dan 11 September 2023. Pemerintah memasang patok lahan secara sepihak, sementara masyarakat melakukan perlawanan terbuka. Kondisi ini menghasilkan kerugian bagi kedua pihak, berupa bentrokan, trauma sosial, kriminalisiasi warga, serta terganggunya agenda investasi (Ewe, 2023). Sebaliknya, kotak CC (4,4) menggambarkan kondisi kerja sama yang menguntungkan semua pihak. Dari sisi mayarakat adat, kondisi ini mensyaratkan adanya pengakuan hak ulayat, kepastian hak atas tanah, kompensasi yang layak, akses ekonomi, dan peluang kerja. Dari sisi pemerintah dan investor, kerja sama tercapai apabila terdapat kepastian hukum dan dukungan sosial yang memungkinkan proyek investasi berjalan dengan lancar.

Kotak CD (1,3) dan DC (3,1) menggambarkan situasi ketika hanya satu pihak yang bersifat kooperatif, seperti saat masyarakat menerima relokasi, tetapi komitmen yang dijanjikan pemerintah atau investor tidak sepenuhnya terpenuhi. Risiko ini menjadi relevan mengingat ketimpangan kekuasaan dan informasi antaraktor. Untuk menggeser kondisi dari DD menuju CC, diperlukan upaya mengurangi ketidakpastian melalui komunikasi yang terbuka dan kesepakatan yang mengikat. Hal ini memerlukan forum dialog formal yang melibatkan pemerintah, investor, dan masyarakat adat, serta menghasilkan kesepakatan tertulis mengenai hak ulayat, skema kompensasi, dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam proyek pembangunan.

Namun, konflik agraria Rempang tidak hanya melibatkan dua aktor. Selain masyarakat adat, pemerintah, dan investor, terdapat pula organisasi masyarakat sipil,

lembaga pembiayaan, dan berbagai aktor eksternal lainnya. Dalam situasi *stag hunt* multipihak, koordinasi menjadi lebih sulit karena kegagalan satu aktor menjaga komitmen dapat mengganggu kerja sama yang telah terbentuk. Kondisi ini dikenal sebagai *multi-polar trap* (James, 2025). Maka dari itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang mampu menghubungkan seluruh aktor melalui forum dialog multipihak yang representatif.

Berdasarkan analisis tersebut, terdapat dua temuan utama. Pertama, pola konflik Rempang secara umum sesuai dengan logika kerja sama dan konfrontasi dalam model *stag hunt*. Peristiwa September 2023 mencerminkan kondisi DD, sedangkan proses relokasi setelahnya menunjukkan pergerakan menuju CC, setidaknya pada tingkat prosedural. Kedua, pergerakan menuju CC tidak serta-merta menunjukkan tercapainya kerja sama yang genuin. Kesediaan sebagian warga untuk direlokasi perlu dilihat dalam konteks relasi kuasa yang tidak setara. Pertanyaannya bukan hanya apakah masyarakat menerima relokasi, tetapi apakah keputusan tersebut dihasilkan melalui negosiasi yang setara atau karena terbatasnya pilihan yang tersedia di tengah tekanan aparat dan minimnya akses terhadap jalur hukum alternatif (BHRC, 2023; Nindita & Feng, 2025). Dengan demikian, belum terselesaikannya isu hak ulayat dan partisipasi masyarakat hingga tahun 2025 menunjukkan bahwa kondisi CC yang tercapai masih bersifat prosedural. Meskipun intensitas konflik telah menurun, kerja sama yang terbentuk belum sepenuhnya mencerminkan kesetaraan posisi dan pengambilan keputusan di antara para pihak.

4. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konflik agraria di Pulau Rempang dapat dianalisis melalui model *stag hunt* sebagai kerangka analisis dan strategi *win-win solution*. Sebagai alat analisis, model ini berhasil memetakan struktur insentif antar aktor serta kondisi yang diperlukan untuk mencapai keseimbangan kerja sama CC (4,4), yaitu melalui pengakuan hak ulayat dan kepastian hukum bagi masyarakat adat di satu sisi, serta kepastian hukum dan dukungan sosial bagi pemerintah dan investor di sisi lain. Penelitian ini juga menemukan bahwa pola konflik Rempang secara umum sesuai dengan logika kerja sama-konfrontasi dalam model *stag hunt*, seperti peristiwa September 2023 mencerminkan kondisi DD (2,2), sementara proses relokasi setelahnya menunjukkan pergerakan menuju CC, setidaknya pada tingkat prosedural.

Namun, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat menjadi peluang bagi penelitian lanjutan dengan tema yang sama. Pertama, model *stag hunt* mengasumsikan posisi yang relatif setara antar pemain, sebuah asumsi yang tidak terpenuhi dalam konflik Rempang, di mana terdapat ketimpangan kekuasaan antara masyarakat adat dengan negara dan korporasi. Analisis ketimpangan kekuasaan yang dilakukan dalam penelitian ini masih bersifat konseptual dan belum diukur secara empiris. Kedua, penggunaan data sekunder melalui studi kepustakaan membatasi kemampuan peneliti untuk menangkap dinamika lapangan yang lebih aktual, terutama

perkembangan pasca-2024 yang masih terus bergerak. Ketiga, model *stag hunt* mengasumsikan *payoff* bersifat simetris dan dapat diperbandingkan secara langsung, padahal *payoff* masyarakat adat mencakup dimensi identitas dan keterikatan kultural yang sulit dikuantifikasi, sehingga penyederhanaan ke dalam satu matriks berisiko mengabaikan nilai-nilai sosial dan kultural yang sebenarnya menjadi inti dari konflik. Keempat, empat kelompok pemangku kepentingan yang diidentifikasi dalam penelitian ini belum sepenuhnya merepresentasikan kompleksitas jaringan aktor yang sesungguhnya terlibat, termasuk organisasi masyarakat sipil dan lembaga pembiayaan internasional yang disebutkan namun belum dianalisis secara mendalam. Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya dapat dikembangkan melalui penelitian lapangan untuk menguji secara empiris pengaruh ketimpangan kekuasaan terhadap negosiasi.

Daftar Pustaka

Addurjani, H., Anisa, H. R., Rahman, F. C., & Hasanah, N. (2024). Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Pulau Rempang dalam Konteks UUD 1945. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, *8*(6), 47–58.

Adiansah, W., Nulhaqim, S. A., & Basyar, G. G. K. (2021). Resolusi Konflik Berbasis Komunitas Melalui Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Alternatif Resolusi Konflik Agraria. *Share: Social Work Journal*, *10*(2), 163. https://doi.org/10.24198/share.v10i2.31200

Anggraeni, P. A., & Hamidah, N. (2024). "Our Land, Our Problem": The Long Trajectory of Agrarian Conflicts in Indonesia. *Bis Humanities and Social Science*, *1*, 1–15. https://doi.org/10.31603/bishss.407

Bhakti, C., Samudra, A. A., & Suradika, A. (2023). Impact and resolution of land conflict cases on Rempang Island, Indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*, *11*(12), e2146. https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i12.2146

BHRC. (2023). *Indonesia: Chinese-invested Rempang Eco City Project and relocation controversies*. Business and Human Rights Centre. https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/indonesia-chinese-invested-rempang-eco-city-project-and-relocation-controversies/

Buresh, D. L. (2022). Practical Suggestions for Win-Win, Win-Lose, Lose-Win, and Lose-Lose Strategies in Mediation or Arbitration. *Journal of Human Psychology*, *1*(4), 24–34. https://doi.org/10.14302/issn.2644-1101.jhp-22-4129

Business and Human Rights Centre. (2023). *Indonesia: Chinese-invested Rempang Eco City Project and relocation controversies*. https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/indonesia-chinese-invested-rempang-eco-city-project-and-relocation-controversies/

Ceasar, J. (2024). Conflict Management: A Win-Win Strategy for Organisational Effectiveness in the Changing Global Business Environment. *International Journal of Scientific Research and Engineering Development*, *3*(April).

Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications, Inc.

Dona, R., Mukhlis, M., & Budiono, P. (2025). KETIMPANGAN KEKUASAAN DALAM

KONFLIK AGRARIA : Menelaah Resolusi Konflik Berbasis Teori Foucault di Kabupaten Tebo. *Journal Publisuco*, *8*(1), 371–384.

Dong, T. (2023). *Rempang Eco-City: Cost of Grand Development*. International Relations Review. https://www.irreview.org/articles/2023/11/27/rempang-eco-city-cost-of-grand-development

Dougherty, J. E., & Pfaltzgraff, R. L. (1986). *Contending Theories of International Relations: A Comprehensive Survey*. Longman.

Ewe, K. (2023). *As Indonesia Courts Chinese Infrastructure Investments, Locals Are Pushing Back*. TIME. https://time.com/6313609/indonesia-rempang-eco-city-protests-china/

Fisher, R., Ury, W., & Patton, W. B. (2000). *Coming to This: Negotiating Without Giving Up*. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Fuzain, N. A. (2023). Konflik Sengketa Lahan Antara Masyarakat Adat Rempang Dengan BP Batam Terhadap Pembangunan Rempang Eco City. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, *2*(11), 1081–1088. https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i11.798

Ghuffran, M., Nugraha, D. A., Nilan, N., & Rezki, S. (2024). Analisis Kasus Pulau Rempang Di Batam Ditinjau Dari Conflict Theory. *Jurnal Studia: Jurnal Kajian Hukum*, *5*(2), 392–403.

Golman, R., & Page, S. E. (2010). Individual and cultural learning in stag hunt games with multiple actions. *Journal of Economic Behavior and Organization*, *73*(3), 359–376. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2009.11.005

Izka, Z., Hartati, S., & Rahayu, K. (2024). Konflik Agraria Dalam Proyek Investasi Rempang Eco City. *Social, Educational, Learning and Language (SELL)*, *2*(1), 53–70.

James. (2025). *The Stag Hunt: Cultivating Cooperation to Reap Rewards*. EA Forum. https://forum.effectivealtruism.org/posts/76GmTsXxbHCfBGk2r/the-stag-hunt-cultivating-cooperation-to-reap-rewards

Jaya, I. K. G. D. U., Sarjita, & Alfons. (2024). The Approach of Agrarian Conflict Resolution through Land Redistribution in Sumberklampok Village. *Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan*, *4*(1), 37–55.

Kim, A. J. (2007). Cooperation and Game Theory in International Relations. *OUKA: The University of Osaka Institutional Knowledge Archive*, *11*(2), 109–124.

KPA. (2021). *Catatan Akhir Tahun 2021: Laporan Situasi Konflik dan Kebijakan Agraria di Indonesia*. https://kpa.or.id/image/2023/10/catahu-2021-penggusuran-skala-nasional-psn.pdf

Lees, N. (2022). Of Stag Hunts and secret societies: Cooperation, male coalitions and the origins of multiplicity. *Cooperation and Conflict*, *57*(3), 367–383. https://doi.org/10.1177/00108367221098493

Majeski, S. J., & Fricks, S. (1995). Conflict And Cooperation in International Relations. *Journal of Conflict Resolution*, *39*(4), 622–645. https://doi.org/10.1177/0022002795039004002

Matondang, E. (2019). Konflik Agraria Dan Disintegrasi Bangsa: Tantangan Keamanan Nasional Indonesia. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, *9*(3), 31. https://doi.org/10.33172/jpbh.v9i3.635

Munawaroh, S., Dewi, D. S. K., Khoirurrosyidin, & Triono, B. (2024). The Role of Government in The Agrarian Conflict Rempang Island Government Communication and Political Ecology Perspective. *Jurnal Politico*, *24*(1), 12–34.

Najoan, V. A. J. (2024). Sengketa Tanah oleh Masyarakat Kampung Tua Pulau Rempang Terhadap Proyek Eco City (Aturan Hukum Adat). *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, *2*(1), 8–13. https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1525

Nindita, H., & Feng, Z. (2025). *This Indonesian island is projected to be an 'Eco-City,' but at what cost?* Global Voices. https://globalvoices.org/2025/08/21/this-indonesian-island-is-projected-to-be-an-eco-city-but-at-what-cost/

Pasulle, J. L. (2019). Konflik dan Resolusi Konflik (Studi Kasus Sengketa Tanah di Kelurahan Labakkang Kabupaten Pangkep). In *Repository UNHAS*. Universitas Hasanuddin.

Puspita, N. D., Gaib, W. A. I. G., Zahra, Z. H., Faeyza, M. D., & Asadurrohman, M. (2024). Konflik Agraria Masyarakat Adat Melayu Tua dalam Pembangunan Eco City di Pulau Rempang, Batam. *Brawijaya Journal of Social Science*, *4*(1), 46–62.

Rahmawati, A. R., Inaaya, A. I., Syifa, F. A., Behestizahra, & Fauzyyah, N. P. (2023). Analisis Konflik Pulau Rempang Terhadap Hak Atas Tanah Masyarakat Adat dalam Perspektif Hukum Agraria. *Van Java Law Journal*, *1*(3), 188–196.

Salsabila, S. Z., Oktrimayunda, S. K., Nurlaela, E., Fathurrohman, H., Afriana, I., & Arisman, R. (2023). Agrarian Conflict Analysis: Challenges and Social Impact in the Archipelago. *Journal of Education and Government*, *1*(4), 203–211.

Skyrms, B. (2001a). The Stag Hunt. *Proceedings and Addresses of the APA*, *75*(2), 124–125. https://doi.org/10.4324/9781003059004-33

Skyrms, B. (2001b). The Stag Hunt. In *Jean-Jacques Rousseau* (Issue March). https://doi.org/10.4324/9781315251585-15

Tatan, A., Ikhsan, W. M. N., Rabbani, R. F., & Nulhaqim, S. A. (2022). Peran Organisasi Kepemudaan Dalam Pemecahan Konflik Agraria di Desa Genteng , Kabupaten Sumedang The Role of Youth Organizations in Resolving Agrarian Conflicts in Genteng Village , Sumedang Regency. *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasiona*, *2021*(December 2021), 65–73.

Tempo. (2024). *Rempang Kembali Memanas, Kronologi Lengkap Konflik dan Perjalanan Kasus Agraria Itu hingga Sekarang*. Tempo.Com.

Valentine, E., Muhamad, M. N., Ikhsan, M., & Hakim, N. (2023). Konflik Pulau Rempang Dalam Perspektif Teori Kelas Karl Marx. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, *02*(01), 1–17. https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx

Woods, C. (2018). *Mind games*. Kluwer Mediation Blog.

Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. SAGE Publications, Inc.

Yuningsih, D., Sjaiful, M., Kaimuddin Haris, O., & Sanggra Wisesa, B. (2023). Analisis Penyelesaian Sengketa Agraria Antara Perusahaan Tambang terhadap Lahan Masyarakat yang Berakibat Tumpang Tindih Kepemilikan Lahan Agrarian Dispute Resolution Analysis Between Mining Companies and Community Land Resulting in Overlap of Land Owners. *Halu Oleo Legal Research* |, *5*(1), 120–129.

Zulfikar, M., & Purnama, Y. (2023). *In Rempang, Indonesia, Government Mismanagement Upsets Investment Plans*. Australian Institute of International Affairs. https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/in-rempang-indonesia-government-mismanagement-upsets-investment-plans/

SUARA PEREMPUAN DALAM NARASI STUNTING: *SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW* BERBASIS ANALISIS GENDER

[1]Ika Hutaminingsih
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Sosiologi,
Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Brawijaya
Email: ikahut@student.ub.ac.id

Keywords:
Stunting, gender and power, autonomy, women, systematic literature review;

Stunting, gender dan kuasa, otonomi, perempuan, systematic literature review

Abstract
Stunting is pressing public health problems in Indonesia that cannot be adequately understood through a nutritional lens alone. Research demonstrates that gender inequality within the family significantly affects women's capacity to care for their children's health. This study aims to synthesize women's experiences within the stunting narrative through a Systematic Literature Review analyzing 17 articles selected in accordance with the PRISMA protocol and inclusion criteria through thematic analysis. Articles were categorized into four themes: socioeconomic influences on stunting risk; women's autonomy and gender relations; cultural practices and customary norms affecting child-rearing and nutrition; and the digitalization of parenting, health literacy, and the construction of the ideal mother on social media. Analysis was conducting using R.W Connell's Gender and Power theory to examine gender dynamics within the family, specifically the gendered division of labor, the gendered division of power, and cathexis. Findings reveal that gender inequality within the family plays a significant role in stunting risk. Women bear the entirely domestic burden and child caregiving responsibilities, while men tend to occupy the primary decision-making role over household health and resource allocation. Women's limited autonomy in determining household expenditure and children's nutritional needs directly affects the quality of care children receive. A structural paradox emerges: women's pursuit of economic autonomy in the public sphere is accompanied by an absence of caregiving redistribution within the household, which in turn heightens children's stunting risk. Women's acceptance of family responsibilities carries an emotional dimension, cathexis, that sustains unequal power relations between women and men, perpetuated by prevailing traditions and norms. Stunting inteventions must therefore be gender-sensitive, actively engaging men in caregiving and strengthening women's autonomy in household health decision-making. Centering women's lived

experiences as the primary unit of analysis contributes to a comprehensive understanding of stunting from a sociocultural perspective, not merely a health one.

Abstrak

Stunting merupakan salah satu masalah kesehatan di Indonesia yang tidak hanya terkait dengan perspektif gizi semata. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ketidaksetaraan relasi gender dalam keluarga berpengaruh signifikan terhadap kemampuan perempuan dalam merawat kesehatan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mensintesiskan pengalaman perempuan dalam narasi stunting melalui Systematic Literature Review (SLR) dengan menganalisis 17 artikel yang telah memenuhi protokol PRISMA berdasarkan kriteria inklusi yang ketat dan dianalisis secara tematik. Artikel dikategorikan pada tema pengaruh sosio-ekonomi terhadap resiko stunting, otonomi perempuan dan relasi gender, praktik budaya dan norma adat yang mempengaruhi pola pengasuhan dan gizi anak, serta digitalisasi pengasuhan, literasi kesehatan, dan konstruksi ibu ideal di media sosial.

Analisis dilakukan menggunakan teori Gender and Power oleh R. W. Connell untuk menelaah dinamika gender dalam keluarga yaitu pembagian kerja berdasarkan gender, pembagian kekuasaan berdasarkan gender, dan *cathexis* yang membentuk pengalaman keseharian perempuan tentang stunting.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksetaraan relasi gender antara perempuan dan laki-laki dalam keluarga berperan penting dalam resiko stunting. Perempuan menanggung keseluruhan beban domestik dan perawatan anak sementara laki-laki cenderung menempati posisi pengambil keputusan utama terkait kesehatan dan aloksi sumber daya keluarga. Keterbatasan otonomi perempuan dalam menentukan pengeluaran keluarga dan kebutuhan gizi anak berdampak pada kualitas perawatan yang diterima oleh anak. Perempuan mengalami paradoks struktural yaitu ketika meningkatkan otonomi ekonomi di ranah publik, perempuan mengalami ketiadaan redistribusi kerja pengasuhan dalam keluarga yang justru meningkatkan resiko stunting pada anak. Penerimaan perempuan atas tanggung jawab keluarga memiliki konteks emosional *(cathexis)* yang mempertahankan ketimpangan relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki yang dilanggengkan oleh tradisi dan norma. Intervensi stunting perlu sensitif gender dengan melibatkan laki-laki dalam kerja pengasuhan dan memperkuat otonomi perempuan dalam pengambilan keputusan kesehatan keluarga. Menghadirkan pengalaman perempuan sebagai pusat analisis berkontribusi pada

BRAWIJAYA JOURNAL of SOCIAL SCIENCE

Vol. 5, No. 2, 2026

DOI: https://doi.org.10.21776/ub.bjss.2026.005.02.2

Submitted: 2025-12-12
Accepted: 2026-05-06

pemahaman yang komprehensif mengenai stunting dalam perspektif sosial budaya, tidak hanya perspektif kesehatan.

1. Pendahuluan

Stunting merupakan masalah gizi kronis yang masih menjadi isu kesehatan masyarat di dunia. World Health Organization (2015) menjelaskan stunting sebagai kegagalan pertumbuhan pada anak di bawah usia lima tahun akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi lingkungan yang tidak memadai. Kementrian Kesehatan (2025) mendefinisikan stunting sebagai kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak menjadi terlalu pendek untuk usianya. Bayi yang mengalami kekurangan gizi sejak masa kehamilan hingga pasca kelahiran, secara klinis, baru akan terlihat setelah anak berusia dua tahun (Kementrian Kesehatan, n.d.). Data World Health Organization (2024b) mencatat bahwa sekitar 149 juta anak di bawah usia lima tahun mengalami stunting pada tahun 2022. Joint Child Malnutrition Estimates UNICEF-WHO-World Bank melaporkan bahwa sekitar 150.2 juta anak balita di dunia mengalami stunting (World Health Organization, 2024a). Hampir setengah kematian anak di bawah usia lima tahun yang terjadi pada negara berpendapatan menengah dan rendah disebabkan oleh gizi buruk (World Health Organization, 2024b).

Urgensi persoalan stunting di Indonesia terlihat dari dampaknya yang serius terhadap kehidupan masyarakat. Kasus stunting yang terjadi di Papua pada September 2017 hingga Januari 2018 menyebabkan 75 orang termasuk anak-anak meninggal dunia (BBC News Indonesia, 2024). Selain itu, hingga saat ini stunting masih mengancam kehidupan anak. Data Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementrian Kesehatan (2025) menunjukkan bahwa enam provinsi dengan jumlah balita stunting terbesar adalah Jawa Barat (638.000 balita), Jawa Tengah (485.893 balita), Jawa Timur (430.780 balita), Sumatera Utara (316.456 balita), Nusa Tenggara Timur (214.143 balita), dan Banten (209.600 balita).

Data Profil Kesehatan Indonesia (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2021) mencatat prevalensi stunting naik dari 27.5% (2016), 29.6% (2017), hingga puncaknya yaitu 30.8% (2018), kemudian menurun menjadi 27.7% (2019) dan 24.4% (2021). Selanjutnya data dari Laporan SSGI menunjukkan bahwa penurunan stunting hingga 19.8% (2024), dengan target nasional 18.8% pada 2025 (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2025). Penurunan ini menunjukkan bahwa berbagai intervensi negara seperti percepatan penanganan stunting, peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, serta program gizi dan stunting telah memberikan dampak positif terhadap status gizi anak di Indonesia seperti pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dengan kondisi kurang energi kronik (KEK), edukasi ASI Eksklusif, dan suplemen tablet tambah darah (TTD) kepada remaja putri. Pemerintah juga menerbitkan payung hukum utama percepatan stunting melalui Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan

Stunting yang melibatkan intervensi gizi spesifik dan sensitif, menyasar calon pengantin perempuan, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 0–59 bulan. Dengan capaian tersebut, Indonesia semakin mendekati target nasional sebesar 18.8%. Target nasional penurunan stunting hingga 18.8% pada tahun 2025 menunjukkan stunting dikonstruksikan sebagai obyek tata kelola pembangunan kesehatan nasional. Anak-anak yang mengalami stunting hadir dalam bentuk angka prevalensi yang harus ditekan untuk memenuhi target pembangunan sehingga pengalaman sosial yang melingkupi stunting berpotensi tereduksi menjadi persoalan pencapaian indikator statistik.

Angka-angka tersebut juga menunjukkan bahwa keberhasilan program stunting umumnya diukur melalui indikator kuantitatif berupa prevalensi. Fokus pada capaian statistik seringkali menempatkan perempuan sebagai instrumen dan aktor utama yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan gizi, kesehatan anak, dan memastikan keberhasilan target nasional penurunan stunting. Keberhasilan program tidak memberikan perhatian yang memadai pada pengalaman, suara, dan kondisi sosial yang dihadapi oleh perempuan. Upaya intervensi yang dilakukan oleh negara hingga pemerintah daerah bertujuan agar bisa memenuhi target penurunan tingkat stunting. Semakin besar perhatian negara terhadap stunting maka semakin intens pula pengaturan terhadap tubuh dan praktik reproduksi perempuan. Tubuh perempuan menjadi titik sentral intervensi negara.

Perempuan sebagai sasaran intervensi dalam program stunting terlihat dari didorongnya keterlibatan perempuan dalam berbagai layanan kesehatan seperti kelas ibu hamil, Posyandu, hingga penyuluhan kesehatan dan gizi. Perempuan melalui tubuhnya dituntut untuk bisa merawat bayi dalam masa kehamilan sehingga lahir dengan sehat. Selain itu, ibu kemudian harus mengasuh dan merawat anak khususnya hingga mendapakan cakupan imunisasi yang lengkap bagi anak. Suami menyerahkan perawatan dan pengasuhan anak kepada ibu sebagai tanggung jawab ibu di ranah domestik. Utami et al., (2024) menyatakan bahwa kebijakan dan program penanggulangan stunting di Indonesia seringkali mendomestifikasi perempuan yang mana menempatkan ibu sebagai penanggungjawab keberhasilan atau kegagalan program stunting.

Penelitian ini memfokuskan pembahasan pada empat tema dalam kerangka Connell (1987) yaitu *pertama* beberapa studi memperlihatkan bahwa pembagian kerja domestik yang tidak setara menyebabkan perempuan menanggung beban perawatan dan pekerjaan rumah tangga secara penuh sehingga berdampak pada keterbatasan waktu dan energi dalam memenuhi kebutuhan nutrisi anak. Kedua, penelitian lain menyoroti rendahnya otonomi perempuan dalam pengambilan keputusan rumah tangga, termasuk terkait kesehatan anak, keuangan, dan akses terhadap layanan medis. Ketiga, penelitian juga menekankan proses norma budaya, relasi dalam keluarga besar, serta

praktik sosial yang menghasilkan interaksi kompleks antara gender dan kesehatan anak. Keempat, digitalisasi dalam stunting.

Dengan demikian, stunting tidak hanya dipahami hanya sebagai permasalahan gizi. Stunting perlu dilihat sebagai gejala ketidaksetaraan gender dalam keluarga mulai dari pembagian kerja domestik hingga otonomi perempuan dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan dan perawatan anak. Perempuan menjadi aktor yang dibebani tanggung jawab perawatan. Ketika anak mengalami stunting, perempuan harus bertanggung jawab pada kesehatan anak. Dalam konteks ini, menjadi penting untuk menghadirkan suara perempuan dalam stunting terutama terkait relasi gender dalam keluarga. Penelitian ini berupaya mengisi ruang yang menempatkan pengalaman perempuan sebagai subyek analisis dalam stuting.

Meskipun literatur tentang stunting dan gender telah berkembang tetapi terdapat kesenjangan penelitian atau *research gap* yang belum sepenuhnya terjawab. *Pertama* sebagaian besar studi yang ada lebih banyak membahas faktor sosio-demografis perempuan daripada mengkaji secara mendalam pengalaman hidup atau *lived experience* perempuan dalam menghadapi ketimpangan relasi gender. *Kedua* belum banyak kajian yang mengintegrasikan secara sistematis temuan-temuan tersebut ke dalam kerangka teori gender khususnya teori Gender and Power R.W Connell sehingga pembacaan terhadap stunting sebagai gejala ketidaksetaraan struktural masih terfragmentasi. *Ketiga* memperkaya kajian Systematic Literature Review (SLR) berbasis analisis gender sehingga mensintesiskan lintas konteks yang komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk menjawab tiga pertanyaan berikut 1) Bagaimana literatur terdahulu menjelaskan pengalaman perempuan dalam isu stunting? 2) Bagaimana relasi gender dalam keluarga membentuk resiko dan penanganan stunting? 3) Bagaimana teori Gender and Power R.W Connell dapat menjelaskan posisi perempuan dalam narasi stunting? Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mensintesiskan temuan-temuan penelitian terdahulu mengenai pengalaman perempuan dalam isu stunting serta menganalisisnya menggunakan teori Gender and Power R.W Connell khususnya pada aspek pembagian kerja berdasarkan gender, pembagian kekuasaan berdasarkan gender, dan *cathexis*.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Systematic Literature Review (SLR). SLR memungkinkan peneliti untuk menelusuri, menyeleksi, dan menganalisis literatur secara sistematis guna memperoleh pemahaman mendalam dan reflektif mengenai suara perempuan dalam program stunting dalam bingkai analisis gender dengan teori Power and Gender oleh R.W Connell.

Sumber data penelitian diperoleh melalui Taylor and Francis, Google Scholar, dan Garuda. Pencarian dilakukan menggunakan kata kunci dalam Bahasa Inggris dan Bahasa

Indonesia yang disusun dengan teknik Boolean (AND, OR) yaitu "stunting AND gender" OR "stunting AND women" serta "stunting DAN gender" ATAU "stunting DAN perempuan". Artikel yang dianalisis memenuhi kriteria yaitu artikel jurnal yang diterbitkan pada rentang tahun 2020-2025; ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris; dapat diakses secara *full text*; bukan merupakan skripsi, tesis, disertasi, dan laporan pengabdian; serta fokus kajian yaitu subyek ibu dengan anak stunting dengan usia maksimal usia lima tahun atau 60 bulan serta pembahasan stunting melibatkan perempuan atau ibu, tidak hanya sosio-demografis perempuan saja.

Prosedur SLR mengacu pada Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) (Moher et al. 2015 dalam Minarso et al., 2021). PRISMA berfungsi sebagai panduan untuk merancang, menelusuri, dan melaporkan proses tinjauan literatur secara transparan, sekaligus memastikan setiap tahap penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis (Moher et al., 2015; Ali & Warraich, 2018 dalam Minarso et al., 2021). Tahapan protokol PRISMA meliputi Identifikasi yaitu peneliti mengumpulkan seluruh potensi sumber yang relevan dengan topic penelitian; Screening yaitu peneliti menseleksi berdasarkan judul dan abstrak untuk memilih studi yang relevan; Kelayakan yaitu peneliti melakukan pembacaan teks lengkap dari studi yang dipilih untuk memastikan studi memenuhi kriteria inklusi; Penggabungan data yaitu data yang relevan dari studi yang memenuhi persyaratan diekstrkasi dan dirangkum; serta analisis dan presentasi yaitu analisis dilakukan pada data yang terkumpul dan hasilnya dipresentasikan. Berikut merupakan proses pentahapan dalam penelitian dengan SLR:

Gambar 1. Tahapan Penelitian dalam SLR

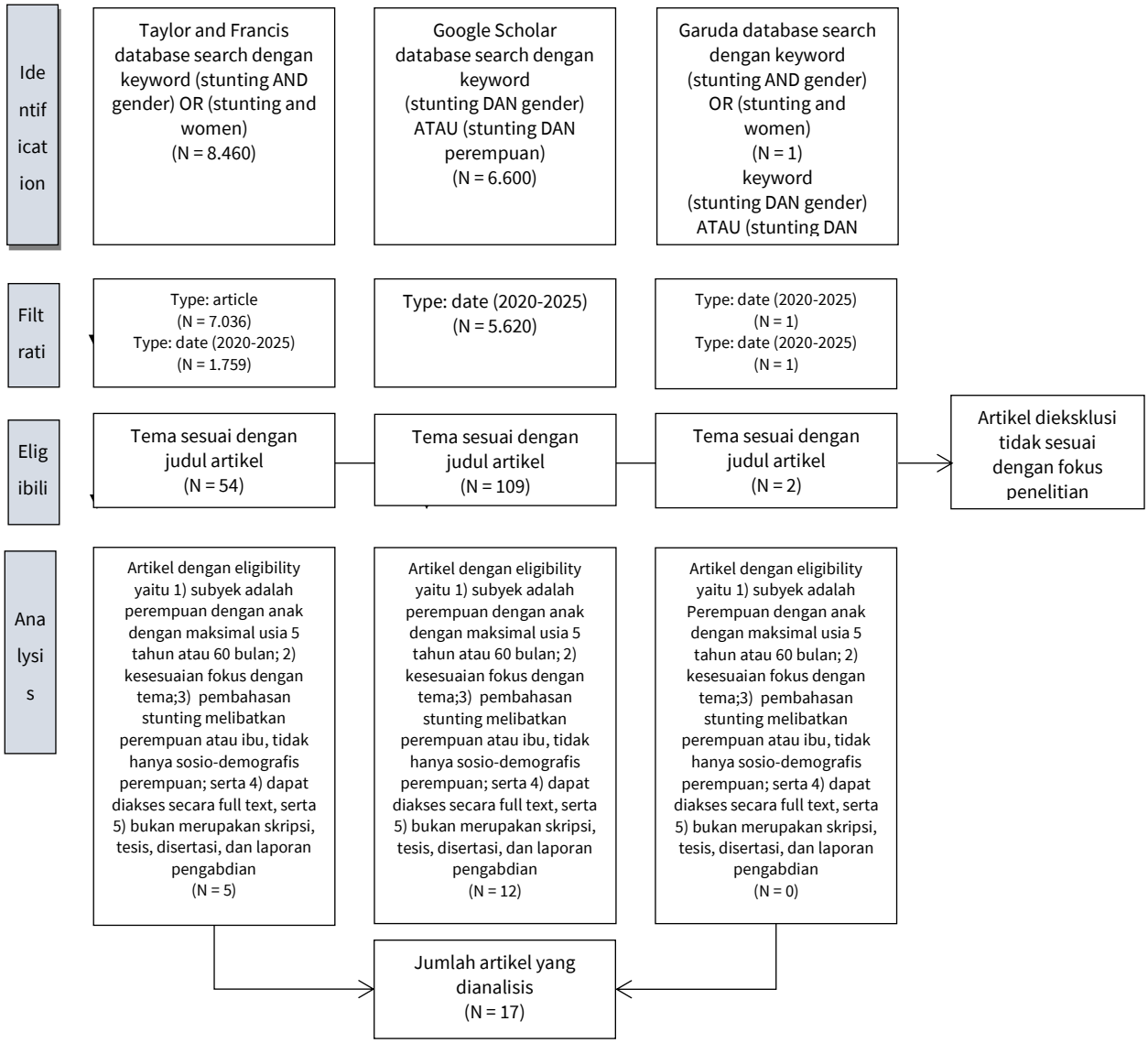

Guna memastikan transparansi dan replikabilitas proses SLR, penelitian ini menyusun komponen metodologis secara lengkap sebagaimana diuraikan dalam tabel 1 berikut.

Tabel 1. Komponen Metodologis Systematic Literature Review

Komponen	Keterangan
Database	Taylor and Francis, Google Scholar, dan Garuda.
Kata Kunci per Database	Kata kunci pada Taylor and Francis yaitu “stunting AND gender” OR “stunting AND women”; Google Scholar yaitu “stunting DAN gender” ATAU “stunting DAN Perempuan”; Garuda yaitu “stunting AND gender” OR “stunting and women” serta “stunting DAN gender” ATAU “stunting DAN Perempuan”.

Kriteria Inklusi	Artikel jurnal, tahun 2020-2025, Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, *full text*, perempuan dengan subyek anak usia 0-60 bulan, pembahasan melibatkan perempuan secara substansif tidak hanya sosio-demografis saja.
Kriteria Eksklusi	Skripsi, tesis, disertasi, laporan pengabdian, artikel tidak *full text*, serta berfokus pada medis dan sosio-demografis tanpa dimensi gender.
Proses Seleksi PRISMA	Identification: Taylor and Francis (N=8.460), Google Scholar (N=6.600), Garuda (N=2) dengan total 15.062. *Screening* judul dan abstrak: Taylor Francis (N=54), Google Scholar (N=109), Garuda (N=2). *Eligibility* : Taylor and Francis (N=5), Google Scholar (N=12), Garuda (N=0). Jumlah artikel N=17 artikel.
Teknik Analisis	Analisis tematik berbasis tiga struktur teori Gender and Power oleh R.W Connell yaitu pembagian kerja berbasis gender, pembagian kekuasaan berbasis gender, dan *cathexis*)
Validitas Analisis	*Peer checking* dengan pembimbing penelitian; *audit trail* dokumentasi tahapan seleksi artikel.

3. Hasil dan Pembahasan

Sebelum membahas masing-masing tema secara mendalam, perlu disajikan gambaran umum atas temuan keseluruhan SLR ini. Dari 17 artikel yang dianalisis, ditemukan empat tema utama yang mencerminkan proses ketimpangan gender membentuk pengalaman perempuan dalam narasi stunting. *Pertama* pengaruh sosio-ekonomi terhadap resiko stunting menunjukkan bahwa faktor pendapatan, pendidikan ibu, dan usia pertama melahirkan berinteraksi dengan mekanisme pembagian kerja berbasis gender. *Kedua* otonomi perempuan dan relasi gender mengungkapkan proses stuktur kekuasaan dalam keluarga membatasi kemampuan perempuan untuk mengakses layanan kesehatan dan mengambil keputusan terkait gizi anak. *Ketiga* praktik budaya dan norma adat menunjukkan bahwa *cathexis* atau norma afektif yang diwariskan lintas generasi melanggengkan praktik perawatan yang beresiko pada gizi anak. *Keempat* digitalisasi perawatan mengungkapkan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya membuka akses informasi kesehatan tetapi sekaligus menciptakan beban normatif baru bagi perempuan melalui konstruksi citra ibu ideal di ruang digital. Keempat tema ini saling terkait dan bersama-sama membentuk pemahaman yang komprehensif mengenai posisi perempuan dalam narasi stunting melalui lensa teori Gender and Power (Connell, 1987).

3.1 Pengaruh Sosio-Ekonomi terhadap Resiko Stunting

Dalam kerangka teori Gender and Power Connell (1987) kondisi sosio-ekonomi keluarga tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan mekanisme pembagian kerja berbasis gender yang menempatkan perempuan pada posisi bergantung secara finansial kepada laki-laki. Keterbatasan ekonomi perempuan merupakan salah satu wujud dari kontrol sumber daya yang bersifat struktural dan berbasis gender. Stunting pada anak dipengaruhi oleh faktor sosio-ekonomi keluarga. Sosio-ekonomi dalam penelitian ini dimaknai sebagai pendapatan (Derso et al., 2024; Gulo & Suryadi, 2023; Pamungkas et al., 2021; Tchakounté Tchuimi, 2023a; Triratnawati & Yuniati, 2023a; Wiliyanarti et al., 2025a), pendidkan ibu (Derso et al., 2024; Gulo & Suryadi, 2023; Obayelu & Adeleye, 2021; Pamungkas et al., 2021; Wiliyanarti et al., 2025a), perempuan yang memiliki pekerjaan (Obayelu & Adeleye, 2021; Tchakounté Tchuimi, 2023a), usia ibu (Devi Arine Kusumawardani, Sofia Al Farizi, 2022; Gulo & Suryadi, 2023; Obayelu & Adeleye, 2021; Tchakounté Tchuimi, 2023a), indeks kesejahteraan (Obayelu & Adeleye, 2021), dan wilayah (Gulo & Suryadi, 2023; Obayelu & Adeleye, 2021).

Faktor pertama dalam sosio-ekonomi yang mempengaruhi stunting pada anak yaitu pendapatan (Derso et al., 2024; Triratnawati & Yuniati, 2023a) yang akan berdampak pada akses keluarga terhadap pangan yang bergizi untuk anak. Keluarga yang memiliki pendapatan lebih besar akan memiliki akses terhadap pangan bergizi, nutrisi dan fasilitas kesehatan yang baik, pendidikan, pakaian, serta produk higienis. Pendapatan yang besar juga memungkinkan pemenuhan kebutuhan keluarga walaupun lokasi pasar yang jauh (Derso et al., 2024). Keluarga yang memiliki ekonomi yang lebih baik juga akan memiliki kontrol terhadap sumber daya finansial dan meningkatnya partisipasi pengambilan keputusan rumah tangga karena ibu memiliki pilihan untuk dirinya sendiri dan anak sehingga mengurangi resiko stunting. Status ekonomi yang baik ditandai dengan tingginya pendapatan maka akan berdampak pada perempuan memiliki alokasi waktu lebih tinggi. Namun, memiliki konsekuensi berkurangnya waktu untuk perawatan kesehatan anak sehingga anak cenderung beresiko stunting karena anak tidak mendapatkan nutrisi yang berkualitas saat ibu bekerja (Tchakounté Tchuimi, 2023a). Keluarga dengan kondisi ekonomi tinggi akan memiliki investasi nutrisi yang baik juga terhadap anak (Triratnawati & Yuniati, 2023a).

Namun, kondisi ekonomi yang tidak memadai akan berdampak pada ibu yang hanya makan ala kadarnya dan tidak bisa membuat keputusan sendiri untuk membeli makanan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak (Gulo & Suryadi, 2023). Hal ini dibuktikan dengan kelompok balita stunting sebanyak 45.2% berada pada keluarga dengan pendapatan rendah yaitu rata-rata Rp 950.000,00/bulan. Kondisi ini akan berkonsekuensi pada ketersediaan pangan dan kecukupan gizi balita dan keluarga. Pamungkas et al., (2021) serta Triratnawati & Yuniati, (2023) juga

mengungkapkan bahwa pendapatan keluarga yang rendah beresiko 2.1 kali menyebabkan stunting pada balita. Ibu yang menghadapi masalah ekonomi akan kesulitan untuk memberikan nutrisi yang mencukupi bagi anak sehingga ibu harus bekerja sebagai petani yang berdampak pada beban ganda yang harus dihadapi oleh ibu (Wiliyanarti et al., 2025a). Hal ini disebabkan tidak adanya pembagian peran domestik dari suami. Obayelu & Adeleye (2021) melihat sisi positif dari ibu yang bekerja di sektor pertanian yaitu ibu memiliki kehidupan yang lebih baik untuk meningkatkan status nutrisi anak. Hal ini disebabkan oleh mudahnya mengakses berbagai jenis makanan dan produk hewani di pertanian mereka untuk mengurangi permasalahan makanan dan membantu pemenuhan nutrisi anak.

Selanjutnya, faktor pendidikan ibu yang baik akan mengurangi resiko anak stunting dibandingkan anak dengan ibu yang tidak mengenyam pendidikan formal karena ibu memiliki informasi mengenai dampak makanan pada anak (Derso et al., 2024), dan nutrisi anak (Obayelu & Adeleye, 2021; Salman et al., 2023a). Di sisi lain, 58% ibu yang tidak mengenyam pendidikan formal akan memiliki anak stunting (Gulo & Suryadi, 2023; Obayelu & Adeleye, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas et al. (2021) juga menunjukkan hasil yang senada yaitu 35.3% ibu yang memiliki pendidikan rendah berpeluang 1.2 kali mengalami stunting. Wiliyanarti et al., (2025) turut memperkuat pembahasan ini dengan menjelaskan bahwa pendidikan Ibu yang hanya menyelesaikan pendidikan dasar akan membuat ibu tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai penyediaan nutrisi dan pemberian makanan pada bayi dan balita. Rendahnya tingkat pendidikan menjadi hambatan struktural yang membuat perempuan semakin tidak berdaya di bawah tekanan pembagian kerja patriarkal. Ibu tidak tahu proses meningkatkan berat badan anak setiap bulan dan pentingnya memonitor perkembangan berat badan anak (Wiliyanarti et al., 2025b). Bahkan ibu membelikan Milo untuk anak setelah anak berusia enam bulan tetapi ini membuat berat badan anak terus menurun. Temuan berbeda dalam penelitian Chawa et al., (2024) menunjukkan bahwa orang tua dengan pendidikan tinggi cenderung memiliki anak yang stunting yaitu pada kelompok orang tua dengan pekerjaan bidan dan perangkat desa.

Temuan Chawa et al. (2024b) penting untuk dijelaskan lebih lanjut karena menyanggah premis umum bahwa pendidikan yang lebih tinggi secara otomatis mengurangi resiko stunting. Penjelasan ini dapat ditemukan dalam lensa *cathexis* (Connell, 1987) yaitu orang tua berpendidikan tinggi di Desa Sidomulyo menginternalisasi norma perawatan yang permisif di era digital yaitu mengikuti keinginan makan anak demi memastikan anak mau makan meski tidak bergizi sebagai bentuk ekspresi kasih sayang yang dianggap modern dan responsif. Dengan kata lain *cathexis* baru berupa gaya perawatan berbasis keinginan anak justru menggantikan perhatian pada kandungan gizi makanan. Temuan ini memperkuat argumen bahwa pendidikan formal saja tidak cukup mengubah perilaku perawatan

tanpa disertai transformasi norma *cathexis* dalam keluarga dan masyarakat. Implikasinya intervensi stunting perlu melampaui pendekatan edukasi kognitif dan menyentuh dimensi normatif dan afektif pengasuhan.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kondisi stunting pada anak yaitu usia ibu. Ibu dengan usia 15 tahun – 19 tahun akan cenderung memiliki anak stunting (Tchakounté Tchuimi, 2023a) sedangkan ibu dengan usia 21 tahun – 30 tahun memiliki anak stunting sebesar 51.4% (Devi Arine Kusumawardani, Sofia Al Farizi, 2022; Obayelu & Adeleye, 2021). Usia ibu yang terlalu muda atau kurang dari 20 tahun cenderung memiliki pengetahuan dan pengalaman yang kurang dalam merawat anak sehingga umumnya ibu tersebut akan merawat anak berdasarkan pengalaman orang tua terdahulu (Devi Arine Kusumawardani, Sofia Al Farizi, 2022). Usia pertama ibu melahirkan beresiko pada stunting karena perempuan memiliki sedikit eksposur bahkan tidak memiliki sama sekali pengetahuan mengasuh anak dan nutrisi anak (Obayelu & Adeleye, 2021). Lebih lanjut, Obayelu & Adeleye (2021) mengemukakan bahwa hamil usia muda beresiko 1,4 kali untuk stunting pada balita. Ibu yang hamil saat usia remaja berkonsekuensi pada pertumbuhan dan gizi ibu remaja sehingga rentan kekurangan gizi akibatnya berdampak pada meningkatkan resiko stunting (Pamungkas et al., 2021). Perempuan yang melahirkan di usia muda memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki eksposur terhadap pengetahuan yang baik untuk merawat anak, metode modern di fasilitas kesehatan, dan nutrisi untuk anak (Obayelu & Adeleye, 2021). Dalam perspektif Connell, ibu usia remaja berada dalam posisi subordinat ganda yaitu ibu belum matang secara gizi dan pengetahuan serta tidak memiliki posisi tawar dalam pembagian kerja domestik.

Salman et al. (2023b) menjelaskan bahwa tidak terpenuhinya nutrisi ibu selama kehamilan akan menyebabkan rendahnya berat badan bayi dan berdampak pada stunting. Salman et al. (2023a) juga mengungkapkan bahwa selain pendidikan ibu dan status ekonomi rumah tangga juga dipengaruhi pula oleh ANC, tempat persalinan, sanitasi, dan wilayah tempat tinggal. Ibu yang tidak mengunjungi ANC tidak mendapatkan informasi mengenai nutrisi anak. Mayoritas anak di pedesaan Nigeria yang melahirkan di rumah oleh tenaga kesehatan yang tidak profesional hanya memberikan sedikit edukasi atau tidak memberikan sama sekali edukasi terhadap nutrisi anak. Bayi ibu yang melahirkan di rumah diasosiasikan memiliki nutrisi yang rendah. Ibu yang mengunjungi fasilitas kesehatan memiliki keuntungan mendapatkan informasi beharga tentang nutrisi dan kesehatan anak (Salman et al., 2023a). Ibu Desa Labotan Kandi, Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah memilih melahirkan di dukun karena mudah, dekat, dan tradisi yang sudah berlangsung lama (Triratnawati & Yuniati, 2023a).

3.2 Otonomi Perempuan dan Relasi Gender

Dalam teori Gender and Power Connell (1987), pembagian kekuasan berbasis gender bekerja melalui mekanisme *hegemonic masculinity* yaitu bentuk maskulinitas dominan yang menempatkan laki-laki sebagai pengambil keputusan utama dalam keluarga sekaligus pemegang kendali atas sumber daya, keputusan kesehatan, dan mobilitas perempuan. Struktur kekuasan bukan hanya aktor yang memerintah tetapi proses ketidaksetaraan ini menjadi norma yang diterima semua pihak. Sintesis lintas literatur menunjukkan tiga pola yaitu *pertama* laki-laki mengendalikan keputusan finansial keluarga sementara perempuan tidak memiliki akses otonom terhadap pendapatan suami (Salman et al., 2023b; Triratnawati & Yuniati 2023b; Tri et al., 2023). *Kedua* keputusan kesehatan anak mulai dari pemilihan fasilitas, pengeluaran untuk nutrisi, hingga jenis makanan yang dibeli, bergantung pada persetujuan atau inisiatif suami (Tchakounté Tchuimi, 2023b; Palan Peten et al., 2023;Tanjung et al., 2025). *Ketiga* perempuan kehilangan *bargaining power* bahkan ketika perempuan bekerja di ranah publik. Perempuan tetap dipaksa kembali ke ranah domestik ketika anak membutuhkan termasuk harus melepaskan pekerjaan dan studi magister (Utami et al., 2024b). Satu kontradiksi yang penting yaitu Tanjung et al. (2025) melaporkan pengambilan keputusan yang lebih egaliter di Labuhanbatu Utara berbeda dengan dominasi penuh suami di Labotan Kandi (Triratnawati & Yuniati, 2023b). Kontradiksi ini menunjukkan bahwa otonomi perempuan sangat bergantung pada konteks kekerabatan patrilineal lokal. Hal yang konsisten yaitu struktur yang mana perempuan tidak memiliki otonomi penuh atas keputusan yang menentukan kualitas gizi dan kesehatan anak.

Mukong & Burns (2021a) menyetujui bahwa kerja sama pengambilan keputusan suami-istri mengenai fasilitas kesehatan mengurangi resiko stunting sebesar 9% dan kerjasama keputusan pembelian dalam keluarga menguranginya 4%. Data ini mempertegas bahwa redistribusi kekuasaan dalam keluarga bukan hanya soal keadilan gender, tetapi memiliki dampak yang terukur dan konkret pada gizi anak. Kondisi KDRT yang dialami perempuan turut memperburuk hal ini yaitu stunting meningkat sejalan dengan kekerasan dalam rumah tangga (Mukong & Burns, 2021a), menunjukkan bahwa relasi kuasa yang timpang dalam keluarga bekerja melalui berbagai mekanisme termasuk kekerasan. Connell (1987) menyebut kondisi ini sebagai *hegemony masculity* yang tidak hanya mendominasi secara ekonomi dan pengambilan keputusan tetapi juga melalui kontrol fisik dan psikologis atas tubuh dan mobilitas perempuan.

Tchakounté Tchuimi (2023) mendefinisikan otonomi sebagai sumber daya, kekuatan atau kuasa, agensi, kontrol, dan pengambilan keputusan. Salman et al. (2023a) mengartikan indikator otonomi adalah kemampuan atau kuasa ibu mengambil keputusan mengenai pemilihan fasilitas kesehatan. Meningkanya

otonomi perempuan terhadap keputusan kesehatan akan mengurangi buruknya kondisi kesehatan anak sebesar 11% (Devi Arine Kusumawardani, Sofia Al Farizi, 2022; Salman et al., 2023a)

Otonomi ibu yang rendah berkontribusi pada buruknya nutrisi anak di pedesaan Nigeria (Salman et al., 2023a). Salman et al. (2023a) melanjutkan bahwa hampir 70% ibu tidak memiliki kebebasan menentukan keputusan kesehatannya, sekitar 72% tidak diizinkan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pembelian kebutuhan rumah tangga, lebih dari 60% ibu tidak diizinkan mengunjungi teman dan saudara, serta 77% ibu tidak memiliki kebebasan untuk memutuskan penggunaan pendapatan suami. Namun, sekitar 52% ibu di pedesaan memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan oleh pendapatannya sendiri. Otonomi ibu dalam menggunakan pendapatan pribadinya akan berdampak pada meningkatnya nutrisi anak dan mengurangi resiko memburuknya kondisi kesehatan anak.

Salman et al. (2023a) menyebutkan salah satu hambatan perempuan pedesaan Nigeria adalah harus meminta izin suami sebelum keluar dan perempuan harus ditemani ketika mengakses fasilitas kesehatan dengan alasan jarak fasilitas kesehatan yang jauh dan beresiko pada ketidakamanan perjalanan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Tanjung et al. (2024) yang mengemukakan bahwa suami turut berperan aktif dalam mengantarkan istrinya yang sedang hamil untuk mendapatkan layanan kesehatan yaitu pada dokter atau bidan tetapi perempuan pergi sendiri jika ingin mengunjungi Posyandu Labuhanbatu Utara (Tanjung et al., 2024). Hal ini senada dengan penelitian Gulo & Suryadi (2023) bahwa peran suami masih belum maksimal karena tidak mengantar istri ke fasilitas kesehatan di Kabupaten Banjar. Namun, ketika pengambilan keputusan terhadap anak, relasi ibu dan suami tidak berjalan timpang dan keduanya aktif (Tanjung et al., 2024). Keputusan penting seperti waktu harus membawa anak ke dokter atau bidan umumnya dibuat bersama-sama melalui diskusi antara keduanya.

Penelitian Tchakounté Tchuimi (2023) menunjukkan bahwa pengambilan keputusan oleh ibu akan mungkin jika keluarga memiliki sumber daya ekonomi yang baik. Peten et al. (2023) menceritakan bahwa sebagian ibu berusaha mengikuti arahan kader untuk memperbaiki pola makan anak tetapi sebagian ibu yang lain tidak melakukannya karena ketika kembali ke rumah segala keputusan terkait gizi keluarga bergantung pada suami yang mencari dan memberi nafkah. Ibu biasanya bisa mengambilkan makanan bergizi untuk anak dari hasil pertanian dan peternakan. Namun, hasil yang biasanya dikelola suami seperti buah, sayur, dan telur dijual ke pasar untuk mendapatkan uang tunai. Ibu dengan anak stunting menceritakan bahwa untuk pemenuhan protein anaknya bergantung keuangan keluarga, akibatnya setelah tiga bulan pemberian bantuan PMT, ada anak yang kembali pada status stunting (Peten et al., 2023). Gulo & Suryadi (2023) menyampaikan bahwa kondisi ekonomi menentukan makanan yang dikonsumsi oleh ibu sehingga ibu tidak bisa

membeli makanan yang memiliki kandungan gizi yang baik bagi kesehatan dan kandungan ibu.

Selain otonomi perempuan, sub bab ini akan mendiskusikan relasi bias gender antara perempuan dan laki-laki di ranah keluarga terkait kesehatan anak. Mayoritas laki-laki berada pada ranah publik dan perempuan diposisikan pada ranah domestik. Chawa et al., (2024) menyatakan bahwa suami berperan sebagai pencari nafkah utama dengan bekerja sebagai petani sedangkan 67.6% istri di Desa Sidomulyo adalah ibu rumah tangga. Mayoritas penduduk desa masih memandang perempuan yang bekerja sebagai ibu rumah tangga dan merawat anak-anak sebagai norma yang diterima. Triratnawati & Yuniati (2023) juga mengungkapkan bahwa laki-laki di Desa Labotan Kandi berperan besar dalam ranah yang bersifat publik, sedangkan perempuan (istri) berperan di ranah domestik. Perempuan di wilayah tersebut menjalankan segala kegiatan dan kewajiban rumah tangga serta menerima dengan lapang dada pembagian kerja yang bersifat domestik. Selain itu, pengambilan keputusan dalam rumah tangga semua diputuskan berdasarkan pendapat suami, sedangkan perempuan menerima begitu saja keputusan suami. Dalam hal pembagian makan, laki-laki yang diutamakan untuk mengambil makanan sedangkan istri dan anak mendapatkan sisa dari makanan suami. Semua perempuan termasuk perempuan petani berpartisipasi dalam kegiatan pertanian sebagai salah satu bentuk kewajiban membantu suami. Anak yang ditinggal di rumah karena tidak diajak ke kebun menjadi tidak terurus dan terabaikan, berdampak pada kebutuhan gizi tidak tercukupi dengan baik. Penelitian yang dilakukan oleh Chawa et al. (2024) menunjukkan hasil serupa yang mana perempuan sebagai istri dan ibu tetap membantu suami atau orang tua di kebun bunga. Ketika dibutuhkan di kebun, perempuan akan meninggalkan anaknya dan menitipkannya pada orang tua yang lain sehingga ketika anak menangis anak diberikan air saja karena belum menyusui di Desa Sidomulyo.

Triratnawati & Yuniati (2023) menjelaskan bahwa kekuasan yang berpusat pada laki-laki diakibatkan kekerabatan patrilineal berdampak pada status perempuan di Labotan Kandi. Perempuan dianggap sebagai warga kelas dua yang tidak mendapatkan akses untuk menentukan diri dan anaknya. Kesemua aspek kesehatan yang menyangkut ibu dan anak dalam pengambilan keputusannya ditentukan oleh para suami. Alat kontrasepsi yang dipilih pun ditentukan oleh para suami, meski ada sedikit ibu yang mengatakan dapat dikompromikan terlebih dahulu dengan suami. Kontrol kepala keluarga atas ranah domestik cukup kuat. Pihak perempuan hanya difungsikan sebagai pelaksana dari semua aturan yang dibuat kepala keluarga. Hal ini berdampak pada perempuan tidak memiliki otonomi atas diri maupun anak-anaknya. Perempuan lebih banyak menanggung pekerjaan rumah tangga maupun pekerjaan di ladang atau hutan. Beban kerja perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Perempuan mengasuh anak waluapun perempuan harus membawa

anak-anaknya ke ladang atau hutan. Sejak bayi lahir sampai usia sekolah pengasuhan anak dilakukan oleh ibu dibantu anggota keluarga lain yang tinggal serumah. Balita akan disusui sampai umur dua atau empat tahun. Asal bisa mengurus rumah tangga dengan baik, dan membantu mengelola pertanian di kebun sudah menjadi persyaratan seorang istri yang ideal. Perempuan akan membawa beban yang berat saat pulang dari hutan yaitu dengan menggendong bayinya dan mengangkat seluruh hasil hutan yang menjadi tanggung jawabnya. Perempuan berjalan kaki berkilo-kilo meter, ditambah dengan berbagai tanggung jawab domestik setelah ditinggal bekerja di hutan.

Utami et al. (2024) menjelaskan bahwa status sebagai istri dan ibu membuat perempuan sebagai sosok sentral dalam memenuhi kebutuhan nutrisi keluarga. Ibu memastikan kebutuhan nutrisi anak menjadi tanggung jawab absolut. Namun, di sisi lain, ibu harus menjalankan tugas lain seperti mengasuh anak, mencuci piring, mencuci baju, membersihkan kamar mandi, belanja, membeli berbagai kebutuhan untuk anak, serta memasak untuk suami, kakek, dan anak. Perempuan menghabiskan banyak waktu untuk anak karena perempuan dianggap memiliki banyak waktu. Masalah anak adalah tanggung jawab perempuan. Pengasuhan suami terhadap anak sangat minimal karena suami hanya berfokus pada pemenuhan tugas sebagai kepala keluarga. Suami bekerja mulai dari pagi hari. Perempuan juga mengambil keputusan untuk mengganti susu karena mahal tetapi suami tidak ingin tahu harga susu selama tidak mahal. Namun, Chawa et al. (2024) menemukan bahwa 0.9% suami mengalokasikan pengeluaran utama terhadap rokok.

Peten et al. (2023) menyampaikan bahwa salah seorang ibu dengan anak stunting dari Desa Sandosi mengakui bahwa semua pekerjaan domestik dilakukannya sendiri bahkan sebelum hamil dan melahirkan, ibu sering ikut bekerja dengan suaminya di kebun. Namun, setelah mempunyai anak, aktivitas dari pagi sampai malam dilakukan di rumah dari mengurus rumah, memberi makan anak, mengawasi anak saat bermain hingga anak makan dan tidur malam. Kini segala aktivitas domestik, produktif maupun publik dilakukan sendiri karena suaminya sudah merantau. Suaminya memang berperan sebagai tulang punggung keluarga dan bekerja mencari nafkah. Para suami Lamaholot sibuk di kebun atau melaut sehingga kembali dari kebun atau melaut, mereka lebih banyak beristirahat dan jarang atau tidak melakukan pekerjaan rumah tangga dan merawat anak. Pekerjaan di ranah publik membuat suami minim melakukan aktivitas domestik.

Tanjung et al. (2024) mengungkapkan bahwa perempuan paling sering memutuskan soal makanan dan pengasuhan anak. Keputusan penting terkait kesehatan anak masih diputuskan bersama suami. Hal ini sejalan dengan pembagian kerja tradisional berdasarkan gender, yang mana suami lebih terlibat dalam pengambilan keputusan yang dianggap strategis, sementara istri mengelola keseharian anak. Laki-laki sering kali diasosiasikan dengan tanggung jawab dalam

hal-hal yang bersifat strategis dan pengambilan keputusan krusial, seperti kesehatan atau keuangan, sementara perempuan lebih sering terlibat dalam kegiatan yang bersifat harian, seperti pengasuhan dan pemeliharaan rumah tangga.

Bahkan ketika suami dan istri bekeja, ini tidak berarti memberikan perempuan *bargaining power* yang setara. Perempuan selalu dipaksa kembali ke ranah domestik ketika anak membutuhkannya. Perempuan hingga harus mengambil keputusan berhenti bekeja dan tidak melanjutkan kuliah magister untuk mengasuh anak (Utami et al., 2024a). Hal ini berbeda dengan temuan Wiliyanarti et al. (2025) yang mengemukakan bahwa ibu yang memiliki masalah keterbatasan ekonomi sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan nutrisi anak seperti telur dan susu akhirnya memutuskan bekerja sebagai petani dan mengalami beban ganda dengan konsekuensi anak mengalami malnutrisi karena ibu sibuk bekerja di sawah tanpa memberikan perhatian pada nutrisi anak.

Peten et al. (2023) menambahkan salah seorang ibu yang memiliki enam anak dengan salah satunya mengalami stunting menceritakan bahwa saat ini suaminya merantau untuk ekonomi keluarga. Perempuan mendapatkan kiriman uang dari suami untuk membeli kebutuhan makan minum, pampers, bedak, dan minyak telon untuk anak serta kebutuhan rumah tangga lain. Karena suaminya merantau mencari nafkah maka ia menganggap tugasnya mengurus anak dan segala aktivitas domestik.

Penanganan stunting di Kabupaten Sidoarjo (Utami et al., 2024a) dan Makassar (Gustiwati, 2025) menempatkan perempuan dalam posisi yang bertanggung jawab atas stunting. Hal ini menciptakan relasi kuasa yang dinamis menempatkan perempuan sebagai pihak utama yang melakukan perawatan pada anak. Akibatnya, perempuan diposisikan subordinat baik di rumah tangga dan relasinya dengan pihak medis (Gustiwati, 2025). Beberapa ibu yang diwawancarai menyatakan bahwa walaupun ibu secara langsung memenuhi kebutuhan anak, ibu merasa tidak didengarkan oleh suami atau anggota keluarga lain ketika mencoba mengubah pola makan atau perawatan kesehatan anak.

Mukong & Burns (2021) menambahkan temuan bahwa anak dengan kondisi stunting meningkat sejalan dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sebaliknya, kerjasama pengambilan keputusan mengenai fasilitas kesehatan akan mengurangi resiko stunting pada anak sebesar 9% dan kerjasama keputusan pembelian dalam keluarga mengurangi anak dengan stunting sebanyak 4%.

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa ibu mendapatkan dukungan sosial yang diperoleh ibu dalam mengasuh anak pada kelompok balita stunting dan non-stunting termasuk kategori kurang dan dukungan sosial berhubungan dengan

kapabilitas ibu yang mempengaruhi stunting pada anak. Dukungan sosial berupa informasi, perhatian, dan layanan atau bantuan dari keluarga maupun orang lain di sekitar ibu dapat mempengaruhi perilaku ibu dalam merawat anak balita yang berpengaruh terhadap status gizi balita (Devi Arine Kusumawardani, Sofia Al Farizi, 2022). Ibu Desa Labotan Kandi tidak melakukan pengasuhan anak sepenuhnya sendiri karena sejak bayi lahir sampai usia sekolah pengasuhan anak dilakukan oleh ibu dibantu anggota keluarga lain yang tinggal serumah (Triratnawati & Yuniati, 2023a). Dukungan yang signifikan dari keluarga terdekat, seperti orang tua dan mertua berupa pengasuhan anak saat ibu sibuk, dan saran dalam merawat anak meringankan beban ibu, terutama jika ibu memiliki banyak tanggung jawab di dalam rumah maupun di luar rumah (Tanjung et al., 2024).

3.3 Praktik Budaya dan Norma Adat yang Mempengaruhi Pola Pengasuhan dan Gizi Anak

Struktur ketiga dalam teori Gender and Power Connell (1987) adalah *cathexis* yaitu sistem norma sosial dan ikatan emosional yang mengatur relasi feminitas dan maskulinitas melalui internalisasi nilai-nilai patriarkal. Connell (1987) menyebut fenomena ini sebagai subordinasi yang terinternalisasi yaitu suatu kondisi ketika perempuan menerima dan bahkan menghayati nilai-nilai yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat sebagai bagian dari identitas feminin yang dianggap wajar dan alamiah. *Cathexis* bekerja lebih halus dari dua struktur sebelumnya karena beroperasi melalui perasaan kasih sayang, kewajiban moral, dan rasa tanggung jawab yang dianggap normal oleh semua pihak termasuk perempuan itu sendiri. Dalam konteks stunting, *cathexis* memanifestasikan diri dalam dua lapis yang saling memperkuat yaitu praktik budaya pengasuhan yang diwariskan lintas generasi sebagai ekspresi kasih sayang dan identitas komunitas serta internalisasi perempuan atas beban perawatan anak sebagai "kodrat" feminin yang "alamiah" dan tidak terbantahkan.

Menjadi penting untuk memahami bahwa praktik budaya dalam literatur stunting bukan sekedar "kearifan lokal yang perlu diluruskan dengan edukasi. Praktik-praktik seperti pemberian makanan dini pada bayi merupakan manifestasi *cathexis* yang terinstitusionalisasi dan dipertahankan oleh agen-agen yang lebih tua seperti nenek, mertua, dan tokoh masyarakat. Ibu tidak bisa menghentikan praktik ini bukan karena tidak tahu, tetapi karena melawan praktik tersebut berarti melawan otoritas *cathexis* dalam keluarga besar. Wiliyanarti et al. (2025b) memperlihatkan bahwa ibu tidak bisa menghentikan pemberian makanan pada bayi karena nenek akan marah dan terus memaksa. Ini bukan kegagalan individual ibu, melainkan bukti bahwa *cathexis* beroperasi melalui relasi kekuasaan antar-generasi. Implikasi analitisnya jelas yaitu intevensi yang hanya menyasar ibu tidak akan efektif mengubah praktik yang akarnya ada pada norma *cathexis* masyarakat. Nenek, mertua,

suami, dan tokoh adat adalah agen *cathexis* yang sama pentingnya sebagai sasaran intevensi.

Praktik budaya pada anak beresiko pada meninggalnya anak. Penelitian Wiliyanarti et al. (2025) mengungkapkan bahwa praktik memberikan makanan pada anak pada waktu yang sudah ditentukan merupakan tradisi yang sudah ada sejak lama, dari satu generasi ke generasi selanutnya, khususnya di wilayah pedesaan Indonesia yaitu Pamekasan, Madura. Ditambah lagi ketika belum waktunya makan dan bayi sudah menangis maka berdasarkan pengetahuan nenek moyang, itu tanda bahwa anak lapar dan akan harus diberi makan segera. Namun, usus bayi yang belum siap memproses makanan untuk diberi makan selain ASI menyebabkan gangguan gastrointestinal yang parah dan berujung pada kematian bayi. Implikasi praktik budaya ini adalah pada kesulitan ibu memberikan ASI.

Ibu tidak bisa menghentikan praktik pemberian makanan pada bayi karena nenek akan marah dan terus memaksa untuk memberikan bayi makanan (Wiliyanarti et al., 2025a). Secara khusus Wiliyanarti et al. (2025) menyebutkan makanan yang diberikan pada bayi yaitu madu, air kelapa, dan obat herbal tradisional untuk bayi dan balita. Praktik budaya ini bermakna bahwa makanan dan minuman ini meningkatkan nafsu makan anak. Hal ini sesuai dengan penelitian Triratnawati & Yuniati (2023) yang menjelaskan bahwa ibu memberikan makan anaknya dengan pisang emas di pasar agar bayi cepat reda menangis dan juga memang telah diberikan kepada bayi secara turun-temurun di Desa Labotan Kandi, Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. Lebih lanjut, praktik pemberikan makanan pisang oleh ibu kepada bayi dilakukan oleh ibu dengan mengunyah pisang itu di mulutnya kemudian setelah pisang lembut barulah dimasukkan ke mulut bayi. Cara yang terakhir ini dianggap paling mudah karena tidak perlu menggunakan sendok kecil mengingat tidak setiap keluarga memiliki sendok kecil.

Wiliyanarti et al. (2025) juga menyampaikan bahwa setelah bayi lahir, bayi harus diberikan madu untuk memperkenalkan bayi pada makanan ketika ASI ibu belum keluar. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan nafsu makan bayi. Sayangnya ibu juga memberikan makanan tambahan seperti pisang yang ditumbuk. Makanan tidak hanya menjadi sumber nutrisi untuk fisik tetapi memiliki nilai kultural. Triratnawati & Yuniati (2023) mengemukakan bahwa bayi baru lahir juga diberikan umbi untuk mengenalkan pangan lokal masyarakat. Kebiasaan memberi makan bayi secara dini telah berjalan secara turun temurun. Beberapa informan memberi makan bayi usia dua minggu dengan bubur ubi Banggai atau bubur sachet merk S yang dibeli di warung. Sementara ibu lain memberikan bubur tersebut di usia bayi satu hingga dua bulan. Pemberian makan bubur didasari karena bayi terus menangis karena dipercaya bayi sedang lapar. Dengan memberikan bubur, tangisan bayi akan hilang serta tidurnya menjadi lebih nyenyak. Pemberian makanan di Kabupaten Banjar yang

sekedarnya ini dilakukan asak yang penting bayi kenyang tana memperhatikan gizi (Gulo & Suryadi, 2023). Budaya selanjutnya yaitu ibu sering mengunjungi dukun bayi atau kyai untuk mendapatkan air berkah dan jimat yang dapat melindungi anak dari penyakit. Ibu juga sering mengunjungi dukun bayi agar anaknya dipijat dan mendapatkan jamu untuk meningkatkan nafsu makan bayi (Wiliyanarti et al., 2025a).

3.4 Digitalisasi Pengasuhan, Literasi Kesehatan, dan Konstruksi Ibu Ideal di Media Sosial

Perkembangan digitalisasi dalam narasi stunting dapat dikaji melalui lensa *cathexis* Connell (1987) yaitu alih-alih meringankan beban perempuan, digitalisasi justru berpotensi menciptakan lapisan *catexhis* baru berupa konstruksi ibu ideal digital atau *digital mother* yang semakin kompleks dan normatif. Ratri (2024a) menunjukkan bahwa negara dan tenaga kesehatan secara aktif menggunakan media sosial untuk mensosialisasikan standar pengasuhan dan gizi anak sehingga tercipta ekspektasi baru yaitu ibu yang baik adalah ibu yang melek digital, mampu menyaring informasi gizi dari ruang daring dan menerapkannya secara optimal. Ini merupakan perluasan *cathexis* ke medium baru yang mana beban yang sama dengan lapisan tambahan dan ekspektasi ini hampir selalu ditujukkan kepada ibu, tidak pernah kepada ayah. Dengan demikian, digitalisasi dalam konteks stunting bukan instrumen pemberdayaan perempuan, melainkan perluasan normatif dari subordinasi perempuan ke ruang digital.

Sintesis lintas literatur menemukan bahwa meskipun mayoritas ibu mahir menggunakan gadget dan media sosial (Chawa et al., 2024b; Tanjung et al., 2025), akses digital ini tidak otomatis meningkatkan partisipasi dalam pencegahan stunting. Chawa et al. (2024b) memperlihatkan bahwa 82.4% responden tidak berpartisipasi dalam diseminasi informasi stunting dan media sosial lebih banyak digunakan untuk hiburan dan pemesanan makanan. Ironisnya, kemudahan memesan makanan via aplikasi justru berkontribusi pada pola makan anak yang tidak bergizi karena orang tua mengikuti keinginan anak agar mau makan. Gustiawati et al. (2025) menambahkan bahwa banyak orang tua hanya mengikuti rekomendasi tenaga kesehatan secara mekanis tanpa pemahaman substansif atau kemampuan mengambil keputusan sendiri. Ini adalah *cathexis* kepatuhan terhadap otoritas medis yang menggantikan *cathexis* tradisi tetapi tanpa menggeser subordinasi perempuan. Dengan demikian, literasi digital yang tinggi tanpa transformasi relasi gender dalam keluarga tidak akan menghasilkan perubahan perilaku gizi yang bermakna. Intervensi digital perlu dirancang agar menyasar ayah dan keluarga besar secara setara bukan hanya menarget ibu sebagai penerima pesan tunggal.

Digitalisasi dalam konteks stunting memiliki dua wajah yang perlu dipahami bersama. Di satu sisi, digitalisasi membuka akses baru bagi perempuan terhadap informasi kesehatan, gizi anak, dan layanan kesehatan berbasis teknologi sehingga

dapat menjangkau masyarakat yang sebelumnya terbatas oleh jarak dan waktu. *Platform* digital seperti Youtube, grup Whatsapp, dan Google menjadi kanal tambahan yang melengkapi informasi yang diperoleh dari Posyandu dan tenaga kesehatan (Tanjung et al., 2025; Chawa et al., 2024b). Di sisi lain, digitalisasi juga membuka peluang bagi keluarga untuk memperoleh makanan dengan cara yang lebih mudah melalui pemesanan berbasis aplikasi digital. Kemudahan ini memiliki konsekuensi gizi yang tidak terduga yaitu pilihan makan yang tersedia melalui aplikasi seringkali tidak sesuai standar gizi anak, dan pola perawatan yang permisif mendorong orang tua untuk mengikuti preferensi anak daripada mempertimbangkan nilai nutrisi makanan (Chawa et al., 2024b). Dua dimensi ini perlu dibaca secara kritis untuk memahami proses digitalisasi membentuk dan memperumit pengalaman perempuan dalam memenuhi kebutuhan gizi anak di era teknologi.

Penelitian Tanjung et al. (2024) menunjukkan bahwa sumber informasi kesehatan dari kader, tenaga kesehatan, Tim Pendamping Keluarga (TPK), kader PKK, Posyandu antara lain mengenai kesehatan ibu dan anak termasuk pengasuhan dan nutrisi, imunisasi, dan 100 Hari Pertama Kehidupan (HPK), dan sebagainya. Selain itu, dengan berkembangnya digitalisasi saat ini turut mempengaruhi sumber informasi kesehatan untuk ibu. Ibu hamil memiliki akses yang beragam terhadap informasi kesehatan, baik melalui layanan kesehatan tradisional seperti Posyandu, maupun melalui platform digital. *Platform* digital yang sering diakses oleh ibu hamil dan ibu lain antara lain YouTube, grup WhatsApp, Google, dan Posyandu. Chawa et al. (2024) dan Tanjung et al. (2024) menambahkan bahwa mayoritas ibu-ibu mahir menggunakan gadget dan media sosial.

Chawa et al. (2024) kemudian menjelaskan bahwa orang tua semakin mudah memenuhi kebutuhan anak karena cukup memesan makanan melalui aplikasi. Orang tua semakin mudah memenuhi kebutuhan anak karena cukup memesan melalui aplikasi. Anak tidak lagi mengkonsumsi makanan kaya protein dengan rutin didukung oleh gaya pengasuhan orang tua yang permisif sehingga memperbolehkan anak makan sesuai kesukaan anak. Ibu menambahkan bahwa anaknya yang menyukai nasi goreng akan terus dibelikan setiap hari setiap malam dari penjual nasi goreng atau penjual yang melewati depan rumahnya yang mana kesemua hal dilakukan agar anak mau makan termasuk keluarga tidak lagi memikirkan untuk membelikan makanan tinggi nutrisi dan protein, suplemen zinc, serta vitamin dan mineral. Selain nasi goreng, anak menyukai mie instan dan bakso. Terkait pilihan makanan yang diberikan ibu kepada anak kader kesehatan menyatakan bahwa ibu lebih malas untuk memasak makanan bernutrisi untuk kebutuhan anak.

Chawa et al. (2024) melanjutkan bahwa semakin tinggi tingkat literasi media orang tua berpotensi meningkatkan partisipasi mereka dalam pencegahan stunting,

meskipun hubungannya sangat lemah. Hal ini terjadi karena orang tua tidak menggunakan media sosial secara langsung untuk mendapatkan informasi tentang stunting, tetapi untuk keperluan lain misalnya sebagai media hiburan dan mengakses informasi resep makanan bergizi untuk anak. 82.4% dari total responden dilaporkan tidak berpartisipasi dalam diseminasi informasi stunting sementara 15.8% respoden ikut serta. Mayoritas responden yang berasal dari tingkat sosio-ekonomi tinggi, menengah, dan bawah merasa bahwa diseminasi informasi stunting merupakan tanggung jawab otoritas seperti tenaga kesehatan dan kader Posyandu.

Digitalisasi menciptakan beban moral baru bagi perempuan yaitu ibu harus menjadi *digital mother* yang mampu menyaring, memahami, dan menerapkan informasi gizi dari ruang digital untuk mencegah stunting (Ratri, 2024) mengemukakan bahwa hal ini disebakan oleh negara dan tenaga kesehatan yang menjadikan media sosial sebagai alat untuk mensosisalisasikan kesehatan dan nutrisi anak termasuk stunting sehingga terciptalah citra baru mengenai ibu ideal yaitu ibu sebagai pengasuh yang subordinatif yang harus melek atau memiliki literasi informasi dan pengetahuan.

Temuan Gustiwati (2025) mengindikasikan bahwa banyak orang tua dan keluarga merasa harus mengikuti aturan pemerintah dan tenaga kesehatan tanpa sebenarnya memiliki pemahaman mendalam atau kemampuan untuk mengambil keputusan mengenai kesehatan anak. Tinggi anak pun tetap. Orang tua pada akhirnya hanya mengikuti hal-hal yang direkomendasikan tenaga kesehatan agar anaknya sehat.

3.5 Analisis Gender amd Power pada Perempuan dengan Anak Stunting

Penelitian ini menggunakan teori Gender and Power oleh R.W Connell untuk menganalisis relasi gender di keluarga dengan anak stunting yang menitikberatkan pada pengalaman perempuan atau ibu. Connell (Wingood & Diclemente, 2000a) menyatakan bahwa terdapat tiga struktur sosial yang mengkategorikan hubungan laki-laki dan perempuan yaitu pembagian kerja berdasarkan gender, pembagian kekuasaan berdasarkan gender, dan *cathexis* atau norma sosial dan ikatan emosional mengenai feminitas dan maskulinitas yang bekerja melalui mekanisme sosial. Ketiga struktur ini bekerja pada dua level yaitu level masyarakat dan level institusi. Teori Gender and Power beroperasi dalam kerangka paradigma tradisional yang ditandai berdasarkan dikotomi dominasi laki-laki dan kepatuhan perempuan. Peneliti akan memfokuskan pada level institusi karena konteks penelitian bersetting dalam ranah keluarga. Mekanisme sosial membatasi praktik keseharian perempuan dengan menciptakan ketidaksetaraan berbasis gender antara lain pada potensi ekonomi perempuan, kontrol ekonomi pada sumber daya, dan ekspektasi berbasis gender pada peran perempuan di masyarakat.

Pembagian kerja berdasarkan gender dalam penelitian ini ditujukkan dengan masyarakat Batu (Chawa et al., 2024a) dan masyarakat Labotan Kandi (Triratnawati & Yuniati, 2023a) masih memposisikan laki-laki pada ranah publik sedangkan perempuan pada ranah domestik. Laki-laki mayoritas bekerja pada sektor pertanian, perkebunan, ladang, dan kelautan. Perempuan memiliki berbagai tanggung jawab yaitu mencuci piring, mencuci baju, membersihkan kamar mandi, belanja, mengasuh anak, membeli berbagai kebutuhan untuk anak, serta memasak untuk suami, kakek, dan anak (Utami et al., 2024a). Selain pekerjaan domestik tersebut, perempuan memiliki posisi penting karena perempuan merupakan aktor sentral dalam upaya pemenuhan nutrisi anak, perempuan, dan keluarga. Anak adalah tanggung jawab perempuan. Perawatan anak termasuk pemilihan susu dan makanan anak dengan kondisi stunting. Pemposisian perempuan dan kaitannya dengan perawatan anak memposisikan perempuan sebagai subordinat. Suami atau laki-laki sangat sedikit dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga termasuk perawatan anak. Laki-laki beralasan bekerja mulai dari pagi hari sehingga ketika pulang lebih banyak beristirahat dan jarang atau tidak melakukan pekerjaan rumah dan merawat anak. Inilah norma yang ada dan diterima oleh masyarakat. Menurut Connell (Wingood & Diclemente, 2000a) perempuan yang berada di ranah domestik merupakan salah satu mekanisme pembagian kerja berdasarkan gender yaitu perempuan melakukan pekerjaan perawatan yang tidak dibayar. Perempuan terjebak dalam stereotip dan ekspektasi (Connell, n.d.).

Pengkategorisasian laki-laki melakukan pekerjaan di ranah publik dan perempuan berada di ranah domestik merupakan salah satu bentuk pembagian kekuasaan berdasarkan gender (Connell, n.d.). (Connell, n.d.) melanjutkan bahwa sebenarnya relasi gender yang dibangun ini memiliki relasi kuasa dan eksploitasi kepada perempuan. Perempuan menerima tanggung jawab pembagian kerja di ranah domestik yang diberikan kepada perempuan dengan lapang dada serta menerima segala keputusan suami bahkan ketika laki-laki merantau yang mana perempuan sendiri dalam memutuskan segala hal termasuk pilihan-pilihan dalam ranah domestik.

Kebergantungan perempuan kepada laki-laki disebabkan oleh faktor ekonomi sebagai faktor utama. Kondisi ekonomi keluarga merupakan faktor yang menentukan dalam pemenuhan nutrisi anak. Namun, tidak semua keluarga memiliki kondisi ekonomi yang memadai yang berdampak perempuan tidak memiliki kemampuan unuk mengambil keputusan terhadap nutrisi anak dan perempuan. Ketika perempuan memutuskan untuk bekerja yang juga merupakan upaya untuk mendapatkan kebebasan dalam belenggu ruang domestik, ternyata berkonsekuensi pada berkurangnya waktu untuk perawatan kesehatan anak sehingga anak cenderung beresiko stunting karena anak tidak mendapatkan nutrisi yang berkualitas saat perempuan bekerja (Chawa et al., 2024a; Tchakounté Tchuimi,

2023a; Triratnawati & Yuniati, 2023a) dan perempuan mengalami beban ganda (Triratnawati & Yuniati, 2023a; Wiliyanarti et al., 2025a). Ketika perempuan berada di ranah publik, perempuan tetap tidak memiliki *bargaining power* di keluarga.

Perempuan yang bekerja di ranah publik bisa memiliki otonomi atas pendapatannya sendiri sehingga bisa menggunakan pendapatannya untuk memenuhi nutrisi anak sehingga mengurangi resiko stunting anak. Namun, menurut Guerrero (Jurnal Perempuan, 2017) perempuan tidak bisa otonom karena tradisi yang mengekang perempuan dan jika perempuan menginginkan kebabasan maka akan ada konsekuensinya. Perempuan mengalami beban ganda dengan resiko anak stunting. Jika perempuan tidak bekerja dan tidak memiliki pendapatan sendiri maka perempuan akan sepenuhnya bergantung pada pendapatan suami dan tidak banyak perempuan yang bisa memutuskan alokasi pendapatan suami untuk kesehatan perempuan dan anak. Hal ini disebabkan peran gender laki-laki sebagai kepala keluarga yang mencari dan memberi nafkah sehingga segala kebutuhan ada di tangan suami. Akhirnya, perempuan terjebak dalam situasi yang paradoks. Tradisi membelenggu perempuan dan menjadikan perempuan bergantung pada laki-laki sehingga tidak berdaya dalam berbagai aspek kehidupan. Praktik budaya dan norma adat cenderung melanggengkan pembagian kerja bias gender. Praktik budaya dan norma adat yang sudah ada dari generasi ke generasi juga mengakibatkan resiko stunting karena orang tua atau perempuan tidak memahami pola makan dan nutrisi anak.

Selain itu, laki-laki memiliki otonomi yang besar dalam keluarga untuk mengatur hal-hal yang bisa dilakukan perempuan atau tidak sehingga perempuan tidak bisa bebas mengambil keputusan atas kesehatan, pembelian kebutuhan keluarga, dan pengunaan pendapatan suami untuk keperluan lainnya. Bahkan, perempuan tidak bisa mengunjungi teman dan saudara tanpa izin laki-laki dan harus meminta izin laki-laki ketika akan mengakses pelayanan kesehatan (Salman et al., 2023a). Ketika laki-laki mengambil keputusan, maka keputusan laki-laki dianggap keputusan yang strategis sedangkan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh perempuan hanya disebut sebagai keputusan keseharian. Ketika ingin mengubah perawatan atau pola makan pada anak, perempuan cenderung tidak didengarkan. R. W. Connell (1987) menjelaskan bahwa struktur kuasa seperti ini memproduksi *hegemonic masculinity* yaitu bentuk maskulinitas yang menempatkan laki-laki sebagai pengambil keputusan dan pemilik kontrol keluarga. Connell melihat ini sebagai pembagian kekuasaan berbasis gender. Triratnawati & Yuniati, (2023a) menambahkan bahwa kekuasan yang berpusat pada laki-laki diakibatkan oleh kekerabatan patrilineal berdampak pada status perempuan di Labotan Kandi. Perempuan pun tidak luput dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dapat meningkatkan risiko stunting pada anak (Mukong & Burns, 2021b). KDRT yang

dialami oleh perempuan menunjukkan dengan jelas terjadinya relasi kuasa gender yang sangat kentara dalam konteks Gender and Power.

Masyarakat menganggap perempuan dengan beban ganda, berada di ranah domestik dan ranah publik merupakan konsepsi istri ideal. Perkembangan digitalisasi menghadirkan perubahan dalam praktik perawatan dan pemenuhan kebutuhan keluarga sehari-hari. Digitalisasi tidak hanya memperkuat akses perempuan perempuan terhadap informasi kesehatan, perawatan, dan gizi anak tetapi membuka pula berbagai pilihan baru dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Beragam aplikasi pemesanan makanan, layanan belanja daring, dan *platform* digital lainnya memungkinkan keluarga memperoleh makanan dengan lebih mudah dan cepat. Dalam situasi ini, perempuan tidak hanya berperan sebagai pengelola konsumsi keluarga tetapi juga dituntuk untuk memastikan bahwa pilihan makanan yang diperoleh melalui ruang digital tetap mendukung kebutuhan gizi dan kesehatan anak. Dengan demikian, digitalisasi tidak menghilangkan tanggung jawab perawatan perempuan, melainkan mentransformasikan cara perempuan menjalankan tanggung jawab tersebut.

Kondisi tersebut melahirkan tuntutan baru terhadap perempuan sebagai ibu. Perempuan tidak hanya diharapkan mampu merawat anak secara langsung tetapi juga memiliki kemampuan untuk menyaring, memahami, dan menerapkan berbagai informasi kesehatan dan gizi yang tersedia di ruang digital. Dalam konteks pencegahan stunting, perempuan diposisikan sebagai aktor utama yang bertanggun jawab menerjemahkan informasi digital ke dalam praktik pengasuhan sehari-hari. Figur ini kemudian disebut *digital mother* (Ratri, 2024a). Inilah citra baru mengenai perempuan ideal yaitu perempuan yang tetap menjalankan fungsi perawatan secara subordinatif sekaligus memiliki literasi digital, informasi, dan pengetahuan yang memadai untuk mendukung kesehatan anak. Connell (dalam Wingood & Diclemente, 2000b) menganalisis berbagai kondisi tersebut sebagai mekanisme sosial membatasi praktik keseharian perempuan dengan menciptakan ketidaksetaraan berbasis gender pada potensi ekonomi perempuan, kontrol perempuan terhadap sumber daya, dan ekspektasi berbasis gender pada peran perempuan di masyarakat.

Perempuan saat ini mudah mendapatkan makanan untuk anak melalui pemesanan aplikasi digital (Chawa et al., 2024a). Kemudahan ini didorong atas pemenuhan keinginan makanan yang ingin dikonsumsi anak yang berdampak pada perempuan mengikuti keinginan anak karena khawatir anak tidak mau makan. Namun, hal ini berimplikasi perempuan tidak lagi memperhatikan nutrisi anak. Perempuan dihadapkan pada dua pilihan anak yang ingin makan apapun keinginan anak tetapi tidak memperhatikan nutrisi anak atau perempuan memilihkan makanan yang bergizi untuk anak tetapi anak tidak ingin memakan makanan

tersebut karena tidak suka. Hal ini berdampak pada resiko stunting pada anak karena anak tidak lagi makan makanan bernutrisi.

Struktur sosial ketiga adalah *cathexis* yang dimaknai sebagai struktur afeksi dan norma sosial, salah satunya melalui norma budaya dan peran gender. R.W Connell (dalam Wingood & Diclemente, 2000b) mengemukakan bahwa struktur norma sosial dan ikatan emosional mencerminkan pembagian kerja, ketidaksetaraan kekuasaan, dan mencerminkan pola norma sosial dan ikatan emosional sehingga semua struktur saling terkait. Salah satu bentuk afeksi perempuan dan kepatuhan atas norma sosial yaitu perempuan bahkan harus merelakan pekerjaan dan studi magister untuk merawat anak (Utami et al., 2024a). Selain itu, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa perempuan menerima dengan lapang dada pembagian kerja dan tanggung jawab pada ranah domestik yang diberikan kepada perempuan karena suami sudah berada di ranah publik sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga (Triratnawati & Yuniati, 2023a). R. W. Connell, (1987) menyebut fenomena ini sebagai subordinasi yang terinternalisasikan yaitu kondisi ketika perempuan menerima nilai-nilai patriarkal dan merasa bertanggung jawab atas kewajiban yang dilakukan yang sebenarnya dipengaruhi struktur sosial.

Connell (n.d.) menjelaskan bahwa pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan baik di ranah publik dan ranah domestik dilakukan dengan rapi oleh struktur budaya patriarki melalui reduksi biologis. Kategorisasi digeneralisir melalui norma dalam keluarga melalui pembagian kerja. Hal akan dianggap alami adalah ketika semakin banyak anggota masyarakat yang menjalankannya. Struktur sosial dikonstruksi dan diinternalisasikan sehingga perempuan menjadi feminin dan perempuan menerima peran gender perempuan yang di dalamnya terdapat relasi kuasa dan yang dikuatkan dengan perasaan emosional perempuan untuk menjaga keluarga termasuk anak. Internalisasi ini dilakukan oleh agen sosialisasi seperti keluarga di rumah dan guru di sekolah (Connell, n.d.).

Analisis terhadap ketiga struktur teori Connell (1987) menghasilkan kesimpulan bahwa intervensi stunting tidak akan efektif selama bersifat ibu-sentris. Program yang hanya mendidik dan membekali ibu seperti kelas ibu hamil, penyuluhan gizi Posyandu, Tim Pendamping Keluarga secara tidak sengaja mengkonfirmasi bahwa perawatan anak memang tugas ibu dan ketika anak tetap stunting maka ibulah yang dipersalahkan. Gustiawati et al. (2025) dan Utami et al. (2024b) menunjukkan bahwa perempuan sudah ditempatkan sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas stunting sekaligus tidak berdaya mengubah kondisi struktural yang menyebabkannya. Setidaknya empat arah intervensi sensitif gender perlu dipertimbangkan. *Pertama* pelibatan aktif laki-laki dalam kerja pengasuhan harian, bukan sekedar mengantarkan istri pergi ke dokter tetapi antara lain mempersiapkan makanan anak, memantau pertumbuhan, dan mengambil alih kerja

perawatan ketika ibu bekerja. Mukong & Burns (2021a) membuktikan bahwa kerja sama pengambilan keputusan suami-istri mengurangi resiko stunting sebesar 9% dan kerja sama keputusan pembelian mengurangi sebesar 4%. *Kedua* edukasi keluarga besar sebagai agen *cathexis* yaitu nenek, mertua, dan tokoh adat perlu menjadi sasaran program intervensi yang setara dengan ibu (Wiliyanarti et al., 2025b; Triratnawati & Yuniati, 2023b). *Ketiga* reposisi kader kesehatan sebagai mediator gender yang memahami dinamika gender dalam keluarga bukan hanya sekedar penyuluh gizi teknis. *Keempat* redesain kebijakan stunting agar perempuan bukan hanya sasaran intervensi melainkan subyek berdaya dengan otonomi penuh dalam pengambilan keputusan kesehatan anak dan keluarganya termasuk tinjauan kritis terhadap konstruksi *digital mother* yang menambah beban normatif perempuan tanpa mengubah relasi gender dalam keluarga (Ratri, 2024a).

4. Kesimpulan, Limitasi, dan Saran

4.1 Kesimpulan

Kajian ini menyimpulkan bahwa pengalaman perempuan dalam isu stunting membentuk pola relasi gender yang tidak setara melalui tiga struktur utama dalam teori Gender and Power Connell yaitu pembagian kerja berdasarkan gender, pembagian kekuasaan berdasarkan gender, dan *cathexis*. Berdasarkan sintesis terhadap 17 artikel yang diseleksi melalui protokol PRISMA, ditemukan bahwa perempuan menanggung beban domestik dan perawatan secara dominan, sementara laki-laki memegang kuasa dalam pengambilan keputusan penting terkait kesehatan dan penggunaan sumber daya keluarga. Minimnya otonomi perempuan berimplikasi langsung pada keterlambatan penanganan gizi dan rendahnya akses layanan kesehatan sehingga meningkatkan resiko stunting pada anak. Konteks emosional perempuan dan norma budaya turut melanggengkan relasi gender laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Dengan demikian, stunting tidak hanya merupakan persoalan gizi atau kesehatan semata, tetapi juga merupakan gejala dari ketimpangan relasi gender yang terstruktur dan terlembagakan.

Teori Gender and Power Connell (1987) menjadi kerangka analisis untuk membaca isu stunting yaitu pembagian kerja, kekuasaan, dan *cathexis* yang bekerja secara simultan dan saling memperkuat dalam membentuk kondisi yang menempatkan perempuan sebagai penangung jawab tunggal atas gizi dan kesehatan anak. Pembagian kerja berbasis gender membebankan seluruh kerja perawatan yang tidak dibayar kepada perempuan. Pembagian kekuasaan berbasis gender melalui mekanisme *hegemonic masculinity* membatasi otonomi perempuan dalam keputusan finansial, kesehatan,, dan mobilitas. *Cathexis* mengukuhkan kondisi melalui norma afektif yang membuat perempuan menerima beban sebagai kodrat. Dengan menggunakan ketiga lensa secara terintegrasi, kajian ini menunjukkan bahwa stunting bukan akibat kegagalan individual ibu melainkan akibat mekanisme struktural yang secara sistematis menghalangi

perempuan dari sumber daya, otonomi, dan dukungan yang dibutuhkan untuk memastikan gizi optimal anak.

Kontribusi utama artikel ini terhadap kajian sosial tentang stunting yaitu *pertama* kajian ini menunjukkan bahwa SLR berbasis analisis gender mampu menghasilkan sintesis lintas konteks yang lebih komprehensif dibandingkan studi tunggal. Pola yang ditemukan dalam lintas literatur menunjukkan bahwa ketimpangan gender dalam narasi stunting bersifat sistemik dan lintas budaya. *Kedua* kajian ini mengidentifikasi kontradiksi yaitu individu berpendidikan tinggi pun masih memiliki anak stunting (Chawa et al. (2024b) yang dapat dijelaskan dalam lensa *cathexis* berupa pola pengasuhan permisif di era digital yang melampaui kapasitas pendidikan formal. *Ketiga* kajian ini memperlihatkan pentingnya *reframing* narasi stunting yang selama ini cenderung memepersalahkan ibu bahwa masalah utama bukan perempuan yang bekerja atau tidak mampu mengasuh, melainkan tidak adanya redistribusi kerja pengasuhan, lemahnya dukungan keluarga, dan struktur patriarki yang tetap membebankan perawatan anak kepada perempuan. Kontribusi ini relevan bagi pengembangan kajian gender dan kesehatan di Indonesia yang masih didominasi pendekatan biomedis dan sosio-demografis.

4.2 Limitasi Penelitian

Sebagai kajian berbasis Systematic Literature Review (SLR), penelitian ini memiliki sejumlah limitasi atau keterbatasan. *Pertama* keterbatasan cakupan database yaitu pencarian literatur pada tiga database utama yaitu Taylor and Francis, Google Scholar, dan Garuda. Peneliti selanjutnya dapat memperkaya studi pada database lain seperti Scopus, PubMed, atau JSTOR.

Kedua keterbatasan konteks geografis yaitu mayoritas artikel yang dianalisis berasal dari masyarakat pedesaan di Indonesia dan beberapa negara Afrika Sub-Sahara seperti Nigeria, Kamerun, Tanzania, dan Ethiopia. Generalisasi temuan ke konteks perkotaan atau ke wilayah Indonesia yang memiliki karakteristik kekerabatan berbeda seperti misalnya masyarakat matrilineal seperti Minangkabau. *Ketiga* keterbatasan perspektif yaitu seluruh artikel yang dianalisis menempatkan perempuan atau ibu sebagai subyek utama penelitian. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan perspektif suami atau anggota keluarga lainnya dalam konteks stunting dengan tetap menempatkan ibu sebagai subyek utama penelitian.

4.3 Saran

Intervensi stunting perlu bersifat sensitif gender dengan melibatkan laki-laki dalam kerja perawatan anak dan peningkatan otonomi perempuan dalam pengambilan keputusan kesehatan keluarga. Intervensi berbasis keluarga dan komunitas harus diarahkan untuk mengurangi pengaruh budaya patriarkal yang membatasi peran

perempuan, sekaligus memperluas ruang perempuan dalam pengambilan keputusan kesehatan dalam keluarga. Hal ini bisa dilakukan melalui meminamalisir stereotip perempuan dan mendefinisikan kembali relasi gender dalam keluarga.

Secara lebih operasional, saran penelitian ini mencakup lima arah tindakan. *Pertama* pelibatan aktif ayah dalam kelas *parenting* dan kegiatan posyandu yang mana program parenting perlu dirancang untuk ayah dan ibu sehingga tanggung jawab pengasuhan terdistribusi secara adil dalam keluarga. Laki-laki perlu terlibat antara lain dalam mempersiapkan makanan bergizi anak, pemantauan pertumbuhan, dan kunjungan fasilitas kesehatan secara rutin bukan hanya mengantar istri melahirkan.

Kedua edukasi keluarga besar mengenai gizi anak seperti nenek, mertua, dan anggota keluarga besar perlu menjadi sasaran program edukasi gizi yang setara dengan ibu karena anggota keluarga adalah agen *cathexis* yang menentukan praktik perawatan di berbagai masyarakat.

Ketiga penguatan otonomi ibu dalam pengambilan keputusan kesehatan perlu memastikan bahwa perempuan memiliki ruang untuk membuat keputusan mandiri terkait gizi dan kesehatan anak termasuk hak untuk mengakses layanan kesehatan tanpa harus menunggu izin atau kehadiran suami. Perempuan tidak boleh hanya diposisikan sebagai pelaksana instruksi medis melainkan agen yang berdaya dan memiliki otonomi substansif dalam pengambilan keputusan kesehatan keluarga.

Keempat desain program stunting yang tidak hanya membebani ibu. Program pemerintah seperti kelas ibu hamil, Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan kebijakan Perpres no. 72/2021 perlu ditinjau ulang agar tidak bersifat ibu-sentris. Program intervensi perlu mendistribusikan tanggung jawab secara adil kepada seluruh anggota keluarga dan masyarakat sehingga tidak menciptakan kondisi ibu dipersalahkan ketika anak tetap stunting walaupun sudah menanggung seluruh beban pengasuhan sendirian.

Kelima pelatihan kader agar kader memahami isu gender dalam pendampingan keluarga beresiko stunting. Kader Posyandu dan TPK perlu dibekali pemahaman tentang dinamika gender dalam keluarga termasuk pembagian kerja yang tidak setara, keterbatasan otonomi ibu, dan norma *cathexis* yang melangenggkan praktik perawatan. Dengan pemahaman gender yang memadai, kader dapat melakukan pendampingan yang lebih kontekstual yaitu mendorong keterlibatan suami dan keluarga besar, membantu ibu menegosiasikan otonomi dalam pengambilan keputusan, dan mengidentifikasi hambatan stuktural yang mencegah keberhasilan intervensi gizi pada keluarga beresiko.

Untuk agenda penelitian lanjutan, terdapat tiga arah yang perlu ditindaklanjuti yaitu studi kualitatif yang mengeksplorasi pengalaman dan perspektif suami serta anggota besar dalam penanganan stunting. *Kedua* diperlukan kajian komparatif lintas

konteks budaya di Indonesia pada sistem kekerabatan patrilinieal dan komunitas yang lebih egaliter untuk memahami proses *cathexis* lokal mempengaruhi resiko stunting. *Ketiga* diperlukan evalusi terhadap program intervensi stunting yang sudah berjalan untuk mengukur sejauh mana program stunting yang sduah berjalan mengukur program berhasil mengubah pembagian kerja perawatan keluarga.

Daftar Pustaka

Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementrian Kesehatan. (2025). *SSGI 2024: Prevalensi Stunting Nasional Turun Menjadi 19,8%*.

BBC News Indonesia. (2024). *Mengapa gizi buruk masih menghantui Asmat? - Cerita dari kampung terpencil di pedalaman Papua Selatan*. https://www.bbc.com/indonesia/articles/ck7gpj440y3o

Chawa, A. F., Fitriana, T., & Ambarsari, Z. A. (2024a). the Relationship Between Socio-Economic and Media Literacy Levels With the Level of Parent Participation in Preventing Stunting in Rural Areas. *Sosiohumaniora*, *26*(2), 315–329. https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v26i2.54212

Chawa, A. F., Fitriana, T., & Ambarsari, Z. A. (2024b). THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIO-ECONOMIC AND MEDIA LITERACY LEVELS WITH THE LEVEL OF PARENT PARTICIPATION IN PREVENTING STUNTING IN RURAL AREAS. *Sosiohumaniora*, *26*(2), 315–329. https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v26i2.54212

Connell. (n.d.). *Connell_Theorising Gender.pdf*.

Connell, R. W. (1987). *Gender and Power*. Standford University Press.

Derso, D., Tolossa, D., & Seyoum, A. (2024). Does crop diversification determine household nutrition security? Empirical evidence based on mixed methods research approach. *Cogent Food and Agriculture*, *10*(1). https://doi.org/10.1080/23311932.2024.2417835

Devi Arine Kusumawardani, Sofia Al Farizi, I. L. (2022). *PERAN DAN KAPABILITAS IBU DALAM MENCEGAH STUNTING PADA ANAK DI KABUPATEN JEMBER*. *14*.

Gulo, Y. T. M., & Suryadi, B. (2023). Formulasi Model Pemberdayaan Perempuan dalam Mendukung Kebijakan Pencegahan Stunting Berbasis Responsif Gender di Kabupaten Banjar. *…: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, *11*(2), 148–156.

Gustiawati, L., Abdullah, S., & Muhammad, R. (2025). Power Relations In The Practice Of Handling Stunting In The City Of Makassar. In *Cuest.fisioter.2025* (Vol. 54, Number 3).

Gustiwati. (2025). *Power Relations In The Practice Of Handling Stunting In The City Of Makassar Doktoral Student of Sociology Departement , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Hasanuddin University , gustialeni2@gmail.com (*) Profesor of Sociology Departement , Fakultas*. *1*(3), 3633–3642.

Jurnal Perempuan. (2017). *Gadis Arivia: Mungkinkan Laki-Laki Bisa Menjadi Feminis?* https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/gadis-arivia-mungkinkah-laki-laki-bisa-menjadi-feminis?locale=en

Kementrian Kesehatan. (n.d.). *Stunting*. Retrieved https://ayosehat.kemkes.go.id/topik-non-penyakit/defisiensi-nutrisi/stunting

Kementrian Kesehatan. (2025). *Mengenal Stunting*. https://keslan.kemkes.go.id/view_artikel/3959/mengenal-stunting

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Profil kesehatan indonesia*.

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. (2025). *SSGI 2024 Survei Status Gizi Indonesia dalam Angka*.

Minarso, C., Suprapto, A., & Brawijaya, P. U. (2021). *management : systematic literature review*. *42*(1), 1–17. https://doi.org/10.14203/j.baca.v42i1.711

Mukong, A. K., & Burns, J. (2021a). Parental bargaining and rural–urban child health differential in Tanzania. *Development Southern Africa*, *38*(6), 938–953. https://doi.org/10.1080/0376835X.2021.1874876

Mukong, A. K., & Burns, J. (2021b). Parental bargaining and rural–urban child health differential in Tanzania. *Development Southern Africa*, *38*(6), 938–953. https://doi.org/10.1080/0376835X.2021.1874876

Obayelu, O. A., & Adeleye, O. R. (2021). Explaining Child Nutritional Status in Rural Nigeria: Socioeconomic Dimensions. *Journal of Hunger and Environmental Nutrition*, *16*(6), 829–846. https://doi.org/10.1080/19320248.2020.1781011

Palan Peten, Y. Y., Dionisius Lamawuran, Y., Adrianus, P., & Ratumakin, K. L. (2023). PENANGANAN STUNTING DALAM BUDAYA PATRIARKI: ANALISIS GENDER PROGRAM GEROBAK CINTA DI KABUPATEN FLORES TIMUR. *Jurnal Trias Politika*, *7*(2), 262–281.

Pamungkas, C. E., WD, S. M., & Nurbaety, B. (2021). Hamil usia muda dan stunting pada balita usia 12-59 bulan di Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Kebidanan*, *10*(2), 141. https://doi.org/10.26714/jk.10.2.2021.141-148

Peten, Y. Y. P., Lamawuran, Y. D., & L, P. A. K. (2023). *PENANGANAN STUNTING DALAM BUDAYA PATRIARKI : ANALISIS GENDER PROGRAM GEROBAK CINTA DI KABUPATEN FLORES TIMUR PENDAHULUAN Stunting didefinisikan WHO sebagai gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang , yan*. *7*(2), 262–281.

R. W. Connell. (1987). *Gender and Power: Society, the Person, and Sexual Politics*.

Ratri, S. D. (2024a). Digital Echoes: The Influence of Internet and Social Media on the “Ideal” Conception of Motherhood in Indonesian Stunting Programs. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, *29*(1). https://doi.org/10.7454/mjs.v29i1.13569

Ratri, S. D. (2024b). Digital Echoes: The Influence of Internet and Social Media on the “Ideal” Conception of Motherhood in Indonesian Stunting Programs. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, *29*(1). https://doi.org/10.7454/mjs.v29i1.13569

Salman, K. K., Salawu, M. B., Oni, O. A., & Obi-Egbedi, O. (2023a). Does Maternal Autonomy Influence Child Nutrition in Rural Nigeria? *Journal of Hunger and Environmental Nutrition*, *18*(4), 580–599. https://doi.org/10.1080/19320248.2020.1823926

Salman, K. K., Salawu, M. B., Oni, O. A., & Obi-Egbedi, O. (2023b). Does Maternal Autonomy Influence Child Nutrition in Rural Nigeria? *Journal of Hunger and Environmental Nutrition*, *18*(4), 580–599. https://doi.org/10.1080/19320248.2020.1823926

Tanjung, Y., Khairani, L., Sahputra, S., & Ali, K. (2025). *Yurisna Tanjung Document Details*.

Tanjung, Y., Khairani, L., Sahputra, S., Ali, K., Penelitian, H., Tanjung, Y., Khairani, L., Sahputra, S., & Ali, K. (2024). *(ANALYSIS OF GENDER RELATIONS IN BEST PRACTICE FOR ACCELERATING STUNTING REDUCTION IN LABUHANBATU UTARA REGENCY)*. 91–103.

Tchakounté Tchuimi, D. (2023a). Does maternal empowerment influence childhood stunting and wasting in Cameroon? A cross-sectional study. *Vulnerable Children and Youth Studies*, *18*(2), 263–281. https://doi.org/10.1080/17450128.2022.2141405

Tchakounté Tchuimi, D. (2023b). Does maternal empowerment influence childhood stunting and wasting in Cameroon? A cross-sectional study. *Vulnerable Children and Youth Studies*, *18*(2), 263–281. https://doi.org/10.1080/17450128.2022.2141405

Tri, Y., Gulo, M., & Suryadi, B. (2023). Formulasi Model Pemberdayaan Perempuan dalam Mendukung Kebijakan Pencegahan Stunting Berbasis Responsif Gender di

Kabupaten Banjar. *PUBLIKAUMA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA*, *11*(2), 148–156. https://doi.org/10.31289/publika.v11i2.10637

Triratnawati, A., & Yuniati, E. (2023a). Belenggu Adat Memutus Stunting: Studi Kasus di Desa Labotan Kandi. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *12*(2), 236–247. https://doi.org/10.23887/jish.v12i2.60536

Triratnawati, A., & Yuniati, E. (2023b). Belenggu Adat Memutus Stunting: Studi Kasus di Desa Labotan Kandi. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *12*(2), 236–247. https://doi.org/10.23887/jish.v12i2.60536

Utami, M., Susanti, E., & . S. (2024a). The Domestication of Women in Stunting Mitigation Programs in Sidoarjo Regency. *Journal of Urban Sociology*, *1*(2), 83. https://doi.org/10.30742/jus.v1i2.3813

Utami, M., Susanti, E., & . S. (2024b). The Domestication of Women in Stunting Mitigation Programs in Sidoarjo Regency. *Journal of Urban Sociology*, *1*(2), 83. https://doi.org/10.30742/jus.v1i2.3813

Wiliyanarti, P. F., Choliq, I., Hasanah, U., & Lin, S. Y. (2025a). Mother's Experiences in Caring for Children with Stunting in Rural Indonesia. *Journal of Transcultural Nursing*, *36*(2), 161–167. https://doi.org/10.1177/10436596241274264

Wiliyanarti, P. F., Choliq, I., Hasanah, U., & Lin, S. Y. (2025b). Mother's Experiences in Caring for Children with Stunting in Rural Indonesia. *Journal of Transcultural Nursing*, *36*(2), 161–167. https://doi.org/10.1177/10436596241274264

Wingood, G. M., & Diclemente, R. J. (2000a). Application of the Theory of Gender and Power to Examine HIV-Related Exposures, Risk Factors, and Effective Interventions for Women. *Health Education & Behavior*, *27*(5), 539–565. https://doi.org/10.1177/109019810002700502

Wingood, G. M., & Diclemente, R. J. (2000b). Wingood, DiClemente / Theory of Gender and Power and HIV Perspective Application of the Theory of Gender and Power to Examine HIV-Related Exposures, Risk Factors, and Effective Interventions for Women. In *Health Education & Behavior*.

World Health Organization. (2015). *Stunting in a nutshell*. https://www.who.int/news/item/19-11-2015-stunting-in-a-nutshell

World Health Organization. (2024a). *Join child malnutrition estimates*. https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/joint-child-malnutrition-estimates-unicef-who-wb

World Health Organization. (2024b). *Malnutrition*. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malnutrition/

ARSITEKTUR FEMINIS, RUANG GENDER, DAN PENGALAMAN PEREMPUAN: *SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW*

[1]Andini Puspita Sucahyawati
Universitas Brawijaya
andinipuspitaa1@student.ub.ac.id
[2]Susilo Kusdiwanggo
Universitas Brawijaya
kusdiwanggo@ub.ac.id
[3]Ema Yunita Titisari
Universitas Brawijaya
ema_yunita@ub.ac.id

Keywords:
Feminist Architecture; Gendered Space; Women's Experience; Domestic Space; Vernacular Architecture; Spatial Justice;

Arsitektur Feminis; Ruang Gender; Pengalaman Perempuan; Ruang Domestik; Arsitektur Vernakular; Keadilan Spasial

Abstract
Gender inequality in spatial experience remains a critical issue in architecture and the built environment. It is reflected in women's limited access to public space, masculine bias in modern and contemporary architectural representation, and spatial segregation in cultural and domestic settings. This study examines the development of feminist architectural theory and the concept of gendered space in explaining the relationship between architecture, space, and gender. It also explores how women's experiences in domestic, vernacular, monumental, and contemporary urban spaces are represented and negotiated. This study employed a Systematic Literature Review (SLR) using the Scopus database. The search and selection process was guided by PICOC, inclusion and exclusion criteria, and thematic analysis. From 126 initially identified articles, 13 articles published between 2015 and 2025 were selected for final analysis. The findings show that feminist architectural theory has shifted from a critique of modernist and patriarchal bias toward an inclusive spatial framework that emphasizes spatial justice, safety, mobility, and equal access. Women's spatial experiences are ambivalent. Domestic space can reproduce subordination but also support identity negotiation and agency. Vernacular architecture may provide women with authority through matrilocal traditions, inheritance, and symbolic control of core spaces. In contrast, monumental and modernist architecture often renders women invisible or reduces them to symbolic bodies, although feminist design strategies and spatial adaptation can challenge this condition. The study identifies gaps in intersectional analysis,

Southeast Asian case studies, and contemporary spaces such as digital, informal, and flexible workspaces. Feminist architecture is therefore not only a critical lens but also a conceptual framework for creating more inclusive, safe, and equitable spaces for all genders.

Abstrak

Ketimpangan gender dalam pengalaman ruang masih menjadi isu penting dalam arsitektur dan lingkungan binaan. Ketimpangan ini tercermin dalam keterbatasan akses perempuan terhadap ruang publik, bias maskulin dalam representasi arsitektur modern dan kontemporer, serta segregasi spasial dalam ruang budaya dan domestik. Penelitian ini mengkaji perkembangan teori arsitektur feminis dan konsep ruang gender dalam menjelaskan relasi antara arsitektur, ruang, dan gender. Penelitian ini juga mengeksplorasi bagaimana pengalaman perempuan dalam ruang domestik, vernakular, monumental, dan perkotaan kontemporer direpresentasikan dan dinegosiasikan. Metode yang digunakan adalah *Systematic Literature Review* (SLR) berbasis data Scopus. Proses pencarian dan seleksi artikel dipandu oleh PICOC, kriteria inklusi dan eksklusi, serta analisis tematik. Dari 126 artikel yang teridentifikasi pada tahap awal, 13 artikel terbitan 2015-2025 dipilih sebagai *corpus* akhir untuk dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori arsitektur feminis berkembang dari kritik terhadap bias modernisme dan patriarki menuju kerangka ruang inklusif yang menekankan keadilan spasial, keamanan, mobilitas, dan akses setara. Pengalaman ruang perempuan bersifat ambivalen. Ruang domestik dapat mereproduksi subordinasi, tetapi juga mendukung negosiasi identitas dan agensi. Arsitektur vernakular dapat memberi perempuan otoritas melalui tradisi matrilokal, pewarisan, dan penguasaan simbolik atas ruang inti. Sebaliknya, arsitektur monumental dan modernis sering membuat perempuan tidak terlihat atau mereduksinya sebagai tubuh simbolik, meskipun strategi desain feminis dan adaptasi spasial dapat menantang kondisi tersebut. Penelitian ini mengidentifikasi celah kajian pada analisis interseksional, studi Asia Tenggara, serta ruang kontemporer seperti ruang digital, informal, dan kerja fleksibel. Dengan demikian, arsitektur feminis tidak hanya menjadi lensa kritik, tetapi juga kerangka konseptual untuk menciptakan ruang yang lebih inklusif, aman, dan setara bagi semua gender.

BRAWIJAYA JOURNAL of SOCIAL SCIENCE

Vol. 5, No. 2, 2026

DOI: https://doi.org.10.21776/ub.bjss.2026.005.02.3

Submitted: 2025-10-09
Accepted: 2026-05-06

1. Pendahuluan

Ketimpangan gender dalam pengalaman ruang masih menjadi permasalahan global yang berlangsung dalam berbagai skala dan konteks. Laporan UN Women (2023) menunjukkan bahwa belum ada indikator SDG 5 yang sepenuhnya tercapai, sementara 99% perempuan dan anak perempuan masih hidup di negara dengan tingkat ketimpangan gender yang tinggi. Di Indonesia, ketidaksetaraan ini tampak dalam representasi politik dan akses terhadap ruang publik. Keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan masih berada di bawah 30%, sedangkan lebih dari 40% perempuan perkotaan pernah mengalami pelecehan di ruang publik, terutama di transportasi umum dan ruang kota yang minim penerangan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa ketimpangan gender tidak hanya berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik, tetapi juga dengan cara ruang dirancang, diakses, digunakan, dan dialami.

Dalam arsitektur dan lingkungan binaan, ketimpangan tersebut tampak melalui pembagian ruang, simbolisasi tubuh, aksesibilitas, dan kontrol atas mobilitas. Arsitektur tidak dapat dipahami sebagai objek fisik yang netral karena ruang selalu dibentuk oleh nilai sosial, budaya, politik, dan relasi kuasa. Dalam bangunan monumental modern, bias maskulin kerap direproduksi melalui simbolisasi tubuh perempuan sebagai ornamen, metafora, atau objek representasi, sementara pengalaman spasial perempuan sebagai pengguna ruang sering diabaikan. Pada konteks lain, bangunan budaya seperti keraton masih mempertahankan segregasi spasial yang menempatkan tubuh perempuan dalam hierarki simbolik dan material yang membatasi (Aryanti, 2017; Spain, 1993). Pola ini menunjukkan bahwa ruang kota modern, ruang budaya tradisional, dan arsitektur monumental sama-sama dapat memproduksi posisi subordinat perempuan apabila pengalaman *embodied* mereka tidak dipertimbangkan dalam proses pembacaan, perancangan, dan penggunaan ruang.

Kajian arsitektur feminis menawarkan kerangka penting untuk membaca relasi antara arsitektur, ruang, dan gender. Pendekatan ini menempatkan ruang sebagai medium sosial-politik yang tidak hanya merepresentasikan relasi kuasa, tetapi juga membentuk perilaku, mobilitas, rasa aman, dan pengalaman tubuh penggunanya (Beebeejaun, 2017; Limaki, 2024). Dalam perspektif ini, rumah, ruang publik, bangunan budaya, dan kota tidak hanya dipahami sebagai wadah aktivitas, tetapi sebagai medan tempat norma gender diproduksi, dinegosiasikan, dan dapat dilawan. Arsitektur feminis merupakan pendekatan yang menantang stereotip gender dan berupaya menciptakan ruang yang lebih inklusif serta memberdayakan bagi semua gender (Limaki, 2024; Xu et al., 2024). Pendekatan ini menggabungkan feminisme dan arsitektur untuk membaca ruang melalui perspektif gender. Karena itu, pembacaan terhadap pengalaman perempuan dalam ruang arsitektural perlu mempertimbangkan bagaimana struktur

spasial bekerja dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui pembatasan akses maupun melalui peluang negosiasi dan agensi.

Penelitian ini menggunakan empat kategori ruang sebagai kerangka analisis tematik, yaitu ruang domestik, ruang vernakular, ruang monumental, dan ruang perkotaan kontemporer. Ruang domestik merujuk pada ruang privat dan semi-privat yang berkaitan dengan rumah, praktik rumah tangga, kerja perawatan, reproduksi sosial, privasi, keamanan, serta relasi kuasa keluarga. Kategori ini tidak hanya memahami rumah sebagai bangunan fisik, tetapi juga sebagai ruang yang dibentuk oleh praktik domestisitas, okupansi, rutinitas, pengalaman tubuh, dan relasi gender dalam kehidupan sehari-hari (Chee, 2024). Ruang vernakular merujuk pada lingkungan binaan yang berakar pada tradisi lokal, material setempat, sistem kekerabatan, kosmologi, pengetahuan masyarakat, dan praktik budaya sehari-hari. Kategori ini mencakup rumah tradisional dan bentuk arsitektur lokal yang dibangun, diwariskan, atau dimaknai melalui praktik masyarakat, sebagaimana arsitektur vernakular dipahami sebagai bagian dari pengetahuan lokal dan budaya membangun yang tumbuh dari kebutuhan, kebiasaan, dan konteks masyarakat (Vellinga, 2024). Ruang monumental merujuk pada bangunan atau struktur yang memiliki skala simbolik dan merepresentasikan otoritas budaya, politik, agama, nasional, atau identitas kolektif. Kategori ini mencakup istana, keraton, bangunan ikonik, bangunan negara, dan arsitektur modern monumental yang memproduksi makna sosial melalui simbol, visibilitas, skala, dan tata ruang, terutama karena arsitektur dapat menjadi medium material bagi kekuasaan, imperium, negara, dan pembentukan identitas kolektif (Pieris, 2024). Sementara itu, ruang perkotaan kontemporer merujuk pada ruang kota modern yang meliputi ruang publik, ruang luar, infrastruktur mobilitas, transportasi, kawasan komersial, dan lingkungan urban yang memengaruhi akses, keamanan, mobilitas, serta partisipasi perempuan. Kategori ini digunakan untuk membaca kota sebagai jaringan ruang, infrastruktur, dan relasi sosial-ekologis yang terus berubah dalam praktik arsitektur dan urbanisme kontemporer (Picon, 2024).

Keempat kategori tersebut tidak dimaksudkan sebagai klasifikasi tipologi yang tertutup. Beberapa kategori dapat saling tumpang tindih, misalnya rumah vernakular yang sekaligus merupakan ruang domestik. Namun, pembagian ini diperlukan untuk memperjelas fokus analisis karena setiap kategori menunjukkan mekanisme relasi gender yang berbeda. Ruang domestik menonjolkan kerja reproduktif dan relasi keluarga; ruang vernakular menonjolkan tradisi, pewarisan, dan kosmologi lokal; ruang monumental menonjolkan simbolisme, visibilitas, dan otoritas; sedangkan ruang perkotaan kontemporer menonjolkan mobilitas, keamanan, akses, dan partisipasi publik. Dengan kerangka ini, penelitian dapat membaca pengalaman perempuan secara lebih terarah tanpa menyederhanakan keragaman konteks arsitektural yang dikaji.

Penelitian ini berupaya meninjau ulang bagaimana arsitektur feminis dan konsep ruang gender digunakan untuk memahami relasi antara arsitektur, ruang, dan gender. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana pengalaman perempuan dalam ruang domestik maupun publik direpresentasikan dan dinegosiasikan dalam kajian

arsitektur dan ruang dengan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR), penelitian ini mengkaji perkembangan teori arsitektur feminis, representasi perempuan dalam ruang domestik, vernakular, monumental, dan perkotaan kontemporer, serta strategi negosiasi perempuan dalam menghadapi struktur spasial yang patriarkal. Penelitian ruang gender *(gendered spaces)* dan arsitektur feminis saat ini telah berkembang. Namun, sebagian besar penelitian terdahulu berfokus secara terfragmentasi pada satu tipologi ruang atau satu lokus geografis. Banyak penelitian yang memusatkan perhatian pada ranah domestik atau isu keamanan dan mobilitas perempuan di ruang publik secara terpisah. Upaya untuk memetakan, mengintegrasi, dan menyintesis temuan-temuan empiris secara lintas skala (domestik hingga perkotaan) masih terbatas.

Penelitian ini menggunakan pemikiran feminis kolektif dalam "*Making Space: Women and the Man-Made Environment*" sebagai landasan konseptual dan dikontekstualisasikan melalui gagasan equitable environment dari Limaki (2024). Matrix (1984) memandang lingkungan binaan sebagai *man-made environment* yang merefleksikan relasi sosial dan distribusi kuasa dalam masyarakat. Dalam kerangka tersebut, ruang dipahami sebagai medium yang dapat mereproduksi subordinasi perempuan melalui pemisahan ruang publik-privat, pengaturan domestisitas, serta hierarki simbolik dalam lingkungan binaan (Boys, 1984; Darke, 1984). Sementara itu, pendekatan inklusivitas spasial dari Limaki (2024) dioperasikan untuk menelaah bagaimana bias maskulin dan eksklusi tersebut direproduksi atau dinegosiasikan. Berdasarkan latar belakang dan perspektif teoretis tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan penelitian *(research question/RQ)*, yakni:

- *RQ* 1: Bagaimana perkembangan teori arsitektur feminis dan konsep ruang gender digunakan untuk memahami relasi antara arsitektur, ruang, dan gender?
- *RQ* 2: Bagaimana pengalaman perempuan dalam ruang domestik maupun publik direpresentasikan dan dinegosiasikan dalam kajian arsitektur dan ruang?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) untuk meninjau penelitian terdahulu yang membahas perspektif feminis, ruang gender, dan pengalaman perempuan dalam ruang arsitektural. Metode ini dipilih karena SLR memungkinkan proses identifikasi, seleksi, evaluasi, dan sintesis literatur dilakukan secara sistematis, transparan, dan dapat ditelusuri. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya merangkum artikel yang relevan, tetapi juga memetakan pola konseptual, kecenderungan metodologis, tipologi ruang yang dikaji, serta kesenjangan penelitian dalam kajian arsitektur feminis dan ruang gender.

Proses SLR dilakukan melalui empat tahap utama. Pertama, penelitian merumuskan fokus kajian dan pertanyaan penelitian berdasarkan kerangka PICOC. Kedua, artikel dicari melalui basis data Scopus dengan string kata kunci yang disusun dari komponen PICOC. Ketiga, artikel diseleksi menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi. Keempat, artikel yang memenuhi kriteria dianalisis secara tematik berdasarkan topik,

pendekatan metodologis, konteks geografis, kategori ruang, dan kontribusi temuan terhadap dua *research question.*

2.1 Pencarian Sumber Data

Pencarian sumber data dalam studi ini disusun berdasarkan kerangka PICOC *(population, intervention, comparison, outcome, context).* Kerangka ini digunakan untuk memperjelas batasan pencarian, memastikan kesesuaian artikel dengan fokus penelitian, dan menjaga agar proses seleksi literatur tetap terarah pada dua *research question*. Rincian PICOC yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. PICOC

PICOC	
Population	Karya arsitektur, lingkungan binaan, dan desain ruang yang dianalisis melalui perspektif feminis, berfokus pada ruang gender di berbagai konteks budaya dan periode sejarah
Intervention	Penerapan teori dan prinsip desain arsitektur feminis dalam membentuk, mentransformasi, atau menafsirkan ruang gender, dengan mempertimbangkan faktor sosial-budaya sepanjang waktu
Comparison	Ruang atau karya arsitektur tanpa pengaruh feminis eksplisit; perbandingan ruang netral gender dengan ruang gender; perbandingan antar periode sejarah atau latar sosial-budaya
Outcome	Identifikasi pola ruang dan elemen simbolik yang terkait representasi gender; pemahaman tentang bagaimana faktor sosial-budaya dan konteks historis membentuk ruang gender
Context	Praktik arsitektur dan ruang dalam beragam konteks budaya dan historis di seluruh dunia, dengan penekanan pada perspektif feminis dan relasi gender dalam ruang

Berdasarkan PICOC tersebut, pencarian artikel dilakukan pada basis data Scopus. Scopus dipilih karena memiliki cakupan publikasi internasional yang luas, reputasi akademik yang kuat, dan menyediakan artikel dari berbagai jurnal yang relevan dengan arsitektur, lingkungan binaan, studi gender, kajian feminis, dan urbanisme. Pencarian difokuskan pada artikel yang terbit dalam rentang tahun 2015-2025 agar kajian mencerminkan perkembangan satu dekade terakhir dalam penelitian arsitektur feminis dan ruang gender.

String kata kunci disusun dengan mengombinasikan istilah utama yang berkaitan dengan feminisme, gender, arsitektur, ruang, dan pengalaman perempuan. Dalam naskah awal, pencarian menggunakan dua kombinasi kata kunci, yaitu:

1. *Feminism AND gender in architecture;*
2. *Feminism architecture; gender in architecture; gender at architecture.*

Kata kunci tersebut digunakan untuk menjaring artikel yang secara langsung mengaitkan feminisme, gender, dan arsitektur. Strategi pencarian ini menghasilkan

corpus literatur yang terfokus pada relasi antara perspektif feminis, ruang gender, dan pengalaman perempuan dalam arsitektur.

2.2 Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kriteria inklusi dan eksklusi diterapkan untuk memastikan bahwa artikel yang dianalisis memiliki relevansi langsung dengan tujuan penelitian. Artikel dimasukkan ke dalam analisis apabila memenuhi kriteria berikut:

1. Terbit pada rentang tahun 2015-2025;
2. Berbentuk artikel ilmiah;
3. Ditulis dalam bahasa Inggris;
4. Membahas arsitektur, lingkungan binaan, atau desain ruang;
5. Menggunakan atau menyinggung perspektif feminis, relasi gender, ruang gender, atau pengalaman perempuan dalam ruang;
6. Memiliki relevansi langsung dengan desain, penggunaan, representasi, akses, mobilitas, atau negosiasi ruang.

Sementara itu, artikel dikeluarkan dari analisis apabila memenuhi salah satu kriteria berikut:

1. Terbit sebelum tahun 2015;
2. Bukan artikel ilmiah, misalnya editorial, ulasan singkat, prosiding yang tidak sesuai, atau dokumen non-artikel;
3. Tidak ditulis dalam bahasa Inggris;
4. Membahas feminisme atau gender tetapi tidak membahas ruang, arsitektur, lingkungan binaan, atau desain;
5. Membahas arsitektur tetapi tidak menyoroti perspektif feminis, relasi gender, atau pengalaman perempuan.

Pembatasan pada artikel berbahasa Inggris dilakukan untuk menjaga konsistensi proses seleksi, ekstraksi data, dan perbandingan tematik dalam literatur internasional terindeks Scopus. Namun, keputusan ini juga menjadi keterbatasan penelitian. Pembatasan bahasa berpotensi mengecualikan kajian lokal berbahasa Indonesia yang relevan, terutama terkait arsitektur vernakular dan ruang gender di Indonesia. Oleh karena itu, temuan penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mewakili seluruh literatur tentang ruang gender dalam arsitektur, melainkan merepresentasikan *corpus* terfokus dari artikel berbahasa Inggris yang terindeks Scopus pada periode 2015-2025.

2.3 Proses Seleksi Artikel

Proses seleksi artikel dilakukan secara bertahap sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1. Dari pencarian awal pada basis data Scopus, diperoleh 126 artikel. Pada tahap awal, 11 artikel dikeluarkan karena tidak dapat diakses sehingga tersisa 115 artikel untuk disaring. Pada tahap penyaringan, 66 artikel dikeluarkan karena tidak memenuhi kriteria inklusi. Rinciannya adalah 22 artikel terbit sebelum tahun 2015, 19 artikel tidak

menggunakan bahasa Inggris, dan 25 dokumen bukan artikel ilmiah. Setelah tahap ini, 49 artikel masuk ke tahap pencarian dan penilaian kelayakan.

Pada tahap penilaian kelayakan, 49 artikel dibaca berdasarkan judul, abstrak, kata kunci, dan fokus pembahasan. Dari jumlah tersebut, 36 artikel dikeluarkan karena meskipun relevan dengan isu feminisme atau gender, artikel tersebut tidak membahas ruang, arsitektur, lingkungan binaan, atau desain secara langsung. Dengan demikian, 13 artikel memenuhi seluruh kriteria dan dimasukkan sebagai *corpus* final untuk dianalisis dalam penelitian ini.

Gambar 1. *Prisma Flow Chart Diagram*

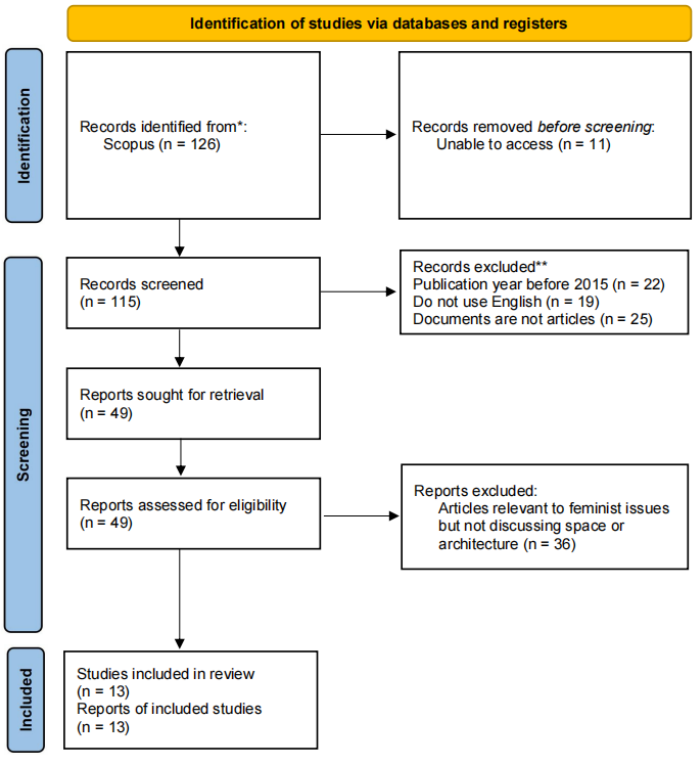

Ke-13 artikel final digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi pola tematik, kecenderungan konseptual, dan celah penelitian dalam literatur Scopus berbahasa Inggris periode 2015-2025. Dengan demikian, hasil penelitian dibaca sebagai sintesis terfokus terhadap *corpus* yang memenuhi kriteria inklusi, bukan sebagai generalisasi menyeluruh atas seluruh kajian arsitektur feminis dan ruang gender.

2.4 Prosedur Analisis Data

Artikel yang memenuhi kriteria dianalisis melalui pembacaan tematik. Setiap artikel diekstraksi berdasarkan beberapa informasi utama, yaitu tahun publikasi, penulis, konteks geografis, tipologi atau kategori ruang, topik utama, metode penelitian, temuan utama, dan kontribusinya terhadap *research question.* Proses ekstraksi ini digunakan untuk memetakan hubungan antar studi dan menghindari pembahasan yang hanya bersifat deskriptif.

Analisis dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah pemetaan deskriptif untuk mengetahui sebaran artikel berdasarkan topik, metode, konteks geografis, dan kategori ruang. Tahap kedua adalah sintesis kritis untuk mengidentifikasi hubungan antar temuan, perbedaan pendekatan, kontradiksi, serta perkembangan teori arsitektur feminis dan ruang gender. Dalam tahap ini, artikel dibandingkan untuk memahami bagaimana ruang dapat mereproduksi subordinasi perempuan, membuka ruang negosiasi, atau menjadi arena resistensi.

Kategori ruang yang digunakan dalam analisis mengikuti kerangka yang telah dijelaskan pada pendahuluan, yaitu ruang domestik, vernakular, monumental, dan perkotaan kontemporer. Kategori ini digunakan sebagai alat bantu analisis, bukan sebagai batas tipologi yang kaku. Beberapa artikel dapat berada pada lebih dari satu kategori, misalnya rumah vernakular yang sekaligus merupakan ruang domestik. Namun, pembagian ini membantu menjelaskan mekanisme relasi gender yang berbeda pada setiap konteks: ruang domestik berkaitan dengan kerja reproduktif dan relasi keluarga; ruang vernakular berkaitan dengan tradisi, pewarisan, dan kosmologi lokal; ruang monumental berkaitan dengan simbolisme dan otoritas; sedangkan ruang perkotaan kontemporer berkaitan dengan mobilitas, keamanan, akses, dan partisipasi publik.

Melalui prosedur tersebut, analisis diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan penelitian. RQ1 dijawab dengan meninjau perkembangan teori arsitektur feminis dan konsep ruang gender dalam menjelaskan relasi antara arsitektur, ruang, dan gender. RQ2 dijawab dengan menganalisis bagaimana pengalaman perempuan dalam ruang domestik maupun publik direpresentasikan dan dinegosiasikan dalam berbagai konteks arsitektural.

3. Hasil dan Pembahasan

Artikel yang terpilih berdasarkan proses penyaringan berjumlah 13 artikel. Seluruh artikel memiliki keterkaitan langsung dengan pendekatan feminis, ruang gender, dan pengalaman perempuan dalam ruang arsitektural. Untuk memudahkan pembacaan, artikel tersebut dirangkum dalam Tabel 2. Tabel ini memuat tahun publikasi, penulis, topik utama, metode, dan outcome dari masing-masing artikel. Penyajian tabel bertujuan memperlihatkan variasi pendekatan, konteks kajian, dan kontribusi setiap artikel sebagai dasar analisis tematik.

Tabel 2. Tinjauan Artikel Terpilih

No	Tahun	Penulis	Topik	Metode	Outcome
1	2025	Crippen, M	Model *selective permeability* pada kota dan dampaknya terhadap gender	Analisis data lapangan multi-konteks	Menunjukkan bagaimana konfigurasi material kota menciptakan hambatan dan peluang berbeda bagi gender, mengaitkan isu gender dengan desain

No	Tahun	Penulis	Topik	Metode	Outcome
					dan kebijakan ruang publik
2	2024	Forlini, F. R.	Konstruksi budaya atas ruang domestik di Prancis melalui pengalaman hidup perempuan dan peran norma sosial dalam membentuk desain dan penggunaan interior rumah	Mix methods (analisis tipologi, historiografis, komparatif, analisis spasial, dan studi dokumen visual)	Mengkaji bagaimana norma budaya dan estetika membentuk praktik domestik perempuan di Prancis, serta negosiasi identitas dalam ruang rumah.
3	2024	Zalloom, B.	Pengaruh budaya terhadap perilaku gender dalam ruang luar kota Amman, dengan fokus pada ruang publik tersegregasi	Mixed methods dengan studi kasus komparatif, Observasi lapangan, Kuesioner online, Analisis tematik dan numerik	Mengeksplorasi pengaruh aspek budaya terhadap perilaku pengguna di ruang luar Amman, membandingkan perbedaan antara area lama dan modern terkait segregasi gender.
4	2024	Xu et al.	Genealogi arsitektur feminis dan interaksinya dengan ruang	Analisis bibliometrik, studi pustaka, analisis perbandingan historis dan kontemporer	Menguraikan perkembangan arsitektur feminis global dan di Tiongkok, menunjukkan pengaruh sosial-budaya terhadap desain gender, serta menawarkan kerangka konseptual baru untuk penelitian feminist architecture
5	2023	Lakshmanan et al.	Inklusivitas gender dalam ruang domestik melalui analisis desain arsitektur tradisional dengan fokus pada elemen budaya dan ruang yang mendukung atau	Kualitatif: wawancara mendalam, observasi partisipatif, pendekatan fenomenologis, teknik snowball sampling, dokumentasi lapangan, dan analisis tematik	Mengidentifikasi elemen desain rumah Chettinad yang dapat menciptakan inklusivitas gender dengan mempertahankan nilai tradisi.

No	Tahun	Penulis	Topik	Metode	Outcome
			membatasi peran perempuan.	berbasis "*thick description*"	
6	2022	Butudoka et al.	Relasi gender dan dominasi perempuan dalam rumah tradisional Kaili Da'a	Kualitatif fenomenologis (reduksi fenomenologis, eidetik, transendental; observasi lapangan; wawancara; triangulasi)	Menganalisis peran dominan perempuan dalam tata ruang rumah tradisional Kaili Da'a sebagai wujud kearifan lokal dan identitas budaya.
7	2022	Chadha, T.	Dinamika gender di ruang publik dan desain kota inklusif gender	Studi literatur dengan metode analisis naratif dan induktif terhadap 25 jurnal akademik	Mengulas dinamika gender di ruang publik dan privat serta implikasinya pada desain kota dan arsitektur yang lebih inklusif gender.
8	2023	Eamvijit, S.	Analisis gender dalam karya Le Corbusier dan perbandingan dengan Margarete Schütte-Lihotzky	Analisis teks arsitektur dan karya seni, studi perbandingan	Mengungkap bias gender dalam modernisme dan bagaimana pendekatan feminis dapat mengubah estetika yang sama menjadi ruang yang lebih setara
9	2020	Siwach, P.	Relasi antara ruang yang digenderkan dan mobilitas perempuan dalam masyarakat patriarkal pedesaan	Kualitatif dengan observasi lapangan, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan perempuan dari tiga generasi dalam satu rumah tangga (nenek, ibu, menantu, anak perempuan).	Mengidentifikasi ruang publik dan privat yang ter-genderisasi, serta menganalisis bagaimana patriarki mempengaruhi mobilitas perempuan dan negosiasi mereka terhadap aturan sosial.
10	2019	Zalloom, B.	Pengaruh aspek budaya terhadap pembentukan ruang gender dalam rumah-rumah di Amman	*Mixed methods* dengan studi kasus rumah di Amman (analisis denah, dokumen, komparatif) dan survei online kuantitatif	Menganalisis pengaruh aspek budaya terhadap pembagian ruang publik/pribadi dalam rumah tradisional Amman, serta preferensi generasi muda terhadap segregasi gender.

No	Tahun	Penulis	Topik	Metode	Outcome
11	2017	Aryanti, T.	Gender dan visibilitas perempuan di keputren Kraton Yogyakarta	Etnografi dengan wawancara dan observasi terbatas	Mengungkap nilai-nilai gender dalam tata ruang Keraton Yogyakarta yang membuat perempuan dan ruangnya menjadi tidak terlihat, melalui kontrol gerak dan pandangan.
12	2016	Annemarie van Geel	Segregasi gender dan ruang publik perempuan di Arab Saudi	Kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap 48 perempuan urban di Riyadh, Jeddah, Dammam	Menelusuri perkembangan ruang publik khusus perempuan di Arab Saudi dan bagaimana hal ini mempengaruhi partisipasi perempuan dalam domain publik.
13	2016	Nugali	Pembacaan simbol arsitektur gedung pencakar langit Saudi Arabia dalam konteks gender	Analisis visual simbol arsitektur, studi literatur budaya dan gender	Mengungkap bagaimana simbol fisik arsitektur merepresentasikan dan mengkodekan gender dalam konteks sosial-budaya Saudi Arabia

Berdasarkan peninjauan terhadap 13 artikel tersebut, terdapat tiga temuan utama. Pertama, teori arsitektur feminis dan konsep ruang gender berkembang dari kritik terhadap bias modernisme menuju gagasan ruang yang lebih inklusif, aman, dan adil. Kedua, pengalaman perempuan dalam ruang arsitektural menunjukkan pola ambivalen karena ruang dapat menjadi instrumen subordinasi sekaligus arena negosiasi. Ketiga, literatur yang dikaji masih menunjukkan celah penelitian, terutama terkait interseksionalitas, konteks Asia Tenggara, dan ruang-ruang kontemporer yang belum banyak dikaji.

3.1 Perkembangan Teori Arsitektur Feminis dan Ruang Gender

RQ1 menanyakan bagaimana perkembangan teori arsitektur feminis dan konsep ruang gender digunakan untuk memahami relasi antara arsitektur, ruang, dan gender. Berdasarkan artikel yang dianalisis, perkembangan tersebut dapat dibaca melalui beberapa pola sintesis sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Sintesis Perkembangan Teori Arsitektur Feminis dan Ruang Gender

Sintesis	Artikel
Kota dan rumah sebagai konstruksi gender, publik-privat membentuk relasi ruang	Crippen, 2025; Forlini, 2024; Siwach, 2020

Sintesis	Artikel
Feminisme melahirkan teori arsitektur inklusif, kritik modernisme, dan ruang tanpa segregasi	Chadha, 2022; Eamvijit, 2023; Lakshmanan et al., 2023; Xu et al., 2024
Segregasi ruang dan *women-only spaces* diproduksi oleh budaya dan agama, mengontrol mobilitas perempuan	Aryanti, 2017; van Geel, 2016; Zalloom, 2019
Arsitektur monumental menghadirkan simbol dan representasi perempuan	Nugali, 2022
Rumah sebagai domain perempuan, matrilokal dan kosmologi lokal menegaskan kuasa perempuan	Butudoka et al., 2022
Perencanaan kota bias gender, feminisme menekankan keamanan, mobilitas, dan akses ruang publik	Zalloom, 2024

Perkembangan teori arsitektur feminis menunjukkan bahwa arsitektur tidak dapat dipisahkan dari relasi sosial, politik, budaya, dan tubuh pengguna ruang. Kritik feminis berangkat dari pengabaian kebutuhan perempuan dalam lingkungan binaan. Kritik ini kemudian berkembang menjadi gagasan arsitektur inklusif yang menekankan partisipasi, keamanan, akses, dan keadilan spasial (Chadha, 2022). Dalam konteks global, arsitektur feminis juga bergerak dari kritik representasi menuju pembentukan kerangka konseptual yang lebih luas untuk memahami interaksi antara gender dan ruang (Xu et al., 2024).

Kritik terhadap modernisme menjadi salah satu titik penting dalam perkembangan teori arsitektur feminis. Modernisme kerap menempatkan tubuh laki-laki sebagai standar universal desain, sementara pengalaman perempuan direduksi atau ditempatkan dalam posisi sekunder. Eamvijit (2023) menunjukkan bahwa bias gender dalam karya Le Corbusier dapat dibaca melalui cara tubuh, estetika, dan fungsi domestik direpresentasikan. Namun, studi yang sama juga menunjukkan adanya alternatif melalui pendekatan Margarete Schütte-Lihotzky, yang menempatkan efisiensi kerja domestik dan kesejahteraan perempuan sebagai bagian dari agenda desain modern.

Pada ruang domestik dan vernakular, teori arsitektur feminis memperlihatkan bahwa rumah bukan hanya ruang privat, tetapi juga arena produksi relasi gender. Studi (Forlini, 2024) menunjukkan bahwa praktik domestisitas sehari-hari dapat menjadi bentuk negosiasi identitas perempuan. Zalloom (2024) memperlihatkan bahwa pembagian ruang publik dan privat dalam rumah-rumah di Amman dipengaruhi oleh nilai budaya dan agama. Sementara itu, Lakshmanan et al. (2023) menunjukkan bahwa arsitektur vernakular Chettinad menyediakan elemen ruang yang dapat mendukung privasi, perlindungan, dan otonomi perempuan. Temuan ini memperlihatkan bahwa ruang domestik tidak dapat dibaca secara tunggal sebagai ruang subordinasi karena dalam kondisi tertentu juga dapat menjadi ruang agensi.

Kajian ruang gender juga menyoroti bagaimana batas publik-privat bekerja sebagai mekanisme kontrol. Siwach (2020) menunjukkan bahwa mobilitas perempuan dalam masyarakat patriarkal pedesaan dibatasi oleh norma sosial yang mengatur akses

terhadap ruang publik dan privat. Dalam skala kota, Crippen (2025) menunjukkan bahwa konfigurasi material kota dapat menciptakan hambatan dan peluang yang berbeda bagi perempuan. Zalloom (2024) menegaskan bahwa perencanaan kota yang tidak sensitif gender dapat membatasi mobilitas dan rasa aman perempuan. Dengan demikian, isu gender dalam arsitektur tidak hanya berkaitan dengan simbol atau representasi, tetapi juga dengan materialitas, akses, infrastruktur, dan kebijakan ruang.

Segregasi ruang menjadi tema penting lain dalam perkembangan teori arsitektur feminis. Pada satu sisi, segregasi dapat memperkuat kontrol patriarkal atas tubuh dan mobilitas perempuan. Hal ini tampak dalam tata keputren Keraton Yogyakarta yang membuat perempuan dan ruangnya menjadi tidak terlihat melalui kontrol gerak dan pandangan (Aryanti, 2017). Segregasi juga tampak dalam rumah-rumah Amman yang memisahkan ruang publik dan privat berdasarkan norma budaya dan agama (Zalloom, 2019). Namun, pada sisi lain, *women-only spaces* di Arab Saudi menunjukkan bahwa ruang terpisah dapat membuka peluang partisipasi perempuan dalam domain publik, meskipun peluang tersebut tetap berada dalam struktur sosial yang membatasi (van Geel, 2016). Pola ini menunjukkan bahwa segregasi memiliki sifat ambivalen. Segregasi dapat menjadi alat kontrol, tetapi dalam konteks tertentu juga menjadi strategi partisipasi terbatas.

Arsitektur monumental memperlihatkan relasi gender melalui simbol, skala, dan representasi. Nugali (2016) membaca gedung AlFaisalia dan AlMamlakah di Saudi Arabia sebagai bentuk simbolik yang mengodekan tubuh perempuan dalam kerangka sosial-budaya tertentu. Sementara itu, kajian Butudoka et al. (2022) tentang rumah Sapo masyarakat Kaili Da'a menunjukkan arah yang berbeda. Dalam konteks ini, ruang perempuan ditempatkan sebagai inti sakral dan pusat kuasa melalui tradisi matrilokal dan pewarisan rumah kepada anak perempuan. Kedua temuan tersebut memperlihatkan bahwa ruang dapat merepresentasikan perempuan secara berbeda, baik sebagai objek simbolik maupun sebagai subjek yang memiliki otoritas.

Perkembangan teori arsitektur feminis dan konsep ruang gender memperlihatkan bahwa arsitektur adalah medium sosial-politik yang memproduksi, membatasi, sekaligus menegosiasikan relasi gender. Dari kritik atas bias modernisme hingga gagasan ruang inklusif, feminisme menyoroti bahwa kota, rumah, bangunan budaya, dan arsitektur monumental tidak pernah netral. Ruang dapat mereproduksi patriarki melalui pembagian publik-privat, segregasi, simbolisasi tubuh, dan desain yang mengabaikan pengalaman perempuan. Namun, ruang juga dapat menjadi arena reimajinasi spasial untuk membangun akses yang lebih adil, aman, dan inklusif.

3.2 Representasi dan Negosiasi Pengalaman Perempuan dalam Ruang Arsitektural

RQ2 menanyakan bagaimana pengalaman perempuan dalam ruang domestik maupun publik direpresentasikan dan dinegosiasikan dalam kajian arsitektur dan ruang. Berdasarkan artikel yang dianalisis, pengalaman perempuan tidak muncul sebagai pengalaman tunggal, tetapi sebagai pengalaman yang dibentuk oleh budaya, agama,

kelas, usia, mobilitas, norma keluarga, dan konfigurasi ruang. Sintesis temuan tersebut ditunjukkan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Sintesis Representasi dan Negosiasi Pengalaman Perempuan dalam Ruang Arsitektural

Sintesis	Artikel
Ruang domestik sebagai arena gender, namun juga ruang negosiasi perempuan	Forlini, 2024; Lakshmanan et al., 2023; Zalloom, 2019
Ruang vernakular memberi otoritas perempuan melalui matrilokalitas, pewarisan, dan makna ulang terhadap tradisi	Butudoka et al., 2022
Ruang monumental/keraton menegaskan subordinasi dengan membuat perempuan "*invisible*"	Aryanti, 2017; Eamvijit, 2023
Ruang kota modern bias gender, membatasi mobilitas dan rasa aman; dinegosiasikan lewat strategi penggunaan ruang dan tuntutan desain inklusif	Chadha, 2022; Crippen, 2025; Xu et al., 2024; Zalloom, 2024
Ruang publik khusus perempuan menjadi arena aktivitas, strategi, sekaligus perdebatan tentang *empowerment* dan segregasi	van Geel, 2016
Mobilitas perempuan dibatasi norma patriarki, namun dinegosiasikan lewat kerja, usia, kasta, dan "*patriarchal bargain*"	Siwach, 2020
Arsitektur modern dan simbol bangunan monumental menegaskan bias maskulin, perempuan direduksi pada kerja domestik dan kodifikasi gender	Eamvijit, 2023; Nugali, 2022

Pengalaman perempuan dalam ruang domestik direpresentasikan sebagai konstruksi budaya dan arsitektural yang sarat dengan relasi kuasa. Di Prancis, tata ruang rumah berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial, tetapi pada saat yang sama menjadi arena negosiasi identitas melalui praktik keseharian, estetika, dan aktivitas domestik (Forlini, 2024). Di Amman, segregasi publik-privat berakar pada tradisi dan agama sehingga perempuan ditempatkan lebih kuat dalam ranah domestik, tetapi tetap memiliki ruang negosiasi melalui adaptasi desain dan respons terhadap modernitas (Zalloom, 2019). Dalam arsitektur Chettinad di India, ruang domestik yang berakar pada norma patriarki tetap memberi perempuan otonomi relatif dalam pengelolaan rumah tangga dan aset keluarga (Lakshmanan et al., 2023). Ketiga studi tersebut menunjukkan bahwa ruang domestik tidak hanya menjadi arena subordinasi, tetapi juga ruang negosiasi identitas, otoritas, dan agensi perempuan.

Dalam arsitektur vernakular, pengalaman perempuan dapat memperoleh posisi yang lebih kuat melalui tradisi, pewarisan, dan kosmologi lokal. Pada arsitektur Kaili Da'a, tradisi matrilokal dan pewarisan rumah kepada anak perempuan menjadikan perempuan sebagai pengelola utama rumah dan penjaga warisan budaya. Ruang inti Sapo menjadi simbol sakral feminitas sekaligus tempat perempuan memiliki kendali atas urusan rumah tangga. Sementara laki-laki lebih banyak diasosiasikan dengan ranah luar, perempuan

memegang otoritas dalam tata ruang domestik dan melestarikan tradisi melalui praktik sehari-hari (Butudoka et al., 2022). Temuan ini menunjukkan bahwa arsitektur vernakular tidak selalu identik dengan reproduksi patriarki karena dalam konteks tertentu dapat memberi legitimasi kultural bagi kuasa perempuan.

Sebaliknya, dalam arsitektur monumental dan modernis, perempuan sering direpresentasikan sebagai tubuh yang dikendalikan, disimbolkan, atau dibuat tidak terlihat. Di Keraton Yogyakarta, area keputren ditempatkan secara tersembunyi dan terhalang pandangan. Tata ruang ini merepresentasikan tubuh perempuan sebagai docile bodies yang tunduk pada otoritas sultan (Aryanti, 2017). Dalam modernisme Le Corbusier, tubuh laki-laki dijadikan standar desain universal melalui Modulor, sementara perempuan direduksi menjadi ornamen atau objek pasif dalam narasi visual dan spasial. Namun, negosiasi tetap muncul melalui karya Margarete Schütte-Lihotzky, khususnya rancangan Frankfurt Kitchen yang mendukung efisiensi dan kemandirian perempuan dalam ruang domestik modernis (Eamvijit, 2023). Oleh karena itu, ruang monumental dan modernis dapat menegaskan subordinasi perempuan, tetapi juga membuka peluang kritik dan intervensi melalui strategi desain feminis.

Pengalaman perempuan dalam ruang publik kerap direpresentasikan melalui praktik segregasi yang ambivalen. Di Arab Saudi, ruang publik khusus perempuan menjadi arena regulasi karena membatasi akses perempuan dalam ruang campuran. Namun, ruang tersebut juga memiliki fungsi emansipatoris karena membuka kesempatan partisipasi dalam ruang kerja, pusat perbelanjaan, dan aktivitas publik yang sulit diakses apabila bercampur dengan laki-laki. Negosiasi atas segregasi muncul melalui strategi yang beragam, mulai dari mempertahankan status *quo* segregasi gender, memperbanyak ruang perempuan, memandangnya sebagai fase menuju ruang campuran, hingga melanggar aturan segregasi secara langsung (van Geel, 2016). Dalam konteks ini, pemberdayaan perempuan dipahami melalui perluasan partisipasi dalam pendidikan, ekonomi, dan kehidupan publik, meskipun tetap berlangsung dalam struktur sosial yang membatasi.

Dalam ruang kota modern, bias maskulin tampak melalui desain yang membatasi mobilitas, rasa aman, dan akses perempuan. Konfigurasi material kota dapat menciptakan risiko yang berbeda bagi perempuan, terutama ketika ruang publik tidak mempertimbangkan pengalaman tubuh, kerja perawatan, dan kebutuhan mobilitas harian (Crippen, 2025). Perempuan menegosiasikan kondisi tersebut melalui strategi spasial, seperti memilih rute tertentu, menggunakan moda transportasi yang dianggap aman, memanfaatkan ruang khusus perempuan, atau mendorong advokasi kota inklusif (Chadha, 2022; Xu et al., 2024). Dalam konteks Amman, perbedaan antara kawasan lama dan modern juga menunjukkan bahwa segregasi gender tidak hanya dipengaruhi oleh norma budaya, tetapi juga oleh desain ruang luar kota dan cara ruang tersebut digunakan (Zalloom, 2024).

Arsitektur monumental di kota modern juga memperlihatkan bagaimana tubuh perempuan dikodekan dalam simbol arsitektur. Nugali (2016) menunjukkan bahwa gedung AlFaisalia dan AlMamlakah di Saudi Arabia dapat dibaca sebagai representasi

tubuh perempuan dalam kerangka patriarki dan simbol *phallus* (simbol dominasi maskulin dan kekuasaan patriarkal). Temuan ini memperlihatkan bahwa representasi perempuan dalam arsitektur tidak selalu hadir melalui kehadiran fisik perempuan sebagai pengguna ruang, tetapi juga melalui metafora, simbol, dan narasi visual yang membentuk cara masyarakat memaknai gender.

Secara keseluruhan, pengalaman perempuan dalam ruang domestik maupun publik memperlihatkan pola yang ambivalen. Di satu sisi, arsitektur mereproduksi ideologi patriarki melalui pembagian domestik-publik, segregasi, simbolisme monumental, dan desain modernis yang menegaskan subordinasi serta invisibilitas perempuan. Di sisi lain, di dalam struktur kuasa tersebut muncul berbagai strategi negosiasi yang memungkinkan perempuan merundingkan posisi dan agensinya. Rumah vernakular dapat memberi otoritas domestik, segregasi publik dapat membuka peluang partisipasi terbatas, dapur modern dapat dirancang ulang untuk mendukung efisiensi kerja perempuan, dan kota kontemporer dapat dinegosiasikan melalui praktik spasial serta advokasi desain inklusif. Karena itu, ruang tidak hanya menjadi arena reproduksi ketidaksetaraan, tetapi juga arena transformasi dan artikulasi identitas gender.

4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan kajian terhadap 13 artikel, penelitian ini menjawab dua pertanyaan utama mengenai perkembangan teori arsitektur feminis, konsep ruang gender, dan pengalaman perempuan dalam ruang arsitektural. Pertama, teori arsitektur feminis menunjukkan bahwa arsitektur tidak bersifat netral karena selalu dipengaruhi oleh relasi sosial, politik, budaya, dan tubuh pengguna ruang. Kritik feminis terhadap arsitektur berangkat dari bias modernisme yang menjadikan tubuh laki-laki sebagai standar universal desain. Kritik tersebut kemudian berkembang menuju wacana ruang inklusif yang menekankan keadilan spasial, akses setara, keamanan, mobilitas, dan partisipasi perempuan dalam pembentukan ruang.

Kedua, pengalaman perempuan dalam ruang domestik maupun publik direpresentasikan secara ambivalen. Pada ruang domestik, perempuan sering ditempatkan dalam relasi subordinatif melalui kerja rumah tangga, pembagian ruang publik-privat, dan norma keluarga. Namun, ruang domestik juga dapat menjadi arena negosiasi identitas, otoritas, dan agensi. Dalam arsitektur vernakular, perempuan dapat memperoleh posisi yang lebih kuat melalui tradisi matrilokal, pewarisan rumah, dan makna simbolik ruang inti. Sebaliknya, dalam arsitektur monumental dan modernis, perempuan ke direduksi menjadi simbol, tubuh yang dikendalikan, atau subjek yang tidak terlihat. Meski demikian, perempuan tetap menegosiasikan posisinya melalui praktik spasial, adaptasi ruang, dan strategi desain feminis.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman perempuan dalam arsitektur berada di antara reproduksi patriarki dan resistensi. Ruang dapat memperkuat ketimpangan melalui segregasi, simbolisasi tubuh, pembatasan mobilitas, dan desain yang mengabaikan pengalaman perempuan. Namun, ruang juga dapat menjadi media

negosiasi ketika perempuan menggunakan, mengadaptasi, dan memaknai ulang lingkungan binaan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, arsitektur feminis tidak hanya berfungsi sebagai kritik terhadap bias patriarkal, tetapi juga sebagai kerangka untuk merancang ruang yang lebih adil, aman, inklusif, dan responsif terhadap pengalaman gender yang beragam.

Penelitian ini juga menemukan beberapa kesenjangan penting dalam literatur yang dikaji. Kajian ruang gender masih cenderung berfokus pada representasi dan simbolisasi, sementara aspek interseksionalitas belum banyak dibahas. Perbedaan pengalaman perempuan berdasarkan kelas, usia, etnisitas, agama, status sosial, dan kondisi tubuh masih perlu diteliti secara lebih mendalam. Literatur yang dianalisis juga lebih banyak membahas ruang domestik, ruang monumental, dan kota besar, sedangkan ruang transisi, ruang kerja informal, ruang digital, ruang perawatan, dan ruang mobilitas sehari-hari masih jarang menjadi fokus utama.

Selain itu, studi arsitektur feminis di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, masih perlu dikembangkan. Konteks Indonesia memiliki potensi besar karena keberagaman arsitektur vernakular, budaya multikultural, sistem kekerabatan, dan praktik ruang sehari-hari yang dapat memperkaya teori arsitektur feminis global. Kajian di masa depan perlu memperkuat perspektif interseksional, mengeksplorasi ruang kontemporer seperti ruang digital dan ruang kerja fleksibel, serta mengembangkan studi kontekstual Asia Tenggara dengan memadukan teori feminis global dan praktik lokal. Arah penelitian ini penting agar kajian arsitektur feminis tidak berhenti pada kritik terhadap patriarki, tetapi juga dapat menawarkan strategi desain dan kebijakan ruang yang lebih konkret untuk membangun lingkungan binaan yang setara bagi semua gender.

Keterbatasan utama dalam penelitian ini terletak pada pembatasan pencarian artikel yang hanya mencakup literatur berbahasa Inggris. Hal ini menyebabkan minimnya integrasi kajian lokal berbahasa Indonesia relevan dengan konteks penelitian terkait ruang gender. Oleh karena itu, temuan dalam riset ini belum dapat mewakili seluruh literatur mengenai ruang gender. Sehingga, diperlukan kajian lanjutan yang melibatkan literatur multibahasa serta memperluas cakupan pada studi-studi lokal untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

Daftar Pustaka

Aryanti, T. (2017). Vision and Gendered Space : Making Women Invisible in Yogyakarta Sultanate Palace. *Space and Culture*, *20*(3), 301–314. https://doi.org/10.1177/1206331216647353

Beebeejaun, Y. (2017). Gender , Urban Space , and The Right to Everyday Life. *Journal of Urban Affairs*, *39*(3), 323–334. https://doi.org/10.1080/07352166.2016.1255526

Boys, J. (1984). Women and Public Space. In Matrix (Ed.), *Making Space: Women and the Man Made Environment* (pp. 34–54). Pluto Press. http://www.matrixfeministarchitecturearchive.co.uk/makingspace/

Butudoka, Z., Subroto, T. Y. W., & Rahmi, D. H. (2022). The Besi Domain : The Reflection of Female Mastery in Kaili Da'a Traditional Housing , Central Sulawesi , Indonesia. *International Review for Spatial Planning and Sustainable Development*, *10*(1), 117–

132. https://doi.org/10.14246/irspsd.10.1_117

Chadha, T. (2022). Separate But Equal ? Understanding Gender Dynamics. *Journal of The Indian Institute of Architects*, *January*. https://www.iiajournal.com/article/separate-but-equal-understanding-gender-dynamics-and-its-implications-for-gender-inclusive-design-ar-trishla-chadha/

Chee, L. (2024). Domesticity, Gender, and Architecture. In D. Lu (Ed.), *The Routledge companion to contemporary architectural history* (pp. 253–269). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315674469

Crippen, M. (2025). Selective Permeability , Political Affordances and the Gendering of Cities. *Societies*, *15*(7). https://doi.org/10.3390/soc15070188

Darke, J. (1984). Women, Architects and Feminism. In Matrix (Ed.), *Making space: Women and the man-made environment* (pp. 11–25). Pluto Press. http://www.matrixfeministarchitecturearchive.co.uk/makingspace/

Eamvijit, S. (2023). Modernism and the Gender Trouble: Techno-Utopia and Gender Politics in the 20th Century Design. *Journal of Architectural/Planning Research and Studies*, *20*(1), 55–72. https://doi.org/10.56261/jars.v20i1.249560

Forlini, F. R. (2024). The Cultural Construction of the Domestic Space in France : Women's Lived Experience and the Materialization of Customs. *Urban Planning*, *9*. https://doi.org/10.17645/up.7753

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024). *Laporan kinerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2024*. https://ppid.kemenpppa.go.id/uploads/informasi/publik/berkala_1747215222.pdf

Lakshmanan, R., Anbu, M., & Noguchi, M. (2023). Analysis of Design Agents for Mediation of Gender Inclusivity in Domestic Space : A Case Study of Chettinad Vernacular Architecture. *Sustainability*, *15*(4). https://doi.org/10.3390/su15043643

Limaki, A. K. (2024). Feminist Architecture and Challenging Gender-biased Urbanization through Architectural Practice : an Overview of Equitable Environment. *International Journal of Media and Networks*, *2*(4), 1–10. https://doi.org/https://doi.org/10.33140/IJMN

Matrix. (1984). *Making Space: Women and the Man Made Environment*. Pluto Press. http://www.matrixfeministarchitecturearchive.co.uk/makingspace/

Nugali, S. (2016). Multi-Architecture in Saudi Arabia: Representing the History of Women. *Journal of International Women's Studies*, *17*(1), 76–85. https://vc.bridgew.edu/jiws/vol17/iss1/6

Picon, A. (2024). Nature, Infrastructure, and Cities. In D. Lu (Ed.), *The Routledge companion to contemporary architectural history* (pp. 469–476). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315674469

Pieris, A. (2024). Power, Empire, and Nation. In D. Lu (Ed.), *The Routledge companion to contemporary architectural history* (pp. 339–350). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315674469

Siwach, P. (2020). *Mapping Gendered Spaces and Women's Mobility : A Case Study of Mitathal Village , Haryana*. https://doi.org/10.1177/0972558X20913680

Spain, D. (1993). Gendered Spaces and Women's Status. *Sociological Theory*, *11*(2), 137–151. https://www.jstor.org/stable/202139

UN Women. (2023). *Generation Equality Accountability Report 2023*. https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2023/09/generation-equality-accountability-report-2023

van Geel, A. (2016). Separate or Together ? Women-Only Public Spaces and Participation of Saudi Women in The Public Domain in Saudi Arabia. *Contemporary Islam*, 357–378. https://doi.org/10.1007/s11562-015-0350-2

Vellinga, M. (2024). Vernacular Architecture. In D. Lu (Ed.), *The Routledge companion to contemporary architectural history* (pp. 313–327). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315674469

Xu, Z., Huang, X., Li, X., & Duan, C. (2024). Interaction Between Gender and Space: A Study on the Genealogy of Feminist Architecture. *Buildings*, *14*(11). https://doi.org/10.3390/buildings14113658

Zalloom, B. (2019). Gendered spaces: The Impact of The Cultural Aspects on The Spatial Organisation of Spaces Inside The Houses of Amman during The Last Century. *METU Journal of the Faculty of Architecture*, *36*(1), 203–222. https://doi.org/10.18280/ijsdp.190309

Zalloom, B. (2024). Cultural Dynamics of Gendered Spaces : Behavioral Influences in Amman's Outdoor Areas. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, *19*(3), 909–916. https://doi.org/10.18280/ijsdp.190309

COMMUNITY PARTICIPATION AND RURAL DEVELOPMENT SUSTAINABILITY IN SOME SELECTED COMMUNITIES OF EDO STATE, NIGERIA

[1]Victor Ebonine
University of Benin
victor.ebonine@socsci.uniben.edu

[2]John Aigboje Kadiri
University of Benin
john.kadiri@uniben.edu

Keywords:
Community participation, sustainability, community and social development project, Edo state, bottom-top approach, participatory development approach.

BRAWIJAYA JOURNAL of SOCIAL SCIENCE

Vol. 5, No. 2, 2026

DOI: https://doi.org.10.21776/ub.bjss.2026.005.02.4

Submitted: 2025-11-12
Accepted: 2026-07-04

Abstract

Addressing rural underdevelopment has been a major challenge to the Nigerian government since independence. To that extent, previous initiatives were created to address it. However, they failed to yield the desired positive outcomes, necessitating further refinement of robust initiatives that would address this challenge, until the Community and Social Development Projects (CSDPs) were established. This initiative was designed to address the challenge that the previous initiatives encountered, namely, centrism that obscured community participation and project sustainability. This study, therefore, aimed to examine the extent to which communities participated in the CSDPs and whether their participation contributed to project sustainability in Edo State, Nigeria. The study utilised an in-depth interview method to elicit responses from 109 participants across the selected communities in the state. The study found that the communities were involved in both the planning and implementation stages of the project execution. Their involvement translated into efforts at sustaining the projects, namely in providing funds and manual skills such as clearing weeds around the projects and cleaning and maintaining them. The study, therefore, recommends that there should be sustainable mechanisms for checking continued maintenance of projects, greater government involvement in project sustainability, and improved and sustained women's involvement in community participation in CSDP in rural communities of Edo State, and by extension, Nigeria.

1. Introduction

Rural development has garnered more attention in recent times, given reports of an increasing number of rural poor in developing countries comparable with urban centres. Reports indicate that 65% of people living in developing countries reside in rural areas (Okafor & Chikalipah, 2021). More concerning is that the most adversely affected by the rising poverty levels are women and children, who are often burdened with domestic responsibilities traditionally assigned to men, thereby exacerbating their vulnerability in society. The rising level of rural poverty has prompted governments to search for solutions. For instance, since independence, the Nigerian government has initiated various policies aimed at addressing rural poverty, such as the National Policy on Rural Development (2004), the Green Revolution Programme (1980), the Directorate for Food, Roads and Rural Infrastructure (DFRRI) (1986), the Rural Infrastructural Development Scheme (RIDS) and the National Rural Roads Development Fund (NRRDF) (Ahmed, Gbadebo, Iselobhor & Tokede, 2021). These policies failed to achieve their intended goals chiefly due to a lack of community participation. The policies adopted a top-down approach that prioritised the interests of policymakers and policy executors over those of the people they were meant to benefit. Moreover, because communities were not involved in the policies, executed projects were either abandoned during implementation, hijacked by corrupt elites, suffered inadequate financial backing, or failed to endure (sustainability) (Odishika & Adedeji, 2016).

In this study, sustainability refers to the ability of executed projects to continue functioning effectively and deliver tangible benefits to communities long after external, government and donor support has ceased. In the Global South, such as Nigeria, sustainability goes beyond the physical existence of infrastructure. It includes community ownership, maintenance support, institutional support and resources required to keep infrastructure functioning for the benefit of communities. This conceptualisation is significant because many rural projects have deteriorated after implementation due to neglect, corruption, weak institutions, insufficient financial support, and reduced rural participation.

The failure of the top-down approach triggered a policy retooling to a bottom-up approach that prioritised people's participation. However, it is one thing to execute a project; it is yet another for the project to be sustained. In the context of rural development, project sustainability is equally important as its execution. Rural development sustainability is a collaborative approach that involves both recipient rural communities and the government. According to Aga, Noorderhaven, & Vallejo (2018), rural development sustainability encompasses end-users' attitudes toward maintaining project operations and continuing project services after completion. Beyond community participation and ownership, sustainability also includes technocratic dimensions, such as institutional capacity, human capacity, funding, maintenance capacity and technical expertise to keep the projects functioning. In the Nigerian context, ensuring the sustainability of completed projects is challenging, as evidenced by numerous abandoned projects nationwide. Community participation can help tackle this issue by fostering a sense of ownership and responsibility in communities, which is vital for sustaining rural projects.

This study examines the relationship between community participation and the sustainability of rural development in Edo State, Nigeria. Although previous studies have established a significant positive relationship between community participation in rural development and project sustainability, many of the studies have focused on measuring the extent of participation or how participation produced tangible outcomes (Marzo, Chen, Anuar, Abdul Wahab, Ibrahim, Ariffin, Ahmad, Kawuki, & Aljuaid, 2023; Mia, Islam, Sakin, & Al-Hamadi, 2022; Yusuf et al., 2020; Ugwu & Aruma, 2019). As a result, there is a limited scholarly attention to how communities engage in project sustainability after completion through maintenance capacity, resource mobilisation, leadership capacity and monitoring activities. This paper aims to bridge this gap in scholarship by arguing that while community participation can be an effective strategy for rural development, it is important to study specific ways in which development projects, in this case Community and Social Development Projects (CSDPs), are sustained.

The novelty of this study lies in its focus on identifying significant measures through which communities sustain projects and challenges that hinder project sustainability in rural communities in Edo State. By offering practical empirical evidence, the study hopes to contribute to growing scholarship on community participation in rural development, providing a nuanced perspective on project sustainability through coalitions and how projects can be sustained for long-term community benefits.

2. Conceptual Clarification

Community participation involves the active involvement of community members in the decision-making processes and initiatives that affect their lives. It is a bottom-up approach that involves a symbiotic process of engagement and implementation involving communities and the state government or its representative. The essence of community participation is to ensure that projects align with community needs and, in turn, promote sustainability (Lucky, 2016). Community participation involves various activities, including needs assessment, planning, training, implementation, monitoring, and evaluation (Shetunyenga, 2024). However, for community participation to emerge, factors such as economic benefits, mutual understanding, recognition, motivation, and motives can serve as incentives (Wehn & Almomani, 2019). People must perceive the likely benefits, both individual and collective, that would accrue from participating in any community activity. This is particularly important in developing countries like Nigeria, where corruption, neglect, state-centric policies, and policy inconsistencies are commonplace (Suleiman, Daura & Liberty, 2023; Spyromitros & Panagiotidis, 2022).

The concept of sustainability is contested, and consequently approached from different disciplinary and contextual perspectives. It has been conceptualised as meeting the needs of this generation without compromising the future needs of generations by ensuring a balance among economic growth, environmental care, and well-being (Santandar, 2023). The idea of sustainable development, which has become a common concept among scholars and within academia, is to sustain activities and programmes that encourage human development and well-being. Ben-Eli (2015) conceptualised sustainability as a dynamic equilibrium in the interaction between people and the environment, such that people develop their full potential

without adversely affecting the capacity of the environment upon which their needs depend. It connotes the capacity of human activities to avoid harming the environment's productive capacity (Thomas, 2015).

In the context of this study, rural development sustainability, which is integrated into project management, is operationally defined as the process and capacity to initiate, execute and manage a project for future use. Project sustainability encompasses economy, environment, and society (Klöpffer, 2003). Projects that are not sustained often decay and go extinct. The task of sustaining projects, particularly rural projects, is not only the responsibility of the executing body, but also of the beneficiary communities. In the CSDP Implementation Manual (2019), although the task of sustaining projects is not expressly stated, it is deemed embedded in the project monitoring and evaluation stage. Meanwhile, sustainability is a more enduring task that must be sustained beyond project monitoring and evaluation, which may cease once a project has been executed.

3. Methods

The study was conducted in Edo State. The state was selected for convenience and because it is one of the states implementing the CSDP, an initiative of the World Bank and the Nigerian government, implemented at the sub-national level. The study employed an in-depth interview to elicit responses from eight Community and Social Development Agency (CSDA) officials and 101 individuals from the sampled communities between June and November 2023. In total, 109 persons participated in the study (see Table 1). The interview process took into consideration the socio-demographic characteristics of the participants to ensure the collection of credible and reliable data.

A simple random sampling technique was used to select the CSDA officers. It was anticipated that the information provided by these officers would offer valuable insights into the CSDA's operations and its role in alleviating poverty in rural communities through critical development interventions. A convenience sampling technique was used to select members of the sampled communities. This approach was considered appropriate because many of the CSDP project sites were located in remote communities in Edo State. In addition, given the rising scourge of insecurity, which manifests through kidnapping and violent killings, communities needed to be selected based on their level of safety and convenience to avoid or minimise the risks of harm to both the researchers and participants.

The interviews were guided by an interview guide concerning questions for the CSDA officials and community members. The questions bordered on ascertaining the degree of participation in projects and mechanisms for project sustainability in rural communities in Edo State. Throughout the interview process, the researchers considered participants' socio-economic backgrounds, such as education, sex, religion, occupation, and years of experience, because these characteristics can shape individuals' experiences, worldviews, perceptions and levels of participation in community development projects. In addition, direct observation was used to assess the reported projects in each surveyed community. This was important to verify the authenticity of the project reports and ascertain their standard, quality, size, actual location, possible costs, and maintenance levels.

Table 1. The selected Senatorial districts, local government areas, and communities

Senatorial Districts	**LGAs**	**Communities**
Edo North	Akoko-Edo	Ekpedo, Ekpe, Uneme-Osu and Makeke
	Etsako-West	Ikholo, Iyamoh, Afashio and Ikabigbo
Edo Central	Esan Central	Eguare-Ewu, Agua, Ugbegun and Idunwele.
	Esan West	Eguare, Ogwa, Ugiogba and Emaudo.
Edo South East	Ovia North East	Uhiere, Utekon, Okhunmwun and Ebvoneka
	Ikpoba-Okha	Evboriaria, Erediauwa, Uteh, and Ohovbe

Source: Field Survey (2023)

Ethical considerations were observed before the interviews commenced. Given the sensitivity of the subject matter, participants' identities were kept confidential. Participation was entirely voluntary, and participants were informed of the study's purpose. They were also assured of their right to withdraw at any stage of the interview process and to decline answering questions they considered detrimental to their personal and privacy rights.

The interviews were audio-recorded, and the recordings were destroyed after use. Only the authors had access to the information provided by participants. Field notes were also taken to capture observations relating to participants' verbal and non-verbal cues. Participants consented to the publication of their responses on the condition that their names or any other identifying information would not be disclosed. Although flexibility was allowed for insightful responses, the researchers ensured participants remained focused on the study's objective by guiding participants back to the relevant questions where necessary.

The Thematic Analytical Method (TAM) was adopted for data analysis. TAM is widely utilised across disciplines, including social sciences, psychology, sociology, and anthropology, as well as in fields such as the health sciences (Cernasev & Axon, 2023). It is a qualitative analytical technique that enables researchers to systematically organise, interpret and analyse complex datasets (Dawadi, 2020). The responses collected were organised into themes and analysed accordingly. The large dataset generated from the interviews was categorised into two broad themes corresponding to the study objective: community participation in the CSDP and the sustainability of CSDP projects. In analysing each theme, direct quotations from participants were included where necessary to enrich the discussion and provide empirical support for the findings.

4. Finding and Discussions

4.1 Community Participation

During the study, it was discovered that the communities participated in the CSDPs by being involved in decision-making processes and implementing project plans.

4.1.1 Decision-making process

As gathered by the researchers, the communities participated in decision-making regarding the nature of the projects that met their needs. With the assistance of the CSDA officials, committees comprising mainly community members, regardless of gender, religion, or socioeconomic status, were set up. These committees served as go-betweens between the state, represented by the CSDA, and the communities. A series of community meetings was held across the communities to ascertain the most important need (s) to be addressed before the CSDA's approval. The meetings were held at community town halls and other open places agreed upon by the community members. Each project was deliberated upon, even at the family level, before being articulated at the committee level. As observed, the projects included boreholes, lock-up stores, town halls, police stations, rural electrification, schools, and maternity centres.

However, a disturbing trend was the dominance of men in the committees. Patriarchy (male domination) is a phenomenon that has continued to hold Nigerian society back despite several findings showing that women are active agents of development. In Nigeria, patriarchy manifests through socio-cultural norms and traditional institutions that assign leadership and decision-making roles to men, while subordinating women to peripheral roles in both public and private spheres. While the concept is yet to gain local nomenclature in Edo State and elsewhere in Nigeria, it is a constructed reality that places men as superior to women. In communities, it is not difficult to see men assume decision-making roles, such as the council of elders and the council of chiefs, as well as existing structures that prevent women from inheriting property. As observed in the study, most committees with at least seven members were all-male, while a few had only one woman. When asked the reason for this trend, the chairman of Ikhollo community, who also doubled as the chairman of the committee, had this to say:

"When it comes to community deliberations, women are often reluctant to participate. They always think it is an all-men affair. I believe that lack of exposure and a low level of education are factors that hinder their full participation. For instance, the financial secretary of the project committee was a woman. She is bold and educated, which possibly must have motivated her voluntary participation. Generally, there are few women like her in the community." (Participant 34)

This view was also alluded to by another participant, a woman who served as the financial secretary of the project committee in Ikhollo Community:

"I think our women always believe that politics and community meetings are all about men. This was indeed the case in the past, but nowadays, men are willing to accommodate

women; however, the latter seem unwilling, maybe because of fear, lack of confidence, and/or lack of interest." (Participant 29)

These excerpts show that, contrary to the popular insinuation that patriarchy, poor socioeconomic conditions, and lack of support are solely responsible for women's reluctance to participate in the decision-making processes, other factors, such as lack of confidence, unwillingness, and resignation to fate, are also important. According to Kebede (2024) and Muktasha (2023), factors such as chauvinism, low socioeconomic status, negative perceptions, lack of confidence and lack of interest can inhibit at the local level.

Women are critical agents of rural development, particularly in food security, poverty reduction, and sustainable development (Ali & Kamraju, 2023). Rural development is a key dimension of development that requires concerted efforts from both men and women. Given the diverse challenges associated with improving education, the rural economy, healthcare, mortality rates, infrastructure, and rural security, the role of women becomes particularly significant (Etebom & Fagbewesa, 2024). According to the International Fund for Agricultural Development [IFAD] (2011), development projects achieve better outcomes when women's roles and needs are incorporated into project design from the outset. Furthermore, empowering women produces positive outcomes, including improved health and education for themselves and their families (Ali & Kamraju, 2023).

The authors observed that most of the executed projects appeared to reflect men's interests, including lock-up stalls, markets, rural electrification, schools, and boreholes. Women appeared to be fringe beneficiaries of these projects, while men seemed to derive the greatest benefits. Except in the Uhiere community, women-centred projects, such as maternity centres, which would have directly addressed women's unique challenges, were scarcely mentioned despite the alarming rate of maternal mortality, particularly during childbirth, resulting from the inadequate availability of maternity facilities. Consequently, the need to ensure women's active participation in decision-making at the rural level should be given serious consideration for effective rural development.

4.1.2 Implementation Proces

The implementation phase of rural development is crucial because it not only translates plans into action but also ensures the success of the entire development process. It essentially emphasises pooling resources, implementing policies, and ensuring that projects are delivered on time to the target population (Amina Ogu, Oranekwu, & Okoye, 2025). The communities not only participated in the decision-making processes but also oversaw the implementation of the agreed-upon projects. The communities were involved in the implementation stage in two ways: by providing funds through counterpart funding and labour.

Counterpart funding is a cost-sharing initiative in which communities and the government share project costs. In this case, the communities are expected to contribute 10 per cent of the total project costs while the government provides the remainder (Pallage & Robe, 2015). The aim is to promote ownership and commitment. As found, the project committees ensured that this fund was raised. Also, as observed in most of the communities visited, CSDP signposts strategically stated the cost of any project: the amount provided by the state government and

the amount provided by the communities as counterpart fund. This could be attributed to the new CSDP strategy of including detailed expenditure information on its signposts as a mark of transparency. Nevertheless, this was mostly observed in communities in Akoko-Edo and partly in Etsako-West than in other communities. On the other hand, it was gathered that the meaning of counterpart funding differed significantly from community to community. For instance, in Akoko-Edo LGA, it was found that in communities such as Ekpedo and Uneme-Osu, there were levies to raise the counterpart fund. In Ikhollo Community, the Chairman had this to say in this regard:

"There are two projects: lock-up stores and a town hall. In the lock-up stores, I cannot remember anybody telling us to pay any counterpart fund. All that the community did was to provide a piece of land for the project. However, for the town hall, the community paid one million naira, and I supervised the collection. Everybody in the community was levied for it." (Participant 34)

In other communities, such as Afashio, Makeke, and Enwan, the people provided free labour during the execution as part of their counterpart fund. A woman from the Afashio community had this to say in this regard:

"My brothers (referring to the researchers), I don't think we paid anything like money for the borehole (water scheme). I heard from my husband that what the community provided was labour. The community was not paid for the labour." (Participant 40)

The use of the term *labour* does not suggest that community members were employees or workers receiving wages or salaries. Instead, it refers to the voluntary contribution of time and physical effort during project implementation. Such voluntary labour is common in rural Nigerian communities where collective effort is often interpreted as a demonstration of shared ownership, commitment and responsibility for development projects.

Yet, in other communities across the surveyed LGAs, such as Ekpe, Uhiere, Eguare, and Agua, philanthropists provided the counterpart fund for the respective communities. A participant, the Prime Minister of Ekpe Community, corroborated this assertion thus:

"…after voting, we chose the town hall with lock-up stores and a water scheme. Thereafter, CSDP asked us to deposit one million naira as a counterpart fund before the project could commence. It was the former chairman of Akoko-Edo LGA who paid the counterpart fund for us. We are grateful to him." (Participant 15)

Therefore, across the communities, those that provided their counterpart fund through monetary contributions constituted 38 per cent, philanthropy 17 per cent, and manual labour 45 per cent. By senatorial districts, more communities in Edo North provided their counterpart funding through philanthropic support due to a higher concentration of prominent individuals than in other communities in Edo South and Edo Central. Meanwhile, more communities in Edo South contributed their counterpart funding through manual labour than the communities in Edo North and Edo Central.

In addition to counterpart funding, the communities also provided labour. This type of labour differs from the previous one, which was meant to offset the counterpart fund. This

labour involved communities engaging in every aspect of the project services, and the labourers were paid for the services rendered. The projects discussed in this study were implemented between 2009, when CSDP was initiated in Edo State and 2021. As part of CSDP's core mandate**,** the communities were required to provide the labour services needed to implement any approved project. It is believed that through this inclusive strategy, the communities would follow up on every aspect of the project execution. It is also seen as a strategy in empowering communities. Participants agreed that community members were adequately engaged throughout project execution. A participant in the Emaudo community had this to say in this regard:

"I am one of those who benefited from the project (town hall). From digging the foundation to roofing, we provided the required services, and we were duly paid for them. Women were engaged in fetching water. Tipper drivers were engaged in providing hardcore materials. Everybody was involved in one way or another." (Participant 83)

In all three senatorial districts, communities provided all the labour needed. This finding is consistent with that of Lucas & Targema (2015) that out of 95% of respondents who participated in the rural development projects, 50% contributed manual labour, while 20% contributed materials or working tools. By manual labour, this study refers to the voluntary or paid physical work undertaken by community members during project implementation. It includes clearing, cleaning, masonry, roofing, moulding of blocks, fetching water, mixing of concrete and transportation of construction materials. Participatory development entails engaging skilled rural residents to contribute their skills, such as moulding blocks, supplying sand, gravel, chippings and other building materials, and participating in masonry, roofing and other activities to complete projects (Riswan & Beegom, 2021). Others may provide security for the acquired materials to prevent theft.

Engaging communities in project execution by providing labour is a viable tool for capacity building. Capacity building has been defined as a process of developing and strengthening the skills, instincts, abilities, processes, and resources that communities need to thrive, adapt, and survive in a fast-changing world (Lopez & Pastor, 2015). Indeed, it seems that the originators of the idea of community participatory development envisaged a process not only for solving communities' needs but also for encouraging those with skills to contribute meaningfully to their development and in their respective communities (Zhang & Wang, 2024).

It should be noted that the labour contributions encompass both artisanal and professional skills. In the course of project execution, health professionals can provide health services; engineers can provide professional and technical expertise; lawyers and surveyors can provide guidance on the legal and environmental implications of such projects, and seasoned administrators can provide advisory services where necessary. Overall, every community member seems to have a role to play in implementing projects. This not only creates a sense of belonging but also fosters communal harmony as people with diverse skills interact in developing their communities (Pallage & Robe, 2015). As observed in the communities surveyed, the sense of fulfilment among community members resulting from their individual and collective contributions to project completion knew no bounds. In the

Ekpedo community, the village youths (those between 12 years and 40 years) were happy that the market stalls they contributed their labour to build were structurally stronger than those previously erected by politicians. A member of the youth unequivocally stated:

"You can see that I am happy because I supervised the market stalls. The ones built by politicians in this community were not constructed to the same standard, despite paying an overly huge amount, because they contracted them out to people outside this community. I am both a trader and an Okada rider, but I am also skilled in building. This has proven that we can do more than what outsiders can do, and we are happy with that." (Participant 12)

The multiplier effect of engaging community members in project execution was immense. For instance, during project construction, community members who were selling food, sachet water, snacks, and other edible items enjoyed significant patronage. Furthermore, the payments made to labourers not only increased their income base, but also increased the revenue base of the community and local government through taxes. This was evident when some labourers who participated in building the projects showed off the new motorcycles they bought and the new stalls they had rented from the pay they received. Some were able to complete their private houses that they started some years ago.

5. Sustainabilty of Projects

5.1 Implementation Proces

Although CSDP officers, in conjunction with local government authorities, were legally empowered to supervise and monitor the projects, the communities were also involved. As gathered from the participants, this was the most crucial stage of project implementation because it allowed them to observe and ensure that the approved projects were the same as executed. It enabled them to detect any possible diversion of projects or misappropriation of funds meant for the communities. In the communities, the projects were primarily monitored by the Community Project Management Committee (CPMC), which was composed of elected community members, including community leaders, youth representatives, women representatives, and other key stakeholders. These community members made regular visits to the construction sites, supervised and observed the standard of work. Their observations were reported to the CSDA and the relevant Local Government authorities. Apart from the formal committees, ordinary community members supervised the progress of work, given that projects were located within their communities. Their local knowledge of community needs, terrain and project requirements enabled them to identify deviations from approved plans more easily than external supervisors would.

Participants acknowledged that community-based monitoring promoted transparency and accountability, as contractors and project managers knew community members were monitoring their activities at every stage of project execution. By so doing, opportunities for misappropriation and embezzlement were significantly reduced. One of the participants had this to say in this regard:

"When the project commenced, we (the community members) were happy. However, all of a sudden, the nature of the project changed. It was initially approved as an open market because we lacked one here in Ikhollo. But it was later discovered that just a few lock-up stores

had very small spaces. We protested until the stores were expanded, and we monitored them to completion to avoid a recurrence of the previous experience." (Participant 38)

On the other hand, observations revealed that some community members lagged in monitoring project quality, leading to substandard or abandoned projects. Possible explanations for this include over-reliance on government authorities for supervision, inadequate financial resources to support monitoring activities, elite capture of project committees, weak community mobilisation and intimidation from government authorities. For instance, in Eguare-Ewu, it was observed that in an attempt to expand the existing maternity ward in the community, two more rooms were added. However, a lack of proper monitoring and supervision, coupled with the use of substandard roofing materials and inexperienced roofers, resulted in leaking buildings. A health assistant in the maternity ward had this to say:

"Initially, we were very happy with the development. But after the roofing work was completed, which was badly done, the leakages damaged many items in the maternity, including beds. If it starts raining, pregnant women and nurses on duty would be severely inconvenienced. It was a poorly executed project by the community, and nobody cared to supervise them when they were doing it." (Participant 59)

The responsibility for monitoring and supervising project execution is shared between the recipient communities and the government. Policy reversals, substandard projects, and the diversion of funds occur when monitoring and supervision are inadequate (Umurungi & Rusibana, 2021). Unfortunately, this is one of the major challenges confronting Nigeria. While projects may be initiated, corruption, lack of transparency, and weak community ownership undermine full implementation of such projects (Eja & Ramegowda, 2020). Oftentimes, the officials responsible for monitoring project execution engage in private ventures while neglecting the projects they are paid to oversee with taxpayers' money.

Information gathered from communities where supervision and monitoring were inadequate revealed that CSDA officials' failure to lead the monitoring process contributed to a lethargic attitude among community members. Those entrusted with leadership responsibilities should demonstrate commitment, integrity, and resilience to achieve project objectives.

4.2 Maintenance of the Projects

In all the projects surveyed, there was a remarkable level of maintenance by the communities across the three senatorial districts: Edo North, Edo Central and Edo South. The markets, schools, and lock-up stores observed were clean. However, with regard to the water scheme, the borehole largely operated depending on the communities' financial buoyancy. For instance, in most communities in the Edo North Senatorial District, boreholes were functioning because the communities had generator sets that pumped water during power outages. However, the researchers could not ascertain whether the generator sets were purchased with community donations or by the government. In other senatorial districts, particularly in Ovia North East, and in the Evboneka community, they were heavily dependent

on light to pump water. This means that any long-period power outage would definitely render the borehole dormant until the electricity supply is restored.

It can therefore be concluded that the communities were engaged in various rural projects by CSDP, participating in various ways, such as providing counterpart funding, providing labour, monitoring and supervising projects, and maintaining the project. This finding is supported by several studies that examined the extent to which rural communities participated in implementing the CSDPs (Yusuf & Adekunmi, 2020; Sidi et al, 2020). For instance, Yusuf & Adekunmi (2020) found that communities in Kwara State participated in CSDPs by attending meetings, making financial contributions (counterpart funding), choosing projects, sharing information and experiences, volunteering for manual labour, and evaluating projects.

As a result of community participation, the communities sustained the projects through regular maintenance and upkeep, voluntary community contributions, regular utilisation after completion, and protection from vandalism or theft. For emphasis, project sustainability is a shared responsibility of both government and communities. In this way, responsibilities can be shared according to the parties' capacities. For instance, communities may not be able to bear certain financial responsibilities, just as the government is not expected to monitor the continuous use and functioning of projects. It was discovered that communities sustained the projects through monitoring and maintenance. Depending on the type of project, maintenance activities ranged from financial contributions to cleaning and clearing exercises in town halls, market stalls, and schools, to fixing damaged project parts. For instance, in the Makeke community, youths were seen wielding machetes, clearing grass surrounding the town hall premises. It was gathered that this is done on the last Saturday of every month. In Ikhollo, the rental income from the stalls was used to repair them whenever damage occurred. One of the participants had this to say in this regard when asked whether his community sustained the projects:

"Yes, we sustain it. We usually contribute money to so many things in the community. Once those things are done, the remainder is kept in the community purse for future purposes. I believe that, given the manner in which we suffered before getting the project done, no one would want it to deteriorate." (Participant 91)

From this response, it appeared that the communities planned for project sustainability through community purses. Whether the funds would sustain the projects in the long term remains unclear. While there has been some form of maintenance of executed projects in most communities, it remains unclear how changes in government or community institutions may affect project sustainability. When governance becomes overly dependent on individuals, it may affect the development objectives of the incoming government, or the institutions may lack the effectiveness of the previous administration (Chiamogu, 2020). It is more complex when both the past and present governments are engulfed in a battle for supremacy, thereby creating fertile ground for sabotage, patronage, policy manipulation, resource diversion, or policy reversal.

Sabatier (1998) explained policy success or failure in terms of coalition dynamics and external factors. In the Advocacy Coalition Framework, the author argued that virtually all

political systems and sub-systems are involved in various coalitions at all levels within and outside a country. External factors such as the structure of the constitution, socio-cultural values, and natural resources can be critical determinants of the success or failure of any public policy. Coalitions usually have deep core beliefs that unite them, as well as their resistance to change. Once core beliefs are resistant to change, policy change becomes unlikely.

In the context of Nigeria, Sabatier's argument merits consideration. Programmes and policies are often initiated in respect to political exigencies or the government in power (Bolarinwa & Osuji, 2022). Often, policy distribution is influenced by primordial considerations (Ugbudu, 2017) rather than by the exigencies of time and need. It is important to acknowledge the widespread implementation of CSDPs across the country. However, it remains unclear whether it is a temporary departure from the longstanding etnicisation of project allocation.

Coalitions are crucial to rural development when they act in accordance with the national interest, rather than ethnic, class, religious, and cultural affiliations (Mitlin, 2022). In the context of this study, coalitions comprised officials of the CSDA and Local Government authorities, Community Project Committee members, political elites, traditional rulers, youth representatives and women representatives. The key actors worked together, beginning from project planning, fund allocation, implementation, monitoring and supervision. Their activities were guided by the CSDP rules and guidelines, which emphasised community participation, inclusiveness, transparency, accountability and sustainability. The effectiveness of the coalitions produced projects that aligned with the communities' felt needs, although there were variations among communities in commitment, resources and leadership capacity. Consequently, project sustainability is guaranteed when all stakeholders, including the people irrespective of socio-cultural backgrounds, are involved in every phase of the project implementation *(*Zikargae, Woldearegay, & Skjerdal, 2022*)*. A bottom-up approach can be mere rhetoric to attract attention within and without, unless it is backed by a serious commitment to involve all stakeholders from policy initiation through the monitoring phase.

Parkinson (2004) supports this argument, arguing that every successful policy is based on the deliberative process within institutional frameworks. By this, he acknowledged the importance of institutions in championing rural development and development at all levels. Parkinson proposes adopting gatekeepers during the deliberative process. Again, while this might sound plausible, caution is necessary when this is applied in contexts such as Nigeria. Gatekeepers can function effectively in a setting where collective interest is paramount (World Economic Forum, 2021). However, when politics determine the process of policy initiation and execution, gatekeepers may deliberately or forcefully align with the most influential faction within a group for economic, social, or political reasons (Raleigh & Carboni, 2023).

Deliberation is a process aimed at formulating appropriate policies, identifying possible challenges in project execution, and suggesting ways to remedy them (Abelson, Forest, Eyles, Smith, Martin, & Gauvin, 2003). Institutions such as CSDA, traditional rulers, community-based institutions (CBOs), non-governmental organisations (NGOs), local government-based institutions, security agencies, civil society groups, women and youth associations, and other

relevant groups can sustain rural projects through collective deliberations. Projects are more likely to be sustained when participatory development approaches are adopted.

While it was clear how communities intended to sustain the projects, the same could not be said of the government, represented by the CSDA. It appears that the concept of sustainability is equated with the programme's continuation. For instance, one of the staff members of the CSDA had this to say in this regard:

"The sustainability of the programme is what I cannot ascertain for now, but it is possible if the relevant stakeholders are willing to continue with it. The programme is intended to continue indefinitely, even though the World Bank has pulled out." (Participant 1)

From the excerpt above, it can be concluded that sustaining CSDP in Edo State and indeed across the federation is uncertain, given the World Bank's withdrawal as a major funding provider for projects (Odishika & Adedeji, 2016). The World Bank is a participating agency that provides capital in the form of loans to the states. To that extent, its exit from the programme, in addition to the perennial fiscal challenges of the Nigerian government at the federal, state, and local government levels, makes it doubtful if the programme can be sustained.

This is not peculiar to Nigeria; developing countries face the challenge of programme sustainability for many reasons. While they might be given credit for creating policies that deserve commendation for their intended objectives, the actual implementation and programme sustainability suffer some hiccups. Scholars have attributed policy failures in Africa, including Nigeria, to pervasive corruption, bureaucratic bottlenecks, under-funding, primordial sentiments, and lack of political will (Bolaji, Grey & Campbell-Evans, 2015; Parkinson, 2004; Sabatier, 1998; Rose, 1990). For instance, Rose (1990) argued that the success or failure of policies is influenced by the succession of governments and changes that occur afterwards. Politicians often inherit policies and commitments from previous governments. Most of the time, these policies are non-negotiable as new governments are not afforded time to choose whether to implement the inherited policies. Moreover, institutions tend to institutionalise previous governments' policies, thereby creating a foundation for policy failure (Rose, 1990).

While Rose's argument is insightful, it appears to reflect political realities in advanced countries. This is because, in developing countries like Nigeria, policy discontinuity appears commonplace. Given the zero-sum political mentality of politicians (Obadare, 2019) and a lack of quality leadership and long-term planning (Campbell, 2016), any new government is usually quick to condemn and abandon inherited policies, regardless of their impact on public interest. Furthermore, due to the personalisation of developmental projects and governance systems in most developing countries for public recognition (Chiamogu, 2020), continuing and completing previous policies is usually seen as giving undue credit to the previous government, particularly when the government is in opposition. Personalisation of development projects and governance systems derives incentives from public applause, and the public often reinforces this perception. Therefore, any new government seeks to create a new system of policies that would legitimise its existence, earn it re-election, and suffocate the opposition (Okereke, 2017). Ideally, it is a complex system in which leaders seek to balance

their future public image and personal interests. Consequently, it is doubtful whether Rose's argument could hold in the context of a complex society like Nigeria.

6. Conclusion

This study set out to demonstrate that community participation could foster project sustainability. In a country like Nigeria, where sustaining projects in rural areas is a major challenge due to the personalisation of governance, corruption, exclusion of critical stakeholders, and weak institutions, the bottom-up approach to rural development is key. The major challenge confronting rural areas in Nigeria is poverty and poor infrastructure. Sometimes, these challenges are peculiar when compared to those in urban settings, suggesting that communities must be involved in their development. Previous attempts at rural development in Nigeria prioritised the interests of certain political elites, neglecting the target population. The establishment of the CSDP was designed to address these issues.

As the study has shown, the adoption of community-led rural development was evident in the communities at the planning and implementation stages of projects. Consequently, this participation promoted project sustainability, as evidenced by fundraising efforts, clearing activities, and repairs of damaged projects for the continued benefits of the communities. Whereas the government had no clear-cut plan for sustaining the projects, the communities had a clear path to sustain them. This clearly shows that community participation is an indispensable tool for rural development in Nigeria. Even though men dominated the project planning and implementation phases due to women's poor socio-economic backgrounds and lack of self-confidence, the projects were seen to be beneficial to all.

The findings of this study might not represent the views of the entire population of Edo State, as the sample utilised was small. As such, readers should be cautious with over-generalisation. Moreover, while the use of interviews was commendable as it elicited in-depth responses, additional methods, such as questionnaires, could help reach a larger proportion of the population within the shortest period. Truthfully, time and financial constraints were largely responsible for the researchers' choice of methods and study location. The researchers encourage future researchers to extend the study to other parts of Nigeria to unravel similarities and differences in community participation and project sustainability. This would help take proactive steps to strengthen policy for improved rural development.

7. Recommendations

The following recommendations are made based on the study's findings. Firstly, there should be a framework to monitor and report whether communities participate in rural projects in Nigeria. Since the community approach has demonstrated that it is a vital approach to rural development, it is important that sustained monitoring by groups, institutions, or individuals, such as civil society groups, whistle-blowers, traditional rulers, and the media, be encouraged by the Nigerian government to report potential elite capture or diversion of projects and funds. The authors believe that when these bodies are integrated into the project accountability reporting system, recurring rural corruption that undermines rural development will be exposed and tackled.

Secondly, there should be increased advocacy for greater women's participation in implementing community projects. Possibly, a certain quota should be reserved for women to be filled compulsorily by them. This is because systemic and cultural barriers may continue to deter their full participation, a problem that can be addressed through an effective quota system. It is believed that with improved advocacy and the socio-economic well-being of community members, more women would have access to education, jobs, and finances necessary to motivate their participation. Project sustainability requires a concerted effort by both genders and should therefore be encouraged.

Lastly, the government should devise a clear-cut strategy to sustain the projects they executed. This can begin with at least a quarterly, on-the-spot assessment of the conditions of executed projects. Agreed that communities should bear part of project sustainability; however, highly capital-intensive rural projects may require maintenance, which only the government can shoulder. Furthermore, when the government is involved, communities will be motivated to monitor, evaluate, and maintain projects. An efficient community-state communication system should be established to enable the government to intervene promptly when required. As commendable as the projects observed were, without robust, sustainable efforts from the government, the communities might become worse off in terms of poverty and infrastructural deficit.

REFERENCES

Abelson, J., Forest, P.G., Eyles, J., Smith, P., Martin, E., & Gauvin, F.P. (2003). Deliberations about Deliberative Methods: Issues in the Design and Evaluation of Public Participation Processes. Social Science and Medicine, 57(2), 239-251.

Aga, D. A., Noorderhaven, N., & Vallejo, B. (2018). Project Beneficiary Participation and Behavioural Intentions Promoting Project Sustainability: The Mediating Role of Psychological Ownership, Development Policy Review, 36(5), 527-546

Ahmed, A. O., Gbadebo, O. V., Iselobhor, F., & Tokede, A. M. (2021). An Appraisal of Nigeria's Rural Development Programmes and Policies: Lessons Learnt and the way forward. FUTY Journal of the Environment, 15(1): 83-92.

Ali, M.A. & Kamraju, M. (2023). The Role of Women in Rural Development Programs. ASEAN Journal of Community Service and Education, 2(1), 67-84

Amina ogu, O., Oranekwu, D. C., & Okoye, A. T. (2025). The Effect of Public Policy Implementation on Community and Rural Areas Development in Nigeria. International Journal of Research and Innovation in Social Science, IX(III), 1350–1364. https://doi.org/10.47772/IJRISS.2025.90300107

Ben-Eli, M. (2015) Sustainability: Definition and five Core Principles a New Framework the Sustainability Laboratory New York, NYinfo@sustainabilitylabs.org |www.sustainability labs

Bolaji, S. D., Gray, J. R., & Campbell-Evans, G. (2015). Why do Policies Fail in Nigeria? Journal of Education and Social Policy, 2(5), 57-66.

Bolarinwa, O.F.O. & Osuji, U.C. (2022). Political Elitism in Nigeria: Challenges, Threats and the Future of Citizenship, Open Journal of Philosophy, 12(1), 105-122. doi: 10.4236/ojpp.2022.121007

Campbell, J. (2016). Poor Leadership in Africa, Council on Foreign Relations (CFR), October 26. https://www.cfr.org/blog/poor-leadership-africa

Cernasev, A., & Axon, D. R. (2023). Research and Scholarly Methods: Thematic Analysis. Journal of the American College of Clinical Pharmacy, 6(7), 751–755. https://doi.org/10.1002/JAC5.1817

CSDP Project Implementation Manual (2019). Community and Social Development Project (CSDP): At the State and Community Levels. Retrieved on Delivery from State Agency

Chiamogu, A.P (2020). Personalization of Powers and Citizens' Disempowerment in Nigeria, Omor Renaissance, 1(2). https://ezeanaukwu.com/blog/index.php/2020/12/18/personalization-of-powers-and-citizens-disempowerment-in-nigeria/

Dawadi, S. (2020). Thematic Analysis Approach: A Step by Step Guide for ELT Research Practitioners. Journal of Nelta, 25, 62-71.

https://doi.org/10.3126/nelta.v25i1-2.49731

Eja, K.M. & Ramegowda, M. (2020). Government Project Failure in Developing Countries: A Review with Particular Reference to Nigeria, Global Journal of Social Sciences, 19: 35-47

Etebom, J. M. & Fagbewesa, O. E. (2024). The Roles of Women in Nigeria's Quest for Rural Economic Development: A Case Study of Ife Central Area, Osun State, International Journal of Research and Innovation in Social Sciences, 8(7), 2769-2782.

International Fund for Agricultural Development [IFAD] (2011). Women and Rural Development. https://www.ifad.org/documents/d/new-ifad.org/women-and-rural-development-pdf

Kebede, A. (2024). Opportunities and Challenges of Women's Participation in Decision-Making at Local Government Administration: The Case of Debre-Tabor City Administration, South Gondar Zone, Amhara Regional State, Ethiopia. Authorea Preprints. https://doi.org/10.31124/ADVANCE.10048160.V3

Klöpffer, W. (2003). Life-Cycle Based Methods for Sustainable Product Development. The International Journal of Life Cycle Assessment, 8(3), 157-159. doi: 10.1007/bf0297846

Lopez, M. & Pastor, R. (2015). Development in Rural Areas through Capacity Building and Education for Business, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 197, 1882 – 1888

Lucas, J.M. and Targema, T.S. (2015). Community and Social Development Project (CSDP) and Poverty Alleviation in Nigeria: The Participatory Communication Approach, International Journal of Development Strategies in Humanities, Management and Social Science, 5(1), 1-16

Lucky, O. O. (2016). Significance of Community Participation in Rural Development. International Journal of Agriculture and Earth Science, 2(2). Retrieved May 16, 2025, from www.iiardpub.org

Marzo, R.R, Chen, H.W.J, Anuar, H, Abdul Wahab, M.K, Ibrahim, M.H, Ariffin, I.A, Ahmad, A.I, Kawuki, J. & Aljuaid, M. (2023), Effect of Community Participation on Sustainable Development: An Assessment of Sustainability Domains in Malaysia. Front. Environ. Sci. 11, 1268036. doi: 10.3389/fenvs.2023.1268036

Mia, M.T., Islam, M., Sakin, J., & Al-Hamadi, J. (2022). The Role of Community Participation and Community-Based Planning in Sustainable Community Development. Asian People Journal, 5(1), 31-41.

Mitlin, D. (2023). The Contribution of Reform Coalitions to Inclusion and Equity: Lessons from Urban Social Movements, Area Development and Policy, 8(1), 1-26, DOI: 10.1080/23792949.2022.2148548

Muktasha, M.D. (2023). Determinants of Women's Participation in Family Decision-Making Process in Bangladesh: Statistical Analysis. Journal of Hunan University Natural Sciences, 50(6). https://doi.org/10.55463/ISSN.1674-2974.50.6.14

Obadare, E. (2019). Nigeria's Two Decades of Zero-Sum Democracy, Africa, 118 (808), 163-168

Odishika, V. A & Adedeji, O. (2016). Community Driven Development (CDD) and Rural poverty Alleviation in Nigeria: A Bottom-up Development Approach. Sociology and Anthropology 4 (6), 439-443

Okafor, G. & Chikalipah, S. (2021). Estimating the Effect of Terrorism on Agricultural Production in Nigeria, African Development Review, 33, 703–714.

Okereke, O.C. (2017). Causes of Failure and Abandonment of Projects and Project Deliverables in Africa, PM World Journal, 6(1), 1-16.

Pallage, S., & Robe, M. A. (2015). Counterpart Funding Requirements and the Foreign Aid Procyclicality Puzzle. Oxford Review of Economic Policy, 31(3–4), 462–480. https://doi.org/10.1093/OXREP/GRV035

Parkinson, J. (2004). Why Deliberate? The Encounter between Deliberation and New Public Managers. Public Administration, 82(2), 377- 380.

Raleigh, C. & Carboni, A. (2023). Subnational Authority and Political Alignment in African States, Democratization, DOI: 10.1080/13510347.2023.2201495

Riswan, M. & Beegom, B. (2021). Participatory Approach for Community Development: Conceptual Analysis. http://ir.lib.seu.ac.lk/bitstream/123456789/5529/1/SOCIOLOGYAND%2001.pdf

Rose, R. (1990). Inheritance before Choice in Public Policy. Journal of Theoretical Politics, 2(3), 264-267.

Sabatier, P. (1998). The Advocacy Coalition Framework, Revisions and Relevance for Europe. Journal of European Public Policy, 5(1), 99- 103.

Santander (2023). What is sustainability? Definition, Types and Examples. https://www.santanderopenacademy.com/en/blog/what-is-sustainability.html

Shetunyenga, N. N. T. (2024). The Value of Community Participation in Rural Development. Open Journal of Social Sciences, 12, 520-533. https://doi.org/10.4236/jss.2024.128031

Sidi, S.H; Hashim, A; Abubakar, B.Z; Ladebo, O.J; Uthman, A.A. & Yelwa, F.J. (2020). Effect of Participation in Community and Social Development Project on Rural Livelihood Enhancement in North West, Nigeria, International Journal of Environment, Agriculture and Biotechnology (IJEAB), 5(1): 31-41

Spyromitros, E., & Panagiotidis, M. (2022). The Impact of Corruption on Economic Growth in Developing Countries and a Comparative Analysis of Corruption Measurement Indicators. Cogent Economics and Finance, 10(1). https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2129368;WEBSITE:WEBSITE:TFOPB;JOURNAL:JOURNAL:REFR20;PAGEGROUP:STRING:PUBLICATION

Suleiman, U.Y., Daura, A.H., & Liberty, F.S. (2023). Public Policy Inconsistency and Economic Development in Nigeria, UBS Journal of Business and Economic Policy, 1(3), 148-160

Thomas, C. F. (2015). Naturalizing Sustainability Discourse: Paradigm, Practices and Pedagogy of Thoreau, Leopold, Carson and Wilson: Ph.D. Thesis: Arizona State University

Ugbudu, M.I. (2017). Ethnicity, Policy Choice and Implementation in Nigeria: A Discourse on Ranch Grazing, Social scientia Journal of the Social Sciences and Humanities, 2(3), 61-73

Ugwu, A.N. and Aruma, E.O. (2019). Community Participation as a Tool for the Promotion of Sustainable Community Development, International Journal of Community and Cooperative Studies, 7(1), 1-10

Umurungi D. & Rusibana, C. (2021). The Effect of Monitoring and Evaluation on Project Performance, Global Scientific Journals, 9(11), 713-729

Wehn, U., & Almomani, A. (2019). Incentives and Barriers for Participation in Community-based Environmental Monitoring and Information Systems: A Critical Analysis and Integration of the Literature. Environmental Science and Policy, 101, 341–357. https://doi.org/10.1016/J.ENVSCI.2019.09.002

World Economic Forum (2021). The Role and Responsibilities of Gatekeepers in the Fight against Illicit Financial Flows: A Unifying Framework,

Yusuf, O.J; Adekunmi, A.O. & Ayanda, I.F. (2020). Community Participation and Sustainability of the Community and Social Development Projects in Kwara State, Nigeria, Journal of Agricultural Extension, 24 (1), 138-147

Zhang, Z. & Wang, L. (2024). Influence of Perceived Value of Rural labour in China on the Labourers' Willingness to return to their Hometown: The Moderating Effect of Social Support, International Journal of Agricultural Sustainability, 22(1), 1-18

Zikargae, M.H., Woldearegay, A.G., & Skjerdal, T. (2022). Assessing the Roles of Stakeholders in Community Projects on Environmental Security and Livelihood of Impoverished Rural Society: A nongovernmental Organization Implementation Strategy in Focus. Heliyon, 8(10), e10987. doi: 10.1016/j.heliyon.2022.e10987

STRUKTUR INTELEKTUAL PENELITIAN *VISUAL POLLUTION* DAN *PERCEIVED AUTHENTICITY* PADA KAWASAN *URBAN HERITAGE*: ANALISIS BIBLIOMETRIK

[1]**Muhammad Kemal Basthulbirri**
Universitas Brawijaya
kemalbasthulbiri@gmail.com
[2]**Jenny Ernawati**
Universitas Brawijaya
jenny_ernawati@ub.ac.id
[3]**Herry Santosa**
Universitas Brawijaya
herrysantosa@ub.ac.id

Keywords:
Visual pollution ; perceived authenticity; urban heritage; bibliometrics, literature mapping;

Abstract
This study aims to map the intellectual, social, and conceptual structure of the literature on visual pollution and perceived authenticity in the context of urban heritage, as well as to identify research gaps and an integrated research agenda. Using a bibliometric approach, data were retrieved from the Scopus database through two separate search streams: (1) visual pollution + heritage (381 documents) and (2) perceived authenticity + heritage (412 documents). After deduplication, 818 unique documents (1987–March 2026) were analyzed using Biblioshiny, covering publication trends, key actors, collaboration networks, co-citation, and keyword co-occurrence. The results show rapid publication growth over the past decade, with an annual growth rate of 8.71%, dominated by Sustainability (Switzerland) and the Journal of Heritage Tourism. Research on perceived authenticity possesses a strong intellectual foundation rooted in tourism studies, whereas visual pollution literature is scattered across architecture and urban planning disciplines without a centralized foundational corpus. Collaboration networks are fragmented between the two domains. Conceptual mapping reveals two main clusters: (1) visual impacts and authenticity, and (2) heritage tourism and perception. The conceptual mapping reveals two main clusters and indicates deep learning as an emerging theme in the recent period. The study concludes that cross-disciplinary integration is urgently needed through the development of unified theoretical frameworks, simultaneous measurement instruments, and the application of

digital technologies to bridge visual pollution and perceived authenticity research in sustainable urban heritage management.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan memetakan struktur intelektual, sosial, dan konseptual literatur tentang *visual pollution* dan *perceived authenticity* dalam konteks *urban heritage* serta mengidentifikasi kesenjangan dan agenda riset terintegrasi. Menggunakan pendekatan bibliometrik, data diambil dari database Scopus dengan dua jalur pencarian terpisah: (1) *visual pollution* + *heritage* (381 dokumen) dan (2) *perceived authenticity* + *heritage* (412 dokumen). Setelah penghapusan duplikat, diperoleh 818 dokumen unik (1987–Maret 2026). Analisis dilakukan dengan Biblioshiny meliputi tren publikasi, aktor kunci, kolaborasi, co-citation, dan co-occurrence kata kunci. Hasil menunjukkan pertumbuhan pesat publikasi dalam dekade terakhir dengan tingkat pertumbuhan tahunan 8,71%, didominasi jurnal *Sustainability (Switzerland)* dan *Journal of Heritage Tourism*. Penelitian tentang *perceived authenticity* memiliki landasan intelektual yang kokoh dalam pariwisata, sementara *visual pollution* tersebar dalam disiplin arsitektur dan perencanaan kota tanpa karya fondasional yang terpusat. Jaringan kolaborasi terfragmentasi antara kedua domain. Pemetaan konseptual mengungkap dua klaster utama: (1) *visual impacts* dan *authenticity* serta (2) *heritage tourism* dan *perception*. Tema *deep learning* muncul sebagai fokus baru pada periode terkini, yang berpotensi menjembatani pengukuran objektif *visual pollution* dengan persepsi subjektif pengunjung. Studi ini menyimpulkan perlunya integrasi lintas disiplin melalui pengembangan kerangka teoretis terpadu, instrumen pengukuran simultan, dan pemanfaatan teknologi digital untuk menjembatani kajian *visual pollution* dan *perceived authenticity* dalam pengelolaan kawasan warisan perkotaan yang berkelanjutan.

BRAWIJAYA JOURNAL of SOCIAL SCIENCE

Vol. 5, No. 2, 2026

DOI: https://doi.org.10.21776/ub.bjss.2026.005.02.5

Submitted: 2026-03-30
Accepted: 2026-07-04

1. Pendahuluan

Kawasan *urban heritage* memiliki peran strategis sebagai penanda identitas kota, memori kolektif masyarakat, dan penggerak ekonomi melalui *heritage tourism* serta *city branding* (Lak et al., 2020; Popescu et al., 2020). Di berbagai belahan dunia, pusat-pusat bersejarah dimanfaatkan untuk regenerasi ekonomi dan penguatan *place identity* (Cerisola & Panzera, 2024). Namun, kawasan ini bukan entitas statis. Urbanisasi, modernisasi, dan pariwisata massal mendorong transformasi fungsi dan bentuk, termasuk gentrifikasi serta *touristification* yang mengancam keaslian dan keberlanjutan lanskap bersejarah (Martínez, 2016; Sukwai et al., 2022). UNESCO melalui pendekatan *Historic Urban Landscape* (HUL) menegaskan bahwa kawasan *heritage* harus dikelola

secara dinamis dalam kerangka *change management*, bukan sekadar upaya membekukan masa lalu (García-Hernández et al., 2017).

Salah satu dampak paling kasatmata dari komersialisasi adalah proliferasi elemen visual baru seperti papan reklame, *signage* toko, modifikasi fasad modern, dan bangunan tinggi yang sering tidak terkendali sehingga menimbulkan *visual pollution* . *Visual pollution* didefinisikan sebagai akumulasi elemen visual buatan manusia yang berlebihan, tidak selaras, dan mengganggu keterbacaan lingkungan (Chmielewski, 2021; Gao et al., 2020). Dalam konteks *heritage*, bentuknya mencakup *signage* komersial mencolok yang menutupi fasad bersejarah (Kuceruka & Penēze, 2021), modifikasi fasad dengan material kontemporer (Alwah et al., 2020), kabel udara semrawut (Marcelo et al., 2021), serta bangunan terbengkalai yang menurunkan citra kawasan (Nestoriuc et al., 2024). Dampaknya tidak hanya estetis: polusi visual mengaburkan hierarki dan legibilitas *streetscape*, melemahkan identitas kawasan bersejarah, serta menurunkan kenyamanan dan apresiasi pengunjung terhadap nilai sejarah dan arsitektur (Borowiak et al., 2024; Voinea et al., 2024).

Di sisi lain, keberhasilan pelestarian *heritage* tidak cukup diukur dari keaslian fisik semata tetapi juga dari bagaimana pengunjung *merasakan* keaslian tersebut dengan yang dikenal sebagai *perceived authenticity*. *Perceived authenticity* merujuk pada penilaian subjektif individu terhadap keaslian suatu tempat, yang dibentuk oleh pengalaman pribadi, memori kolektif, dan latar belakang budaya (Azumah et al., 2021; Dai et al., 2021). Berbagai studi menunjukkan bahwa *perceived authenticity* yang tinggi berkorelasi positif dengan kepuasan pengunjung (Genc & Gulertekin Genc, 2023), penguatan *place attachment* (Fang & Ko, 2025), dan dukungan terhadap konservasi (Qiu et al., 2025). Dengan demikian, *perceived authenticity* menjadi indikator kunci keberlanjutan kawasan *heritage*, baik dari sisi pengalaman pengunjung maupun manajemen pelestarian.

Secara logis, *visual pollution* seharusnya mengganggu *perceived authenticity*: elemen visual yang tidak selaras mengalihkan perhatian dari detail arsitektur bersejarah, mengaburkan narasi sejarah, dan mengikis perasaan autentik (Marcelo et al., 2021; Mundher et al., 2022). Penelitian empiris mengonfirmasi bahwa papan reklame berlebih, signage yang semrawut, fasad modern yang tidak serasi, dan degradasi visual secara konsisten menurunkan kualitas visual, identitas tempat, serta pengalaman historis di kawasan warisan, bahkan beberapa studi menunjukkan bahwa hilangnya autentisitas warisan berdampak negatif pada kognisi budaya dan aktivitas sosial pengunjung (Shuxiao et al., 2024; Xie et al., 2024). Namun, sejauh mana hubungan ini telah dieksplorasi secara sistematis dalam literatur akademik masih belum jelas. Pencarian awal di database Scopus menunjukkan bahwa studi tentang *visual pollution* di kawasan *heritage* mencapai 381 dokumen, sementara studi tentang *perceived authenticity* mencapai 412 dokumen. Setelah kedua kumpulan dokumen tersebut digabung dan duplikat dihilangkan, diperoleh 818 dokumen unik. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun secara konseptual kedua topik saling terkait, hanya sebagian kecil dari keseluruhan literatur yang membahas keduanya secara simultan. Dengan kata lain, kedua domain penelitian cenderung berkembang di jalur terpisah dengan minim dialog lintas bidang.

Kondisi fragmentasi tersebut memerlukan pendekatan makro yang mampu memetakan struktur dan dinamika masing-masing domain secara komprehensif. Analisis bibliometrik menawarkan kemampuan untuk menganalisis ribuan dokumen secara kuantitatif, memvisualisasikan jaringan kolaborasi antarpeneliti, mengidentifikasi karya

paling berpengaruh, serta memetakan tema-tema utama dan evolusinya. Dengan metode ini, dapat diungkap tidak hanya apa yang telah diteliti tetapi juga bagaimana kedua domain berinteraksi atau justru terisolasi serta ke mana arah penelitian masa depan yang potensial.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan melakukan pemetaan bibliometrik guna mengungkap struktur intelektual penelitian tentang *visual pollution* dan *perceived authenticity* dalam konteks *urban heritage*. Secara spesifik, studi ini berusaha menjawab pertanyaan: (1) Bagaimana tren publikasi tahunan dan disiplin ilmu yang mendominasi kedua domain? (2) Siapa aktor kunci (penulis, institusi, negara) yang paling produktif dan berpengaruh, serta bagaimana pola kolaborasinya? (3) Apa karya-karya fondasional yang membentuk landasan intelektual masing-masing domain? (4) Apa tema-tema penelitian utama yang muncul dan bagaimana evolusinya? (5) Berdasarkan pemetaan tersebut, apa *research gap* utama dan bagaimana agenda riset terintegrasi yang dapat menjembatani kedua domain? Hasil pemetaan ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis berupa peta jalan literatur bagi peneliti, serta kontribusi praktis bagi perencana kota dan pembuat kebijakan dalam merancang intervensi visual yang lebih sensitif terhadap persepsi keaslian kawasan *heritage*.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan bibliometrik untuk memetakan struktur intelektual, sosial, dan konseptual literatur tentang *visual pollution* dan *perceived authenticity* dalam konteks *urban heritage*. Metode ini dipilih karena kemampuannya menganalisis ribuan dokumen secara kuantitatif, mengidentifikasi pola kolaborasi, menemukan karya paling berpengaruh, serta memetakan tema-tema yang berkembang.

Data diambil dari database Scopus pada Maret 2026. Pemilihan Scopus didasarkan pada cakupan literatur yang luas di bidang arsitektur, perencanaan kota, pelestarian warisan budaya, dan pariwisata, serta kelengkapan metadata untuk analisis bibliometrik (abstrak, kata kunci, afiliasi, dan referensi yang disitasi). Strategi pencarian dirancang untuk menangkap dua domain utama secara terpisah karena uji coba awal menunjukkan bahwa string pencarian gabungan tidak menghasilkan dokumen yang memadai. Berikut adalah strategi pencarian yang digunakan:

Jalur A (*Visual pollution + Heritage*)

(("*visual pollution* " OR "visual clutter" OR "outdoor advertising" OR "signage" OR "billboard" OR "facade modification" OR "commercial signage" OR "streetscape") AND ("heritage" OR "historic district" OR "historic urban area" OR "heritage corridor" OR "historic street" OR "conservation area" OR "historic city"))

Jalur B (*Perceived Authenticity + Heritage*)

(("perceived authenticity" OR "heritage authenticity" OR "authenticity perception" OR "objective authenticity" OR "constructive authenticity" OR "existential authenticity" OR "place authenticity") AND ("heritage" OR "historic district" OR "historic urban area" OR "heritage corridor" OR "historic street" OR "conservation area" OR "historic city"))

Pencarian awal menghasilkan 381 dokumen untuk Jalur A dan 412 dokumen untuk Jalur B. Pemisahan pencarian menjadi dua jalur ini dilakukan karena uji coba awal menunjukkan bahwa pencarian gabungan yang mensyaratkan ketiga kelompok kata kunci (*visual pollution* , *perceived authenticity*, dan *heritage*) muncul secara bersamaan menghasilkan jumlah dokumen yang terlalu sedikit untuk analisis bibliometrik yang

bermakna, terutama untuk analisis *co-citation* dan *co-occurrence* yang membutuhkan kumpulan dokumen (*corpus*) yang memadai. Pendekatan *multi-query* seperti ini telah banyak digunakan dalam penelitian bibliometrik, misalnya dalam studi (Lal et al., 2023) yang menggunakan empat belas kata kunci pencarian terpisah untuk meneliti deteksi patogen tanaman, serta penelitian tentang hidrogen (Mascia et al., 2025) yang menerapkan tiga strategi pencarian terpisah untuk menangkap dimensi tematik yang berbeda. Selain itu, pemisahan jalur memungkinkan analisis komparatif antara kedua domain, yang menjadi inti dari pertanyaan penelitian tentang fragmentasi literatur *visual pollution* dan *perceived authenticity*. Kemudian, kedua set data tersebut digabungkan menggunakan fitur *merge* di perangkat lunak Zotero yang secara otomatis mendeteksi dan menghapus duplikat. Setelah penghapusan duplikat, diperoleh 818 dokumen unik yang siap dianalisis.

Analisis bibliometrik dilakukan menggunakan Biblioshiny, antarmuka web dari paket *Bibliometrix* berbasis R. Teknik analisis yang diterapkan meliputi:

1. Analisis kinerja ilmiah – tren publikasi tahunan, sumber terproduktif, serta penulis, institusi, dan negara paling produktif.
2. Analisis kolaborasi – pemetaan jaringan *co-authorship* antar penulis, institusi, dan negara.
3. Analisis sitasi – identifikasi dokumen, penulis, dan sumber paling berpengaruh berdasarkan jumlah sitasi.
4. Analisis *co-citation* – untuk mengungkap struktur intelektual dan karya-karya fondasional.
5. Analisis *co-occurrence* kata kunci – untuk memetakan struktur konseptual dan tema-tema penelitian utama beserta evolusinya.

Dalam analisis *co-occurrence* kata kunci, ditetapkan ambang batas minimal kemunculan sebanyak lima kali untuk memastikan hanya tema-tema yang signifikan secara statistik yang dianalisis. Untuk analisis *co-citation*, dokumen disertakan jika menerima minimal 20 sitasi, sehingga karya-karya yang benar-benar membentuk landasan intelektual suatu bidang dapat teridentifikasi secara objektif. Normalisasi hubungan antar item dilakukan dengan metode *association strength* sebagaimana direkomendasikan oleh (Eck & Waltman, 2009), yang secara teoretis dan empiris terbukti paling sesuai untuk data ko-okurensi dalam analisis bibliometrik. Selanjutnya, klastering jaringan dilakukan dengan algoritma Louvain, sebuah metode deteksi komunitas yang diperkenalkan oleh (Blondel et al., 2008). Algoritma ini bekerja dengan mengoptimalkan nilai modularitas, yaitu ukuran yang menilai seberapa baik suatu jaringan terbagi ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki hubungan internal yang lebih padat dibandingkan dengan hubungan antar kelompok. Keunggulan algoritma Louvain terletak pada kemampuannya menangani jaringan dalam skala besar secara efisien serta tidak memerlukan penetapan jumlah klaster terlebih dahulu, karena struktur komunitas ditemukan secara hierarkis melalui pendekatan *greedy optimization*. Dalam penelitian ini, algoritma Louvain diterapkan pada dua tahap analisis: pertama, untuk mengelompokkan penulis berdasarkan pola kolaborasi dalam jaringan *co-authorship*; kedua, untuk mengelompokkan kata kunci yang sering muncul bersama dalam jaringan *co-occurrence*, sehingga teridentifikasi tema-tema penelitian utama yang menjadi fokus pembahasan. Dengan pendekatan terintegrasi ini, kedua domain literatur dianalisis secara terpisah maupun komparatif, sehingga fragmentasi dan potensi integrasi antara studi *visual pollution* dan *perceived authenticity* dapat diungkap secara empiris.

3. Hasil dan Pembahasan

Bagian ini menyajikan hasil pemetaan bibliometrik terhadap 818 dokumen yang terindeks Scopus dalam rentang waktu 1987 hingga Maret 2026. Analisis dilakukan untuk menjawab lima pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, meliputi: (1) dinamika publikasi tahunan dan disiplin ilmu yang mendominasi; (2) aktor kunci (penulis, institusi, negara) serta pola kolaborasi; (3) karya-karya fondasional yang membentuk landasan intelektual; (4) tema-tema penelitian utama dan evolusinya; serta (5) kesenjangan penelitian dan agenda riset terintegrasi. Setiap sub-bab menyajikan temuan utama yang didukung oleh visualisasi data dari Biblioshiny, disertai dengan pembahasan yang menghubungkan hasil dengan literatur terkait. Pemaparan dilakukan secara sistematis untuk mengungkap fragmentasi antara kedua domain penelitian yaitu *visual pollution* dan *perceived authenticity* sekaligus mengidentifikasi titik-titik temu yang berpotensi dikembangkan lebih lanjut.

3.1 Tren Publikasi Tahunan dan Dominasi Disiplin Ilmu

Analisis terhadap 818 dokumen yang terindeks Scopus dalam rentang waktu 1987 hingga Maret 2026 menunjukkan dinamika pertumbuhan yang signifikan, terutama dalam satu dekade terakhir. Gambar 1 menyajikan tren publikasi tahunan yang mengindikasikan adanya tiga fase perkembangan. Fase pertama (1987–2007) merupakan periode *embryonic* dengan jumlah publikasi tahunan rata-rata kurang dari lima artikel, menandakan perhatian akademik terhadap *visual pollution* dan *perceived authenticity* di kawasan *urban heritage* masih bersifat sporadis. Fase kedua (2008–2014) memperlihatkan peningkatan yang lebih konsisten, dengan publikasi tahunan mencapai sekitar 10–20 dokumen. Memasuki fase ketiga (2015–2026), pertumbuhan menjadi eksponensial: dari 26 dokumen pada 2015 melonjak menjadi 109 pada 2024 dan 151 pada 2025. Tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 8,71% mengonfirmasi bahwa kedua domain ini berada dalam fase pertumbuhan pesat, sejalan dengan meningkatnya kesadaran global akan pentingnya pelestarian kawasan bersejarah di tengah tekanan urbanisasi dan komersialisasi (Martínez, 2016).

Gambar 1. *Annual Scientific Production*

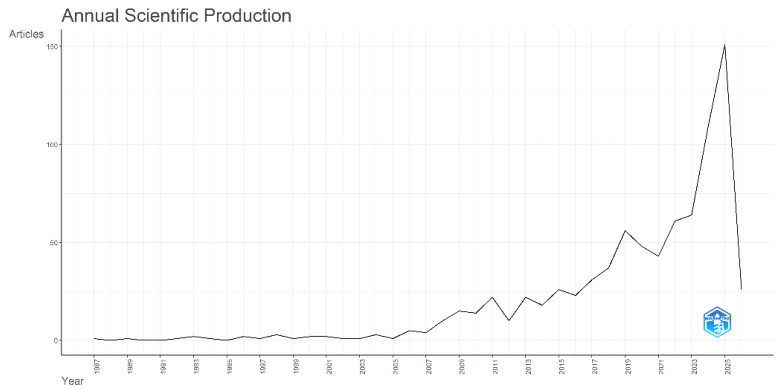

Sumber: Visualisasi oleh Biblioshiny

Struktur keilmuan yang menaungi kedua topik dapat dipahami melalui pemetaan sumber publikasi dan distribusi kata kunci. Gambar 2 menunjukkan bahwa jurnal dengan kontribusi terbanyak adalah *Sustainability (Switzerland)* dengan 38 dokumen, diikuti *Journal of Heritage Tourism* (20 dokumen), *Tourism Management* (13 dokumen), serta *Journal of Destination Marketing and Management* dan *Annals of Tourism Research* (masing-masing 11 dokumen). Dominasi *Sustainability (Switzerland)* mengindikasikan bahwa penelitian tentang *visual pollution* dan *perceived authenticity* di kawasan *heritage* semakin diposisikan dalam kerangka keberlanjutan perkotaan. Sementara itu, kehadiran jurnal pariwisata menunjukkan bahwa *perceived authenticity* telah menjadi konsep sentral dalam studi *heritage tourism*. Adapun jurnal yang lebih spesifik pada bidang arsitektur dan perencanaan kota seperti *Buildings* (11 dokumen), *Cities* (5 dokumen), dan *International Journal of Heritage Studies* (9 dokumen) juga muncul, menandakan bahwa aspek fisik dan visual mendapat perhatian signifikan. Fragmentasi antara jurnal pariwisata dan jurnal arsitektur ini mencerminkan keterpisahan tradisi keilmuan yang menjadi salah satu celah utama dalam literatur.

Gambar 2. *Most Relevant Sources* (sumber/jurnal paling produktif)

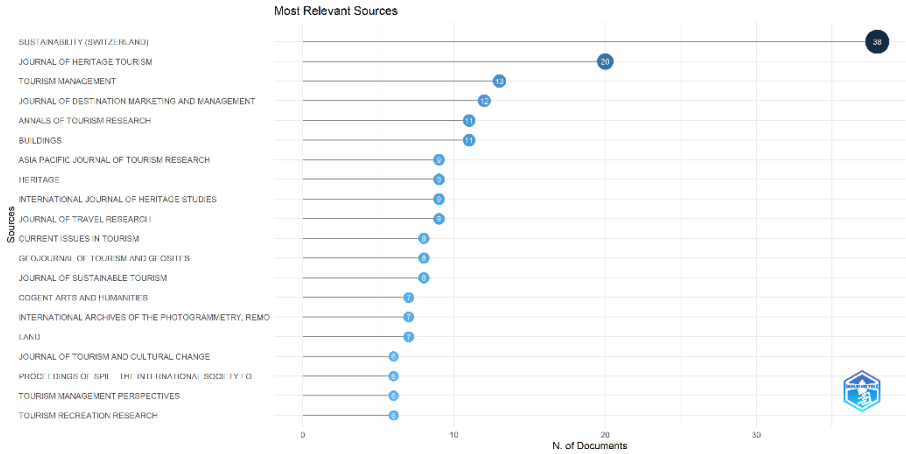

Sumber: Visualisasi oleh Biblioshiny

Analisis kata kunci pada Gambar memperkuat temuan tersebut. Kata kunci dengan frekuensi tertinggi adalah *heritage tourism* (92), *cultural heritage* (67), *perception* (56), *historic preservation* (47), dan *tourist destination* (45). Kata kunci *visual impacts* muncul dengan frekuensi 25, sementara *authenticity* tidak masuk dalam 25 besar karena proporsi dokumen yang secara eksplisit membahas *authenticity* hanya sekitar setengah dari total keseluruhan. Hal ini justru memperkuat klaim bahwa integrasi antara *visual pollution* dan *perceived authenticity* masih terbatas. Secara keseluruhan, temuan pada sub bab ini mengonfirmasi adanya fragmentasi disiplin ilmu serta menunjukkan bahwa kedua domain berkembang dalam jalur yang relatif terpisah, meskipun secara konseptual saling terkait.

Gambar 3. *Most Frequent Words* (kata kunci paling sering muncul)

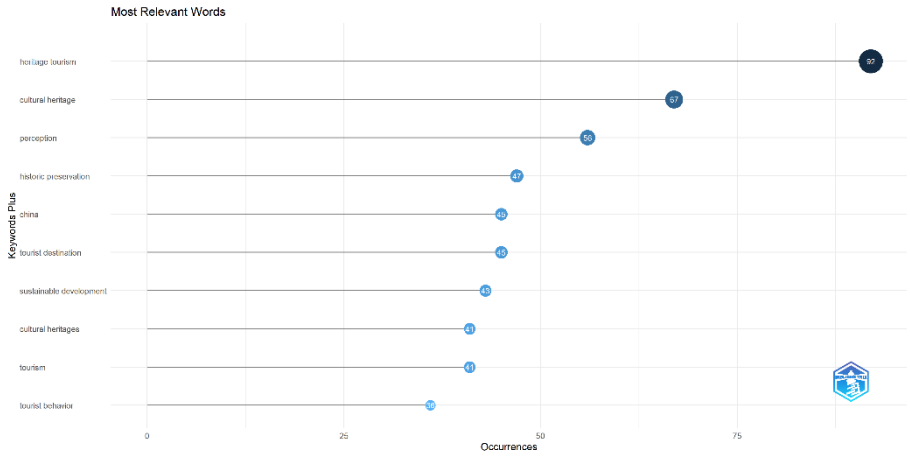

Sumber: Visualisasi oleh Biblioshiny

3.2 Aktor Kunci dan Pola Kolaborasi

Pemetaan aktor kunci bertujuan mengidentifikasi pusat-pusat keunggulan serta pola kolaborasi yang terbentuk di tingkat penulis, institusi, dan negara. Tabel 1 menunjukkan bahwa penulis dengan jumlah publikasi terbanyak adalah Fu Xiaoxiao (10 dokumen), diikuti Taheri Babak (7 dokumen), Yi Xiaoli (6 dokumen), dan Han Heesup (5 dokumen). Berdasarkan hukum Lotka, sebanyak 1.909 penulis (91,6%) hanya menghasilkan satu dokumen, sementara hanya 26 penulis (1,2%) yang memiliki tiga dokumen atau lebih. Pola ini menandakan bahwa penelitian di bidang ini didominasi oleh kontributor *occasional* tetapi terdapat sejumlah kecil penulis yang menjadi *core producers* yang secara konsisten membangun arus penelitian. Dari segi pengaruh ilmiah, Taheri Babak memiliki *h-index* tertinggi (6) dengan total sitasi 516, disusul Fu Xiaoxiao (h-index 5, sitasi 510) dan Yi Xiaoli (h-index 5, sitasi 562). Adapun Han Heesup menunjukkan *m-index* tertinggi (1,000) karena publikasi yang relatif baru namun cepat mendapat pengakuan.

Tabel 1. *Most Relevant Authors* (penulis paling produktif)

Authors	Articles	Articles Fractionalized
	10	10.00
FU XIAOXIAO	7	3.17
TAHERI BABAK	6	1.49
YI XIAOLI	6	1.42
HAN HEESUP	5	1.06
CHI XIAOTING	4	0.92
DEL CHIAPPA GIACOMO D	4	1.50
GANNON MARTIN JOSEPH	4	0.99
GONZÁLEZ MARTÍNEZ PLÁCIDO	4	4.00
LEE TIMOTHY J	4	1.50

Sumber: Visualisasi oleh Biblioshiny

Pada tingkat institusi, Gambar 4 menampilkan bahwa Macau University of Science and Technology dan Universidad de Sevilla sama-sama berkontribusi 13 dokumen, menjadikannya institusi paling produktif. Berikutnya, The Hong Kong Polytechnic University dan Universiti Teknologi MARA masing-masing 10 dokumen. Dominasi institusi dari Asia (Makau, Hong Kong, Malaysia) dan Eropa (Spanyol) mencerminkan bahwa topik ini mendapat perhatian besar di kawasan dengan

warisan budaya yang padat dan tekanan pariwisata tinggi. Produktivitas institusi tersebut meningkat signifikan setelah tahun 2018, sejalan dengan lonjakan publikasi global.

Temuan ini memiliki implikasi penting yang dapat ditelaah dari tiga dimensi. Dari dimensi sosio-ekonomi, dominasi institusi dari Asia dan Eropa menunjukkan bahwa penelitian tentang *visual pollution* dan *perceived authenticity* merupakan respons langsung terhadap tekanan perkotaan di kawasan dengan kepadatan warisan budaya tinggi, seperti Makau, Hong Kong, dan Spanyol, yang menghadapi ancaman pariwisata massal dan komersialisasi terhadap keaslian lanskap bersejarah. Dari dimensi kebijakan global, peningkatan produktivitas setelah tahun 2018 bertepatan dengan penguatan agenda *Sustainable Development Goals* tujuan 11 tentang kota berkelanjutan serta penerimaan pendekatan *Historic Urban Landscape* dari UNESCO, sehingga lonjakan publikasi mencerminkan upaya akademik merespons kerangka kebijakan internasional melalui penelitian empiris berbasis bukti. Dari dimensi praktis, temuan ini mengisyaratkan bahwa institusi di kawasan dengan tekanan heritage tinggi telah menjadikan topik ini sebagai prioritas, membuka peluang kolaborasi lintas kawasan untuk mengembangkan pendekatan terpadu dalam pengelolaan *visual heritage*. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan arahan bagi perencana kota dan pengelola kawasan *heritage* di berbagai wilayah bahwa intervensi visual tidak cukup hanya berbasis regulasi fisik semata, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek persepsi pengunjung terhadap keaslian kawasan. Pendekatan terpadu semacam ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan yang lebih holistik, yang tidak hanya melindungi nilai sejarah dan arsitektur tetapi juga menjaga kualitas pengalaman dan daya tarik destinasi heritage secara berkelanjutan.

Gambar 4. Most Relevant Affiliations (institusi paling produktif)

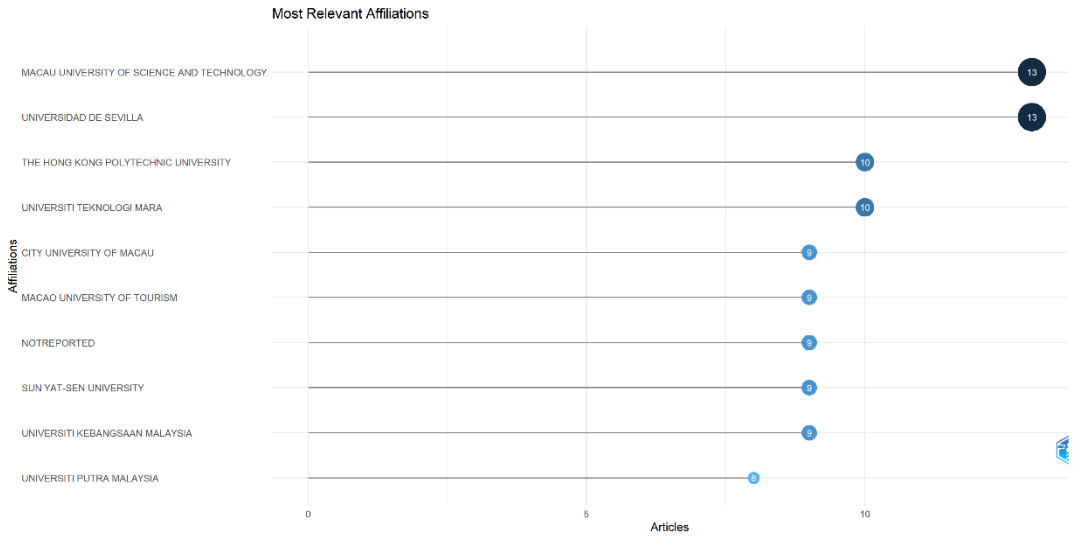

Sumber: Visualisasi oleh Biblioshiny

Dari perspektif negara, Tabel 2 menunjukkan bahwa China merupakan negara dengan kontribusi terbanyak yaitu 114 dokumen (13,9% dari total), diikuti United Kingdom (41 dokumen) dan USA (36 dokumen). China juga menempati posisi pertama dalam frekuensi kemunculan afiliasi (294 kali), mengonfirmasi perannya sebagai pusat penelitian terbesar. Namun, produktivitas tidak selalu berbanding lurus dengan dampak: Slovenia memiliki rata-rata sitasi per artikel tertinggi (230),

disusul Georgia (465) dan Mauritius (255) meskipun jumlah publikasinya kecil. Di antara negara dengan publikasi besar, Australia memiliki rata-rata sitasi per artikel yang mengesankan (49,1), diikuti USA (40,0) dan Korea (36,7).

Tabel 2 Corresponding Author's Countries

Country	Articles	Articles %	SCP	MCP	MCP %
CHINA	114	13.9	88	26	22.8
UNITED KINGDOM	41	5.0	28	13	31.7
USA	36	4.4	27	9	25.0
ITALY	33	4.0	26	7	21.2
SPAIN	31	3.8	25	6	19.4
AUSTRALIA	28	3.4	17	11	39.3
MALAYSIA	27	3.3	17	10	37.0
KOREA	21	2.6	9	12	57.1
INDONESIA	19	2.3	16	3	15.8
CANADA	17	2.1	12	5	29.4
PORTUGAL	14	1.7	10	4	28.6
TURKEY	13	1.6	11	2	15.4
INDIA	12	1.5	11	1	8.3
JAPAN	11	1.3	5	6	54.5
GREECE	10	1.2	8	2	20.0

Sumber: Visualisasi oleh Biblioshiny

Kolaborasi internasional diukur melalui indikator *Multiple Country Publications* (MCP). Tabel 2 memperlihatkan bahwa Korea Selatan memiliki proporsi MCP tertinggi (57,1%), diikuti Jepang (54,5%) dan Australia (39,3%). Angka ini menunjukkan bahwa peneliti dari negara-negara tersebut sangat aktif menjalin kemitraan lintas negara. Sebaliknya, China yang memiliki kontribusi besar justru memiliki MCP lebih rendah (22,8%), mencerminkan ekosistem riset yang lebih mandiri. Indonesia mencatatkan MCP 15,8%.

Gambar 5. Collaboration Network (jaringan kolaborasi antar penulis)

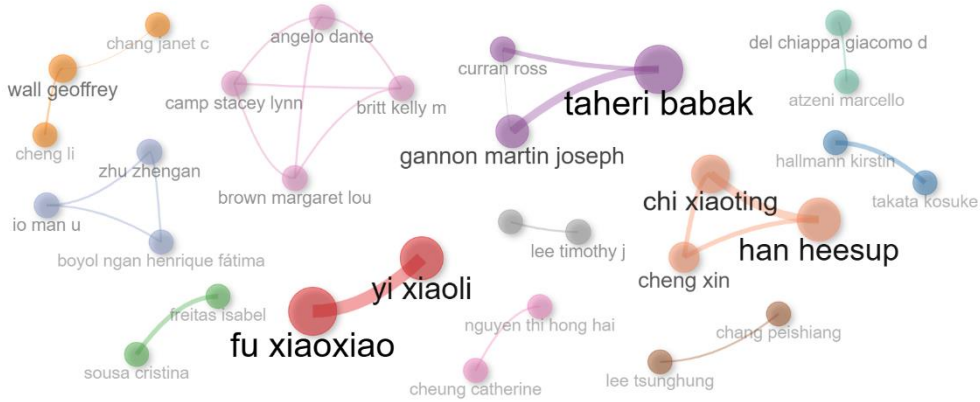

Sumber: Visualisasi oleh Biblioshiny

Jaringan kolaborasi antar penulis pada Gambar 8 mengungkap beberapa klaster utama. Klaster Taheri Babak–Gannon Martin Joseph berfokus pada *perceived authenticity* dalam *heritage tourism*, dengan penelitian yang mengkaji hubungan antara autentisitas, *serious leisure*, dan pengalaman wisata yang berkesan di situs-situs warisan. Klaster Fu Xiaoxiao–Yi Xiaoli meneliti hubungan antara *perceived authenticity*, *place attachment*, dan loyalitas pengunjung di situs warisan dunia China, dengan temuan bahwa autentisitas yang dirasakan dapat menjadi anteseden dari keterikatan tempat. Klaster Han Heesup–Chi Xiaoting merupakan kelompok yang relatif baru dengan fokus pada perilaku ramah lingkungan (*pro-environmental*

behaviors) dan keberlanjutan (*sustainability*) dalam industri pariwisata dan perhotelan, menggunakan pendekatan seperti *complexity theory* dan *fsQCA* . Hal yang menarik yaitu tidak terlihat hubungan yang kuat antara klaster yang fokus pada *visual pollution* (misalnya yang meneliti *visual impacts*, *streetscape*) dengan klaster yang fokus pada *perceived authenticity*. Temuan ini secara empiris mengonfirmasi adanya fragmentasi kolaborasi antara kedua domain, yang menghambat sintesis konseptual yang dibutuhkan untuk pengelolaan *urban heritage* secara holistik.

Tidak terlihatnya hubungan yang kuat antara kedua klaster dalam jaringan kolaborasi mencerminkan fragmentasi struktural yang lebih dalam, yang disebabkan oleh perbedaan tradisi keilmuan, pendekatan metodologis, dan tujuan aplikatif antara kedua domain penelitian. Studi *visual pollution* di kawasan *heritage* berkembang dalam disiplin arsitektur, perencanaan kota, dan teknik lingkungan dengan penekanan pada pengukuran objektif elemen fisik seperti kepadatan reklame, koherensi fasad, dan modifikasi bangunan bersejarah melalui pendekatan kuantitatif-spasial berbasis analisis citra dan simulasi tiga dimensi. Sebaliknya, studi *perceived authenticity* berakar dalam pariwisata, sosiologi, dan psologi lingkungan dengan fokus pada pengalaman subjektif pengunjung, konstruksi sosial makna, serta dimensi emosional dan eksistensial pengalaman warisan budaya (Kolar & Zabkar, 2010; Wang, 1999) melalui survei persepsi, analisis kualitatif, dan pemodelan persamaan struktural. Perbedaan mendasar ini menyebabkan kedua komunitas ilmiah mengembangkan kosakata, kerangka teoretis, dan instrumen pengukuran yang saling asing, sehingga minim terjadi dialog lintas disiplin. Sebagaimana diungkapka bahwa penelitian *visual heritage landscape* sering terfragmentasi karena studi cenderung memprioritaskan pemodelan spasial-teknis atau evaluasi berbasis persepsi secara terpisah, tanpa menghubungkan keduanya secara sistematis (Peng, 2026). Akibatnya, meskipun secara konseptual *visual pollution* dan *perceived authenticity* saling terkait, kedua domain berkembang di jalur terpisah tanpa sintesis yang memadai. Fragmentasi ini menghambat pengembangan kerangka teoretis terpadu dan membatasi kemampuan penelitian untuk memberikan rekomendasi kebijakan holistik bagi pengelolaan urban heritage, yang seharusnya mempertimbangkan aspek fisik dan dampaknya terhadap pengalaman serta persepsi pengunjung secara simultan.

3.3 Karya Ilmiah yang Membentuk Landasan Intelektual

Pemetaan karya paling berpengaruh bertujuan mengidentifikasi fondasi intelektual kedua domain. Tabel 3 menyajikan sepuluh dokumen dengan total sitasi tertinggi. Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa landasan intelektual *perceived authenticity* dalam *heritage tourism* sangat kokoh dan berasal dari tradisi penelitian pariwisata serta sosiologi. Kolar dan Zabkar (2010) membangun model *consumer-based authenticity* yang membedakan *object-based* dan *existential authenticity* serta menguji hubungannya dengan motivasi dan loyalitas. McIntosh dan Prentice (1999) mengidentifikasi tiga proses psikologis afirmasi autentisitas (*reinforced assimilation*, *cognitive perception*, *retroactive association*). Chhabra, Healy, dan Sills (2003) membuktikan bahwa *perceived authenticity* dapat dicapai dalam pengaturan *staged* dan berkorelasi positif dengan pengeluaran pengunjung. Kim dan Jamal (2007) memperkaya pemahaman tentang *existential authenticity* melalui studi etnografi

festival Renaissance, sementara Park, Choi, dan Lee (2019) menunjukkan bahwa *constructive authenticity* lebih menentukan kepuasan daripada *objective authenticity*.

Tabel 3 Sepuluh Karya Paling Berpengaruh Berdasarkan Total Sitasi

Peringkat	Dokumen	Total Sitasi	Kontribusi Utama
1	Bessiere J. (1998), *Sociologia Ruralis*	806	Gastronomi tradisional sebagai daya tarik wisata pedesaan dan konstruksi identitas lokal
2	Chhabra D. (2003), *Annals of Tourism Research*	776	*Staged authenticity* dalam *heritage tourism* dan determinan kepuasan pengunjung
3	Richards G.W. (2011), *Annals of Tourism Research*	712	Hubungan kreativitas dan pariwisata, kemunculan *creative tourism*
4	Kolar T. (2010), *Tourism Management*	689	Model *consumer-based authenticity* yang menghubungkan motivasi budaya, autentisitas, dan loyalitas
5	Kim H. (2007), *Annals of Tourism Research*	505	*Existential authenticity* dalam pengalaman festival Renaissance dan pembentukan diri (*self-making*)
6	Leigh T.W. (2006), *Journal of the Academy of Marketing Science*	465	Multiplisitas makna autentisitas dalam subkultur konsumsi (MG *brand community*)
7	Park E. (2019), *Tourism Management*	439	Pengaruh autentisitas terhadap kepuasan dan loyalitas di situs warisan budaya Korea
8	McIntosh A.J. (1999), *Annals of Tourism Research*	437	Proses psikologis afirmasi autentisitas melalui konsumsi warisan budaya (*insightfulness*)
9	Fritz K. (2017), *European Journal of Marketing*	388	Anteseden dan konsekuensi autentisitas merek dalam konteks pemasaran
10	Lu L. (2015), *Tourism Management*	379	Pengaruh autentisitas, keterlibatan, dan citra destinasi terhadap kepuasan di kawasan bersejarah

Sebaliknya, *visual pollution* tidak memiliki landasan intelektual yang terpusat dalam literatur *heritage tourism*. Karya-karya yang relevan berasal dari disiplin yang berbeda, seperti pemasaran (Fritz et al., 2017; Leigh, 2006) dan pariwisata (Lu et al., 2015), tanpa satu pun yang secara khusus mengkaji *visual pollution* sebagai fokus utama dalam sepuluh besar sitasi. Literatur *visual pollution* lebih tersebar di bidang arsitektur, *urban design*, dan psikologi lingkungan. Fragmentasi ini menyebabkan penelitian tentang dampak visual di kawasan *heritage* sering tidak terhubung dengan perkembangan teoretis *perceived authenticity*. Dengan demikian, upaya integrasi kedua domain memerlukan pembangunan landasan intelektual yang lebih kokoh untuk *visual pollution* , misalnya dengan mengadopsi teori-teori autentisitas yang telah mapan.

Hubungan antara temuan pemetaan karya paling berpengaruh dengan aktor kunci dan polarisasi terlihat dalam beberapa pola penting. Pertama, sepuluh

dokumen dengan sitasi tertinggi seluruhnya berasal dari domain *perceived authenticity*, termasuk karya Kolar dan Zabkar (2010), McIntosh dan Prentice (1999), serta Chhabra, Healy, dan Sills (2003). Hal yang sama juga terjadi pada aktor kunci: penulis paling produktif dan berpengaruh seperti Fu Xiaoxiao, Taheri Babak, dan Yi Xiaoli juga seluruhnya berasal dari domain yang sama. Sebaliknya, tidak ada satu pun penulis atau karya dari *visual pollution* yang masuk dalam kedua kategori tersebut. Kedua, rendahnya sitasi silang antara karya *visual pollution* dan *perceived authenticity* menunjukkan bahwa peneliti di kedua domain jarang merujuk satu sama lain, yang memperkuat isolasi intelektual dan menghambat integrasi konseptual. Ketiga, jaringan kolaborasi yang terfragmentasi mengonfirmasi bahwa polarisasi tidak hanya terjadi pada tingkat tema penelitian, tetapi juga pada tingkat aktor dan rujukan intelektual yang membentuk landasan masing-masing domain. Dengan demikian, upaya integrasi kedua domain memerlukan pembangunan landasan intelektual yang lebih kokoh untuk *visual pollution* , misalnya dengan mengadopsi teori-teori autentisitas yang telah mapan dari tradisi pariwisata dan perilaku konsumen.

3.4 Tema Penelitian Utama dan Evolusinya

Analisis *co-occurrence* kata kunci pada Gambar 6 mengungkap dua klaster tematik utama yang mencerminkan fragmentasi sekaligus titik temu antara kedua domain penelitian. Klaster pertama mencakup kata kunci *visual impacts*, *authenticity*, *historic preservation*, *cultural heritages*, *architectural design*, dan *virtual reality*. Keberadaan *visual impacts* dan *authenticity* dalam klaster yang sama menunjukkan bahwa secara konseptual kedua topik ini telah diakui memiliki keterkaitan dalam literatur. Klaster kedua didominasi oleh *heritage tourism*, *cultural heritage*, *perception*, *tourist destination*, *sustainable development*, dan *tourist behavior*, mencerminkan tradisi penelitian pariwisata yang lebih mapan dengan *perceived authenticity* menjadi konsep sentral yang dikaitkan dengan kepuasan wisatawan dan loyalitas destinasi. Meskipun belum terlihat hubungan yang kuat antara kedua klaster, mengindikasikan bahwa integrasi konseptual antara *visual pollution* dan *perceived authenticity* masih dalam tahap awal.

Gambar 6 Jaringan *Co-occurance* Kata Kunci

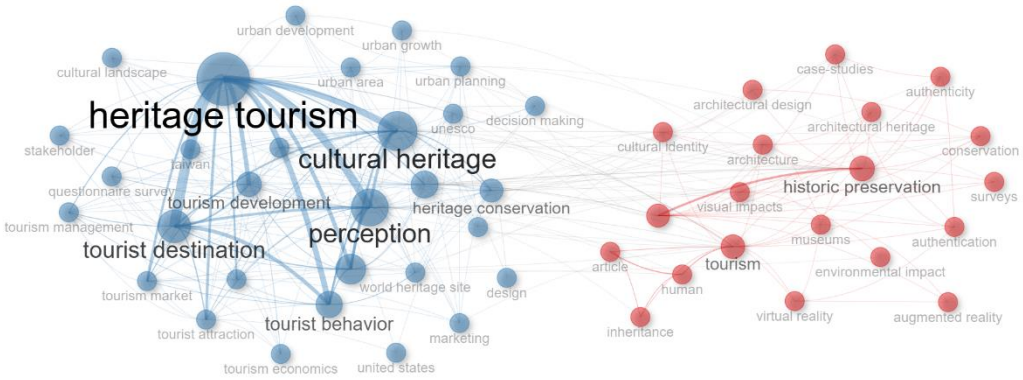

Gambar 7 Evolusi Tematik Penelitian

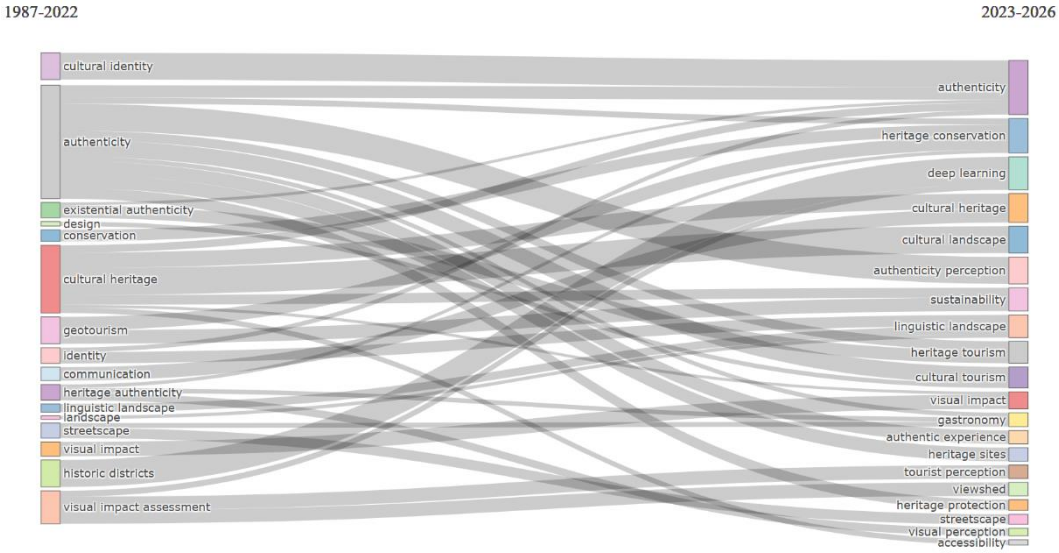

Sumber: Visualisasi oleh Biblioshiny

Evolusi tema dari waktu ke waktu disajikan pada Gambar 7. Perbandingan antara periode awal (1987–2022) dan periode terkini (2023–2026) menunjukkan bahwa tema-tema fundamental seperti *cultural identity*, *authenticity*, *heritage conservation*, dan *sustainability* telah menjadi perhatian sejak awal. Tema-tema aplikatif seperti *streetscape*, *visual perception*, dan *accessibility* sebenarnya juga telah muncul pada periode awal tetapi intensitas dan posisinya dalam peta literatur semakin menguat pada periode terkini. Pergeseran yang lebih jelas terlihat pada munculnya *deep learning*, *linguistic landscape*, dan *gastronomy* sebagai tema yang terdokumentasi pada periode 2023–2026, mengindikasikan perluasan kajian ke arah pemanfaatan teknologi digital dan dimensi budaya non-fisik.

Analisis *trend topics* pada Gambar 8 memperkuat temuan ini. Topik *visual impacts* mencapai puncak popularitas pada periode 2019–2023, menunjukkan bahwa perhatian terhadap dampak visual di kawasan *heritage* meningkat secara signifikan pada tahun-tahun tersebut. Topik *perception* memiliki rentang tren yang lebih panjang dengan kecenderungan terus meningkat hingga periode terkini, mengonfirmasi bahwa pendekatan berbasis persepsi pengunjung masih menjadi

arus utama dalam literatur. *Heritage tourism* dan *tourism development* merupakan topik mapan dengan frekuensi tinggi yang konsisten. Sementara itu, topik *urban planning* dan *sustainable development* juga menunjukkan kehadiran yang stabil, mencerminkan keterkaitan kajian *heritage* dengan perencanaan kota berkelanjutan. Secara keseluruhan, temuan pada sub bab ini menunjukkan bahwa meskipun fragmentasi antara kajian *visual pollution* dan *perceived authenticity* masih ada, terdapat peluang integrasi melalui pendekatan yang berfokus pada lanskap visual perkotaan serta pemanfaatan teknologi digital seperti *deep learning* yang mulai muncul pada periode terkini.

Gambar 8 Tren Topik Berdasarkan Rentang Waktu

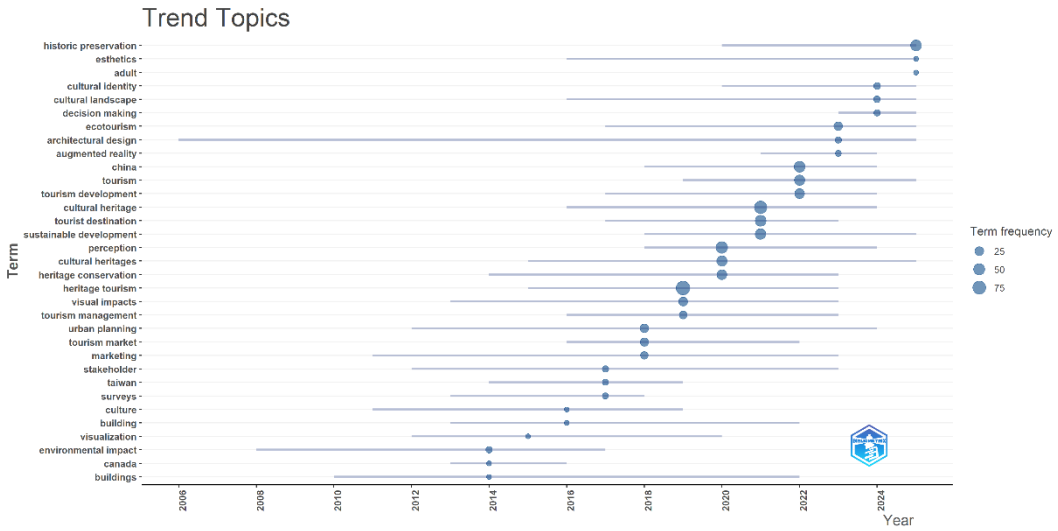

Sumber: Visualisasi oleh Biblioshiny

Kemunculan *deep learning* sebagai tema pada periode 2023-2026 mencerminkan pergeseran metodologis yang signifikan dalam penelitian *visual pollution* dan *perceived authenticity*. Secara teknis, *deep learning* merujuk pada pemanfaatan jaringan saraf tiruan untuk menganalisis data visual secara otomatis, seperti mendeteksi elemen *visual pollution* melalui citra *street view* (Titu et al., 2024), menilai keaslian kawasan warisan melalui analisis multimodal gambar dan teks (Xiao et al., 2026), serta membandingkan persepsi manusia dengan kecerdasan buatan dalam mengevaluasi kualitas ruang jalan bersejarah (Gönül & Durak, 2025). Munculnya tema ini pada periode terkini terkait dengan beberapa temuan sebelumnya. Pertama, dari sisi aktor, *deep learning* menunjukkan bahwa peneliti dengan latar belakang ilmu komputer dan kecerdasan buatan mulai masuk ke dalam domain ini, membawa pendekatan yang berbeda dari aktor-aktor tradisional di bidang pariwisata dan arsitektur. Kedua, dari sisi polarisasi, *deep learning* berpotensi menjadi jembatan antara dua domain yang selama ini terfragmentasi, karena teknologi ini dapat digunakan untuk mengukur *visual pollution* secara objektif sekaligus menilai *perceived authenticity* melalui analisis citra dan teks. Ketiga, dari sisi evolusi tematik, *deep learning* muncul bersamaan dengan penguatan tema *streetscape* dan *visual perception*, yang menunjukkan pergeseran dari pendekatan kualitatif dan survei menuju pendekatan komputasional dan berbasis data besar. Namun, karena *deep learning* masih dalam tahap awal penerapannya di bidang ini, karya-karya yang menggunakan metode ini belum mencapai tingkat sitasi yang

tinggi, sehingga belum masuk dalam sepuluh besar dokumen paling berpengaruh. Perkembangan ini mengindikasikan bahwa integrasi antara kajian *visual pollution* dan *perceived authenticity* melalui pemanfaatan teknologi digital merupakan arah penelitian yang potensial untuk dikembangkan lebih lanjut.

3.5 Kesenjangan Penelitian dan Agenda Riset Masa Depan

Berdasarkan pemetaan struktur intelektual, sosial, dan konseptual yang telah diuraikan, teridentifikasi empat kesenjangan utama yang menghambat integrasi antara studi *visual pollution* dan *perceived authenticity* dalam konteks *urban heritage*.

Pertama, ketimpangan landasan intelektual. *Perceived authenticity* memiliki fondasi yang kokoh dan koheren dalam literatur pariwisata, dengan kerangka teoretis serta instrumen pengukuran yang matang (Kolar & Zabkar, 2010; Park et al., 2019; Wang, 1999). Wang (1999) meletakkan dasar konseptual dengan membedakan tiga dimensi authenticity, Kolar dan Zabkar (2010) mengembangkan model *consumer-based authenticity* yang teruji secara empiris, sementara Park, Choi, dan Lee (2019) mengembangkan dan memvalidasi skala pengukuran *perceived authenticity* dalam konteks warisan budaya. Sebaliknya, *visual pollution* tidak memiliki landasan intelektual yang terpusat; karya-karya yang relevan tersebar di disiplin arsitektur, *urban design*, dan psikologi lingkungan tanpa satu pun karya fondasional dalam sepuluh besar sitasi (Barroga et al., 2021; Portella, 2014). *Kedua*, minimnya studi yang secara eksplisit menguji hubungan kausal antara kedua variabel. Meskipun *co-occurrence* kata kunci menempatkan *visual impacts* dan *authenticity* dalam klaster yang sama, kekuatan hubungan keduanya belum menunjukkan integrasi yang matang. *Ketiga*, fragmentasi disiplin dan kolaborasi yang terbatas. Jaringan kolaborasi antar penulis menunjukkan keterpisahan antara klaster yang berfokus pada aspek visual dengan klaster yang berfokus pada persepsi keaslian. *Keempat*, keterbatasan metodologis dalam mengukur *visual pollution* . Pengukuran masih bersifat deskriptif, sementara tradisi *perceived authenticity* telah mengembangkan instrumen kuantitatif yang teruji.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, dirumuskan agenda riset masa depan yang terintegrasi. *Pertama*, pengembangan kerangka teoretis terpadu yang menghubungkan *visual pollution* dengan *perceived authenticity* dengan memanfaatkan model *onsumer-based authenticity* dari Kolar dan Zabkar (2010), konsep *insightfulness* dari McIntosh dan Prentice (1999), serta konsep *brand clarity* dari Fritz, Schoenmueller, dan Bruhn (2017). *Kedua*, pengembangan instrumen pengukuran simultan yang mampu menangkap aspek visual objektif (kepadatan *signage*, koherensi fasad) dan respons perseptual subjektif (skala *perceived authenticity*) secara bersamaan. *Ketiga*, desain penelitian kuantitatif dengan pendekatan struktural, seperti analisis jalur (SEM) untuk menguji hubungan kausal serta analisis mediasi dan moderasi. *Keempat*, pemanfaatan teknologi digital, termasuk analisis citra berbasis *deep learning* untuk deteksi otomatis elemen visual yang tidak selaras, *virtual reality* untuk simulasi persepsi terkontrol, serta *eye-tracking* untuk memahami pola perhatian visual pengunjung. *Kelima*, studi komparatif lintas kawasan dan budaya untuk memahami konteks spesifik hubungan antara *visual pollution* dan *perceived authenticity*, misalnya perbedaan dampak di kawasan dengan regulasi *signage* ketat versus longgar, atau perbedaan sensitivitas antara wisatawan domestik dan mancanegara.

Berdasarkan seluruh temuan bibliometrik yang telah diuraikan, agenda penelitian yang paling urgen adalah pengembangan kerangka teoretis terpadu yang menghubungkan *visual pollution* dan *perceived authenticity* secara empiris. Urgensi ini didasarkan pada tiga temuan utama. Pertama, ketimpangan fondasi intelektual menunjukkan bahwa *perceived authenticity* memiliki kerangka teoretis dan instrumen pengukuran yang matang, sementara *visual pollution* masih tersebar tanpa landasan yang kokoh, sehingga diperlukan upaya untuk membangun keterhubungan konseptual antara kedua domain. Kedua, fragmentasi kolaborasi dan rendahnya sitasi silang mengonfirmasi bahwa kedua komunitas ilmiah berkembang dalam jalur terpisah tanpa dialog lintas disiplin yang memadai. Ketiga, meskipun *deep learning* muncul sebagai tema baru yang berpotensi menjembatani pengukuran objektif *visual pollution* dengan persepsi subjektif pengunjung, penerapannya masih dalam tahap awal dan belum terintegrasi dengan kerangka teoretis yang mapan. Implikasi dari agenda ini adalah pengembangan model penelitian kuantitatif yang menguji pengaruh elemen-elemen *visual pollution* terhadap *perceived authenticity*, penyusunan instrumen pengukuran simultan yang menggabungkan indikator fisik dan perseptual, serta pemanfaatan teknologi digital seperti *deep learning* dan *virtual reality* untuk simulasi dan analisis persepsi terkontrol. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan arahan bagi perencana kota dan pengelola kawasan *urban heritage* bahwa intervensi visual tidak cukup hanya berbasis regulasi fisik, tetapi juga harus mempertimbangkan bagaimana elemen visual mempengaruhi pengalaman dan persepsi keaslian pengunjung secara holistik.

4. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini bertujuan memetakan struktur intelektual, sosial, dan konseptual literatur tentang *visual pollution* dan *perceived authenticity* dalam konteks *urban heritage* menggunakan pendekatan bibliometrik. Berdasarkan analisis terhadap 818 dokumen dari database Scopus (1987–Maret 2026), diperoleh empat temuan utama.

Pertama, publikasi di kedua domain mengalami pertumbuhan pesat dalam dekade terakhir dengan tingkat pertumbuhan tahunan 8,71%, didominasi oleh jurnal *Sustainability (Switzerland)* dan *Journal of Heritage Tourism*. Fragmentasi disiplin ilmu terlihat jelas: penelitian *perceived authenticity* lebih banyak berkembang dalam tradisi pariwisata, sementara *visual pollution* lebih tersebar di bidang arsitektur dan perencanaan kota. *Kedua*, aktor kunci meliputi penulis Fu Xiaoxiao, Taheri Babak, dan Yi Xiaoli; institusi Macau University of Science and Technology serta Universidad de Sevilla; serta negara China sebagai kontributor terbesar. Jaringan kolaborasi terfragmentasi antara klaster yang berfokus pada aspek visual dan klaster yang berfokus pada persepsi keaslian. *Ketiga*, landasan intelektual *perceived authenticity* sangat kokoh dengan karya-karya fondasional dari Kolar & Zabkar (2010), McIntosh & Prentice (1999), Chhabra dkk. (2003), Kim & Jamal (2007), dan Park dkk. (2019). Sebaliknya, *visual pollution* tidak memiliki karya fondasional yang terpusat dalam literatur *heritage tourism*. Keempat, struktur konseptual mengungkap dua klaster utama yaitu (*visual impacts* dan *authenticity*) serta (*heritage tourism* dan *perception*) dengan tema deep learning yang muncul sebagai topik baru pada periode terkini, sementara tema *streetscape* dan *visual perception* telah hadir sejak periode awal namun semakin menguat intensitasnya. Berdasarkan temuan tersebut, agenda penelitian yang paling mendesak adalah pengembangan kerangka teoretis terpadu dan instrumen pengukuran simultan yang menghubungkan *visual*

pollution dengan *perceived authenticity*, serta pemanfaatan teknologi digital seperti *deep learning* untuk menjembatani kedua domain.

Penelitian ini memiliki implikasi teoretis berupa peta jalan literatur yang mengungkap fragmentasi serta titik temu potensial antara kedua domain. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan arahan bagi perencana kota dan pengelola kawasan *heritage* bahwa intervensi visual tidak cukup hanya berbasis regulasi fisik, tetapi juga harus mempertimbangkan persepsi keaslian pengunjung. Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan satu database (Scopus) sehingga tidak mencakup seluruh literatur yang mungkin terindeks di database lain seperti Web of Science.

Saran untuk penelitian mendatang meliputi: (1) pengembangan kerangka teoretis terpadu yang menghubungkan *visual pollution* dan *perceived authenticity* dengan mengadopsi model-model autentisitas yang telah mapan; (2) penyusunan instrumen pengukuran simultan yang menggabungkan indikator objektif *visual pollution* dan skala perseptual *perceived authenticity*; (3) pemanfaatan teknologi digital seperti *deep learning* untuk deteksi otomatis elemen visual serta *virtual reality* untuk simulasi persepsi; serta (4) studi komparatif lintas kawasan dan budaya untuk memahami konteks spesifik hubungan antara kedua variabel. Dengan agenda riset tersebut, diharapkan integrasi antara studi *visual pollution* dan *perceived authenticity* dapat terwujud, mendukung pengelolaan kawasan *urban heritage* yang lebih holistik dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Alwah, A., Li, W., Alwah, M., Drmoush, A., Shahrah, S., Tran, D., & Xi, L. (2020). Difficulty and complexity in dealing with *visual pollution* in historical cities: The historical city of Ibb, Yemen as a case study. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, *601*. https://doi.org/10.1088/1755-1315/601/1/012045

Azumah, D. M. Y., Hinson, R., Nukpezah, D., & Yiran, G. (2021). *Visual pollution* Through Excessive Outdoor Advertisements. *Palgrave Studies of Marketing in Emerging Economies*. https://doi.org/10.1007/978-3-030-81329-1_8

Barroga, S. D., Navarra, N., & Palarca, H. (2021). *Methodologies in Identification, Analysis, and Measurement of Visual pollution : The Case Study of Intramuros*. *13*, 19–26. https://doi.org/10.29244/jli.v13i1.33322

Bessière, J. (1998). Local Development and Heritage: Traditional Food and Cuisine as Tourist Attractions in Rural Areas. *Sociologia Ruralis*, *38*(1), 21–34. https://doi.org/10.1111/1467-9523.00061

Blondel, V. D., Guillaume, J.-L., Lambiotte, R., & Lefebvre, E. (2008). Fast unfolding of communities in large networks. *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment*, *2008*(10), P10008. https://doi.org/10.1088/1742-5468/2008/10/P10008

Borowiak, K., Budka, A., Lisiak-Zielińska, M., Robaszkiewicz, K., Cakaj, A., & Agaj, T. (2024). Urban *visual pollution* : Comparison of two ways of evaluation—a case study from Europe. *Scientific Reports*, *14*(1), 6138. https://doi.org/10.1038/s41598-024-56403-9

Cerisola, S., & Panzera, E. (2024). Heritage tourism and local prosperity: An empirical investigation of their controversial relationship. *Tourism Economics*, *31*, 964–983. https://doi.org/10.1177/13548166241234099

Chhabra, D., Healy, R., & Sills, E. (2003). Staged authenticity and heritage tourism. *Annals of Tourism Research*, *30*(3), 702–719. https://doi.org/10.1016/S0160-7383(03)00044-6

Chmielewski, S. (2021). Towards Managing *Visual pollution* : A 3D Isovist and Voxel Approach to Advertisement Billboard Visual Impact Assessment. *ISPRS Int. J. Geo Inf.*, *10*, 656. https://doi.org/10.3390/ijgi10100656

Dai, T., Zheng, X., & Yan, J. (2021). Contradictory or aligned? The nexus between authenticity in heritage conservation and heritage tourism, and its impact on satisfaction. *Habitat International*, *107*, 102307. https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2020.102307

Eck, N. J. V., & Waltman, L. (2009). How to normalize cooccurrence data? An analysis of some well-known similarity measures. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, *60*(8), 1635–1651. https://doi.org/10.1002/asi.21075

Fang, Q., & Ko, W. (2025). Beyond Satisfaction: Authenticity, Attachment, and Engagement in Shaping Revisit Intention of Palace Museum Visitors. *Sustainability*, *17*(19), 8803. https://doi.org/10.3390/su17198803

Fritz, K., Schoenmueller, V., & Bruhn, M. (2017). Authenticity in branding – exploring antecedents and consequences of brand authenticity. *European Journal of Marketing*, *51*(2), 324–348. https://doi.org/10.1108/EJM-10-2014-0633

Gao, J., Lin, S. (Sonia), & Zhang, C. (2020). Authenticity, involvement, and nostalgia: Understanding visitor satisfaction with an adaptive reuse heritage site in urban China. *Journal of Destination Marketing & Management*, *15*, 100404. https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2019.100404

García-Hernández, M., De La Calle-Vaquero, M., & Yubero, C. (2017). Cultural Heritage and Urban Tourism: Historic City Centres under Pressure. *Sustainability*, *9*, 1346. https://doi.org/10.3390/su9081346

Genc, V., & Gulertekin Genc, S. (2023). The effect of perceived authenticity in cultural heritage sites on tourist satisfaction: The moderating role of aesthetic experience. *Journal of Hospitality and Tourism Insights*, *6*(2), 530–548. https://doi.org/10.1108/JHTI-08-2021-0218

Gönül, A., & Durak, S. (2025). On measuring the change in historical city centres: An attempt at comparing human perception and deep learning through visual quality of street space. *Multimedia Tools and Applications*, *84*(32), 39283–39305. https://doi.org/10.1007/s11042-025-20642-3

Kim, H., & Jamal, T. (2007). Touristic quest for existential authenticity. *Annals of Tourism Research*, *34*(1), 181–201. https://doi.org/10.1016/j.annals.2006.07.009

Kolar, T., & Zabkar, V. (2010). A consumer-based model of authenticity: An oxymoron or the foundation of cultural heritage marketing? *Tourism Management*, *31*(5), 652–664. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2009.07.010

Kuceruka, A., & Penēze, Z. (2021). The impact of outdoor signage on the streetscapes of Old Riga. *Folia Geographica*. https://doi.org/10.22364/fg.19.10

Lak, A., Gheitasi, M., & Timothy, D. (2020). Urban regeneration through heritage tourism: Cultural policies and strategic management. *Journal of Tourism and Cultural Change*, *18*, 386–403. https://doi.org/10.1080/14766825.2019.1668002

Lal, P., Tiwari, R. K., Kumar, A., Altaf, M. A., Alsahli, A. A., Lal, M. K., & Kumar, R. (2023). Bibliometric analysis of real-time PCR-based pathogen detection in plant protection research: A comprehensive study. *Frontiers in Plant Science*, *14*, 1129714. https://doi.org/10.3389/fpls.2023.1129714

Leigh, T. W. (2006). The Consumer Quest for Authenticity: The Multiplicity of Meanings Within the MG Subculture of Consumption. *Journal of the Academy of Marketing Science*, *34*(4), 481–493. https://doi.org/10.1177/0092070306288403

Lu, L., Chi, C. G., & Liu, Y. (2015). Authenticity, involvement, and image: Evaluating tourist experiences at historic districts. *Tourism Management*, *50*, 85–96. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2015.01.026

Marcelo, J., Parco, E., Coniendo, C. K., Gómez, M., & Amutan, S. (2021). Effects of the *visual pollution* in Intramuros: Basis for heritage preservation. *International Journal of Research Studies in Management*. https://doi.org/10.5861/ijrsm.2021.m7727

Martínez, P. G. (2016). Authenticity as a challenge in the transformation of Beijing's urban heritage: The commercial gentrification of the Guozijian historic area ☆. *Cities*, *59*, 48–56. https://doi.org/10.1016/j.cities.2016.05.026

Mascia, M., Melis, N., Piro, V. M. I., Rubanu, M. G., Vacca, A., & Mais, L. (2025). Mapping Hydrogen Research Frontiers: A Multi-Query Bibliometric Analysis of Electrochemical and Biotechnological Pathways. *Energies*, *19*(1), 166. https://doi.org/10.3390/en19010166

McIntosh, A. J., & C. Prentice, R. (1999). Affirming authenticity. *Annals of Tourism Research*, *26*(3), 589–612. https://doi.org/10.1016/S0160-7383(99)00010-9

Mundher, R., Al-Sharaa, A., Al-Helli, M., Gao, H., & Bakar, S. A. (2022). Visual Quality Assessment of Historical Street Scenes: A Case Study of the First "Real" Street Established in Baghdad. *Heritage*. https://doi.org/10.3390/heritage5040192

Nestoriuc, D., Voinea, I., Jipa, A., Teodorescu, C., & Gheorghilaş, A. (2024). *VISUAL POLLUTION* PROVIDED BY BUILDINGS WITH A HIGH DEGREE OF DECAY AND ITS IMPACT ON THE URBAN LANDSCAPE: A CASE STUDY OF BRĂILA CITY CENTER. *Proceedings of the 15th Conference Public Recreation and Landscape Protection - with Environment Hand in Hand!* https://doi.org/10.11118/978-80-7509-963-1-0381

Park, E., Choi, B., & Lee, T. (2019). The role and dimensions of authenticity in heritage tourism. *Tourism Management*. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2019.03.001

Peng. (2026). *A+BE | Architecture and the Built Environment, No. 10 (2026): Visual Heritage Landscape Research*. A+BE | Architecture and the Built Environment. https://doi.org/10.71690/ABE.2026.10

Popescu, L., Niţă, A., & Iordache, C. (2020). Place Identity, Urban Tourism and Heritage Interpretation: A Case Study of Craiova, Romania. *Journal of Balkan and Near Eastern Studies*, *22*, 494–505. https://doi.org/10.1080/19448953.2020.1775401

Portella, A. (2014). *Visual pollution : Advertising, Signage and Environmental Quality*. https://consensus.app/papers/visual-pollution-advertising-signage-and-environmental-portella/c178424f0f3950d2a2a263b18f9a87ea/

Qiu, N., Wu, J., Li, H., Pan, C., & Guo, J. (2025). Relationship Between Perceived Authenticity, Place Attachment, and Tourists' Environmental Behavior in

Industrial Heritage. *Sustainability*, *17*(11), 5152. https://doi.org/10.3390/su17115152

Richards, G. (2011). Creativity and tourism. *Annals of Tourism Research*, *38*(4), 1225–1253. https://doi.org/10.1016/j.annals.2011.07.008

Shuxiao, Huang, W., Cui, N., Cai, Z., Xu, Y., & Qiao, Y. (2024). Exploring Non-Linear and Synergistic Effects of Street Environment on the Spirit of Place in Historic Districts: Using Multi-Source Data and XGBoost. *Sustainability*. https://doi.org/10.3390/su16125182

Sukwai, J., Mishima, N., & Srinurak, N. (2022). Balancing Cultural Heritage Conservation: Visual Integrity Assessment to Support Change Management in the Buffer Zone of Chiang Mai Historic City Using GIS and Computer-Generated 3D Modeling. *Land*. https://doi.org/10.3390/land11050666

Titu, M. F. S., Chowdhury, A. A., Haque, S., & Khan, R. (2024). Deep-Learning-Based Real-Time *Visual pollution* Detection in Urban and Textile Environments. *Sci*. https://doi.org/10.3390/sci6010005

Voinea, I., Gheorghilaş, A., Jipa, A., Teodorescu, C., & Nestoriuc, D. (2024). *VISUAL POLLUTION* AND ITS IMPACT ON THE URBAN LANDSCAPE: A CASE STUDY OF BUCHAREST'S CITY CENTER. *Proceedings of the 15th Conference Public Recreation and Landscape Protection - with Environment Hand in Hand!* https://doi.org/10.11118/978-80-7509-963-1-0376

Wang, N. (1999). Rethinking authenticity in tourism experience. *Annals of Tourism Research*, *26*, 349–370. https://doi.org/10.1016/s0160-7383(98)00103-0

Xiao, J., Qu, W., Jiang, X., & Hu, B. (2026). Authenticity Assessment of Industrial Heritage Villages Based on Multimodal Deep Learning. *Proceedings of the 2nd International Conference on Artificial Intelligence, Digital Media Technology and Social Computing*, 300–305. https://doi.org/10.1145/3806262.3806305

Xie, Q., Hu, L., Wu, J., Shan, Q., Li, W., & Shen, K. (2024). Investigating the Influencing Factors of the Perception Experience of Historical Commercial Streets: A Case Study of Guangzhou's Beijing Road Pedestrian Street. *Buildings*, *14*(1), 138. https://doi.org/10.3390/buildings14010138

RESHAPING ACCOUNTABILITY IN VILLAGE FUND MANAGEMENT: A REFLECTIVE ANALYSIS FROM 2019 TO 2023

[1]Nicolaus Petrus Likuwatan Werang
Alumnus Postgraduate School, Master of Public Administration Program, University of National (UNAS), Jakarta, 12550, Indonesia
mailto:nicolauspetrus@gmail.com

[2]Maria Lusiana Florentin Werang
Department of Public Administration, Parahyangan Catholic University, Bandung, 40141, Indonesia
mailto:marialusianafw@gmail.com

Keywords:
Village Fund Management; Accountability; Government Capacity; Governance;

Pengelolaan Dana Desa; Akuntabilitas; Kapasitas Pemerintah; Tata Kelola

BRAWIJAYA JOURNAL of SOCIAL SCIENCE

Vol. 5, No. 2, 2026

DOI: https://doi.org.10.21776/ub.bjss.2026.005.02.6

Submitted: 2025-07-04
Accepted: 2026-05-26

Abstract

Village fund management remains an important issue within Indonesia's decentralization agenda. Using a quantitative descriptive approach based on secondary data from the Ministries of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration, this essay tested trends in village fund management during 2019-2023. The findings reveal a fluctuating pattern, with recorded percentages of 76.30% (2019), 71.69% (2020), 78.80% (2021), 69.33% (2022), and 70.83% (2023). These fluctuations indicate that improvements in village fund management have not been consistently sustained and suggest continuing barriers in accountability practices. Based on these findings and supported by previous studies, the research highlights the importance of strengthening institutional capacity, monitoring systems, policy coordination, and community participation. In sum, the essay argues that the effectiveness of village fund management depends not only on fiscal transfers but also on governance institutions' ability to maintain accountability, transparency, and consistency in supporting inclusive and sustainable rural development.

1. Introduction

In general, village fund management (VFM) has been one of the most debated issues in Indonesia's decentralization agenda since the reform era. The policy aims to advance democratization in development and to test the long-standing urban bias experienced under Indonesia's centralized governance system. But after more than a decade of actualisation, a critical question remains unanswered: has the expansion of fiscal authority genuinely strengthened village governance, or has it merely shifted governance problems from the national to the local level? Apart from that, this inquiry has become increasingly relevant as records of budget misallocation, administrative irregularities, weak financial management, and corruption linking village officials continue to emerge across various regions (Hidajat, 2025; Rifai et al., 2024).

According to the justification above, most of the cases that illustrate the village fund are inconsistent with actual practice. And so on; it suggests that the institutional capacity that drives the process of actualization also lacks functionality and is strongly committed to the principles. The persistence of these barriers reflects a broader debate surrounding the transformation of village governance in Indonesia's democratic era.

Decentralization has often been presented as a mechanism for bringing government closer to citizens, increasing public participation, and ensuring that development policies are more responsive to local needs (Permatasari et al., 2024; Savitri et al., 2021). From this perspective, villages are no longer viewed merely as administrative objects receiving instructions from higher levels of government but as autonomous political entities capable of determining their own development priorities.

Nevertheless, critics argue that decentralization should not be romanticized as inherently democratic. Even though authority has indeed been devolved, local governance structures frequently remain influenced by unequal power relations, elite dominance, and limited citizen oversight. Consequently, the democratization of village governance has not always been accompanied by the democratization of decision-making processes. In some contexts, decentralization has expanded opportunities for participation; in others, it has simply relocated power from central actors to local elites. This contradiction becomes particularly visible in the management of village funds.

On the one hand, village funds are intended to provide communities with greater control over development planning and resource allocation. The policy embodies the principle that those who are closest to local problems are best positioned to formulate appropriate solutions. As a result, village governments are entrusted with substantial authority to manage public services, infrastructure development, educational facilities, health programs, and community empowerment initiatives in line with local priorities (Al-Fatih et al., 2023; Canare, 2021; Madubun, 2024; Nugroho & Sujarwoto, 2021).

On the other hand, the delegation of authority does not necessarily guarantee effective governance. For instance, a growing body of literature suggests that greater fiscal autonomy may create opportunities for inefficiency, rent-seeking, and the misuse of public resources when institutional safeguards remain weak. Hence, the central issue is not merely whether villages possess authority, but whether they possess the capacity and accountability structures necessary to exercise that authority responsibly. This debate ultimately places accountability at the center of discussions concerning village governance.

In principle, accountability serves as the foundation that legitimizes the transfer of authority within a decentralized system. Without accountability, decentralization risks becoming little more than a redistribution of power without adequate mechanisms for

public control. Yet the concept of accountability itself remains contested. Government institutions frequently interpret accountability through procedural indicators, emphasizing compliance with reporting requirements, budget documentation, and administrative regulations. And so, on these mechanisms, they are undoubtedly important, but they often fail to address a more substantive question: do village funds actually improve community welfare?

The existence of financial reports does not automatically guarantee transparency, just as regulatory compliance does not necessarily reflect responsiveness to public needs. As a result, accountability in many villages remains administrative rather than transformative, focusing more on satisfying bureaucratic requirements than on demonstrating tangible development outcomes (Purnamasari et al., 2024). The limitations of existing accountability mechanisms have generated increasing concern among scholars and policymakers. Some argue that the current accountability framework places excessive emphasis on procedural compliance while paying insufficient attention to citizen participation, public deliberation, and social oversight. Others contend that accountability challenges stem primarily from limited administrative capacity, inadequate financial literacy, and weak institutional support at the village level (Adrison, 2024; Damenta & Digdowiseiso, 2023; Digdowiseiso, 2016, 2022, 2023, 2024; Digdowiseiso et al., 2023; M. L. F. Werang, 2025b; N. P. L. Werang & Werang, 2025). These competing explanations yield an important reality: accountability problems cannot be reduced to individual misconduct alone. Then, they reflect broader structural tensions within the village governance regime, where expanding responsibilities are not always matched by sufficient institutional resources and governance capacity. Consequently, the issue is no longer whether accountability is necessary, but rather how it should be redefined and strengthened to respond to the realities of contemporary village governance.

In addition, while extensive discussions on village fund management have largely focused on specific villages, districts, or provinces, the resulting insights are valuable yet fragmented. While such studies illuminate local dynamics, they provide a limited understanding of broader national trends and long-term patterns. This limitation is significant because recurring governance problems may not simply represent isolated administrative failures but may instead indicate deeper structural weaknesses within Indonesia's decentralization framework. A broader analytical perspective is required to evaluate whether village fund management has evolved in line with the democratic and developmental aspirations that originally justified its conceptualisation.

In sum, the present essay focuses on the period from 2019 to 2023. This period is analytically significant because it captures contemporary developments in village governance while also encompassing the unprecedented challenges created by the COVID-19 pandemic. During this period, village governments were required to balance conventional development objectives with emergency responses, public health interventions, and social protection programs (Desdiani et al., 2022; Temenggung et al., 2021).

The pandemic served as a critical test of governance capacity and accountability in crisis conditions. By testing village fund management during these five years, this essay seeks not only to identify persistent accountability challenges but also to interrogate the extent to which existing governance arrangements remain capable of fulfilling the promises of decentralization. To conclude, the essay argues that enhancing village fund management requires more than stronger regulations or stricter reporting requirements.

2. Research Methods

This essay applies a quantitative, descriptive approach, using secondary data from official government documents. The selection of this approach is based on the essay's objective: to describe and test trends in village fund management issues in Indonesia during the period 2019-2023 as a reflective inquiry. Secondary data were considered appropriate because they offer broad national coverage and provide information systematically documented by government institutions responsible for village administration and development, and this basis leads the researcher to confirm objectively and have a primary responsibility to inspect adequately (Creswell & Clark, 2017; Creswell & Poth, 2016; Dodgson, 2017; Rana et al., 2022).

The data were obtained from official reports and statistical publications issued by the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration of the Republic of Indonesia (Kemendes PDTT). The essay tested five documents from 2019, 2020, 2021, 2022, and 2023. These documents were selected because they contain information on village governance, the implementation of village funds, accountability practices, and administrative problems encountered in managing village funds. The period of 2019-2023 was deliberately chosen because it represents a recent five-year cycle that allows the observation of changes and continuities in village fund management.

Moreover, this period encompasses the COVID-19 pandemic, which substantially altered village spending priorities and introduced new administrative and accountability challenges within village governance. In addition, information regarding the nature of the problems, accountability challenges, and governance barriers reported by the Ministry was recorded to assist in interpreting the statistical findings. Following data collection, the extracted information was organized into a database by year and category. The numerical data were then tabulated to facilitate comparison across the five years. This process enabled the identification of increases, decreases, and recurring patterns in village fund management issues.

Descriptive statistical analysis was subsequently employed to summarize the data through percentages and trend observations. The findings were then presented graphically to illustrate changes over time and to provide a clearer picture of the persistence of problems in village fund management. The observed trends were interpreted alongside existing discussions on decentralization, accountability, and local governance to situate the findings within broader scholarly debates. Through this procedure, the essay seeks to provide an empirical assessment of village fund management during the period under review and to contribute to discussions on strengthening accountability within Indonesia's village governance regime.

3. Result and Discussion

3.1 Trends in Village Fund Management (2019-2023)

Village fund management occupies a strategic position within Indonesia's decentralization scheme because it represents the most direct form of fiscal transfer from the central government to local communities. Through this mechanism, villages are expected to exercise greater authority in determining development priorities, improving public services, and promoting community welfare (M. M. Raharjo, 2021).

Nevertheless, the effectiveness of village fund management cannot be assessed solely through the amount of funds distributed. More importantly, it must be evaluated

through the quality of governance that accompanies such transfers, particularly in terms of accountability, transparency, and administrative consistency. For this reason, the present essay tested official data published by the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration during the period 2019-2023.

Figure 1. Trend of Village Funds Management in Indonesia

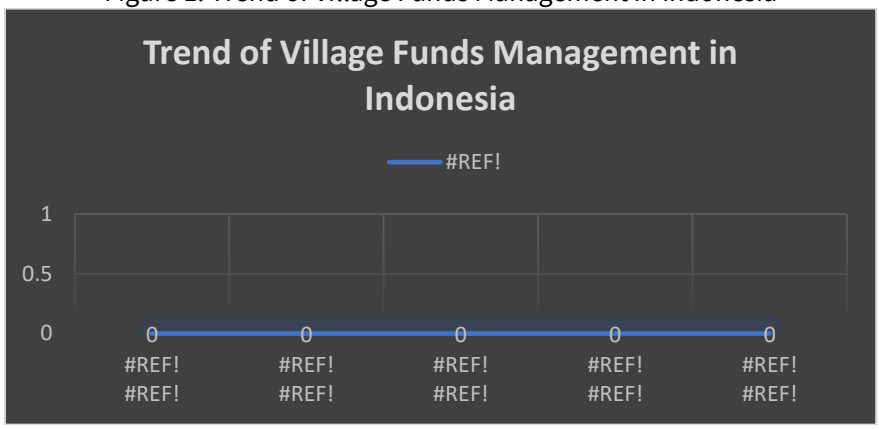

Source: Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration of the Republic of Indonesia, Processed by author(s), 2025

First, village fund management did not exhibit a linear pattern during the five years. Rather than showing continuous improvement, the data reveal a cyclical movement characterized by alternating periods of increase and decline. In 2019, the recorded figure reached 76.30 percent. This achievement suggests that village fund management had already reached a relatively high level within the broader framework of village governance. However, the following year witnessed a decline to 71.69 percent, representing a decrease of 4.61 percentage points.

Although the reduction may appear modest, it is significant because it interrupted the expectation that governance performance would improve progressively following the institutional strengthening efforts introduced after the implementation of the Village Law. A different pattern emerged in 2021. The percentage increased to 78.80 percent, the highest figure recorded throughout the observation period. This improvement indicates that village governments possessed a degree of institutional adaptability, enabling them to maintain administrative functions despite the considerable pressures on local governance during this period.

Nonetheless, this achievement proved difficult to sustain. In 2022, the figure declined sharply to 69.33 percent, marking the lowest level observed in the dataset. The decline of 9.47 percentage points from the 2021 peak represents the most substantial fluctuation during the period under review. Although there was a slight recovery in 2023, when the figure increased to 70.83 percent, the performance remained below the levels recorded in both 2019 and 2021. From an analytical perspective, the significance of these findings lies not merely in the numerical changes themselves but in what they reveal about the consistency of governance performance.

In public administration, accountability is not assessed solely by achieving high performance at a particular moment. Rather, accountability is demonstrated by institutions' ability to maintain stable, predictable performance over time. Consequently, the recurring fluctuations observed in Figure 1 suggest that village fund management continues to encounter structural challenges that affect its consistency. If accountability

mechanisms were fully institutionalized and functioning effectively across villages, one would expect a more stable trajectory rather than repeated cycles of improvement and decline. At this point, it is important to exercise analytical caution. The available data demonstrate fluctuations in village fund management performance; however, they do not independently explain the causes underlying these fluctuations.

Therefore, it would be methodologically inappropriate to conclude that the COVID-19 pandemic was solely responsible for the observed changes. Such a conclusion would require additional evidence beyond the numerical data presented in this study. Hence, the timing of the fluctuations warrants attention. The period under examination coincided with unprecedented administrative adjustments at all levels of government, including the reallocation of development budgets, the expansion of social assistance programs, and the introduction of emergency response measures. These circumstances likely increased the complexity of village financial management and placed additional demands on local administrative systems.

Essentially, the fluctuations raise broader questions regarding the institutional foundations of accountability within the village governance regime. The decentralization framework assumes that transferring authority and resources to local governments will improve responsiveness and development outcomes. However, the findings suggest that the relationship between fiscal decentralization and governance quality is not automatic.

The transfer of resources may expand opportunities for local development, yet it simultaneously increases the demand for administrative competence, monitoring capacity, and public oversight. When these supporting elements develop unevenly, accountability becomes vulnerable to inconsistency. This observation helps explain why accountability remains a central concern in discussions of village governance. The issue is not simply whether village governments comply with reporting requirements but whether existing accountability arrangements are sufficiently robust to sustain effective governance across changing circumstances.

The fluctuations recorded between 2019 and 2023 indicate that accountability should be understood as an institutional capacity rather than a procedural obligation. In other words, accountability must ensure continuity, adaptability, and transparency even when villages face fiscal, administrative, or social pressures. Hence, the principal contribution of these findings lies in stressing the need to strengthen the institutional foundations of village governance. The data suggest that improvements in village fund management have occurred, but those improvements remain vulnerable to reversal. This condition indicates that accountability mechanisms have not yet been fully consolidated within the broader village governance framework.

Future reforms should therefore focus not only on regulatory compliance but also on enhancing administrative capacity, strengthening monitoring systems, improving coordination across levels of government, and expanding meaningful community participation (R. A. Putri et al., 2026; M. L. F. Werang, 2025a). Without limited efforts, fluctuations in village fund management are likely to persist, limiting the capacity of village funds to achieve their intended developmental objectives.

3.2 Strategies for Strengthening Accountability and Transparency

The fluctuations in village fund management during the period 2019-2023 warrant attention because they reveal that improvements in governance performance have not been consistent. As presented in Figure 1, the percentage reached 76.30% in 2019 before declining to 71.69% in 2020. In 2021, the figure increased to 78.80%, representing the

highest achievement during the observation period. However, this improvement was not sustained.

In 2022, the percentage fell to 69.33%, the lowest figure recorded in the dataset, before increasing slightly to 70.83% in 2023. Viewed as a whole, these data indicate that village fund management has not yet demonstrated a stable pattern of improvement. Rather than moving progressively upward, the trend shows repeated fluctuations, suggesting that the institutional foundations supporting village fund management remain vulnerable to various administrative and governance pressures.

These findings become particularly relevant when examined through the lens of decentralization. Theoretically, decentralization is designed to bring decision-making processes closer to citizens by transferring authority and resources to local governments (Ain et al., 2025; Smith, 2023). Within the village context, this authority enables local governments to formulate development priorities that better align with local needs and conditions, including infrastructure provision, educational services, and community welfare programs (Abustan, 2023; Yu et al., 2024). The assumption underlying this approach is that local actors possess a better comprehension of local problems than central authorities.

In addition, the effectiveness of decentralization is not determined solely by the transfer of authority. Its success depends equally on the administrative capacity of local institutions and on accountability mechanisms that ensure public resources are managed responsibly. The trend presented in Figure 1 raises important questions regarding this relationship. If decentralization has strengthened village governance capacity, one would expect a relatively stable pattern of improvement over time. Yet the data reveal otherwise.

The decline from 78.80% in 2021 to 69.33% in 2022 represents a 9.47 percentage-point decrease. Such a decline cannot be ignored, as it indicates that achievements from one period were not fully sustained in subsequent years. This finding supports the arguments advanced by Sofyani et al. (2022) and Wahyudi et al. (2022), who emphasize that decentralization requires more than fiscal transfers. Administrative competence, regulatory clarity, and accountability systems are equally important determinants of governance performance.

The pandemic period provides an interesting context for interpreting these fluctuations. Between 2020 and 2021, village governments were required to assume new responsibilities in social assistance, public health interventions, and economic recovery programs. During this period, the percentage increased from 71.69% to 78.80%. Empirically, the data demonstrate that village administrations maintained operational functions despite significant institutional pressures. However, the subsequent decline in 2022 suggests that these improvements were difficult to sustain.

On the other hand, the significance of the pandemic lies not solely in its immediate impact but also in what it reveals about the resilience of village governance structures in the face of extraordinary circumstances (C. M. Putri et al., 2024; Sidik & Habibi, 2024). The data also provide a basis for discussing accountability. Accountability is often recognized as compliance with financial procedures and reporting requirements. Yet, the fluctuations observed in Figure 1 suggest that accountability should be interpreted more broadly. Stable governance performance generally reflects institutional arrangements that function consistently regardless of changing circumstances. By contrast, repeated increases and decreases may indicate that accountability mechanisms have not yet fully embedded themselves in village governance practices. This interpretation is consistent

with previous studies that highlight ongoing challenges in administrative capacity, monitoring systems, and governance quality at the village level. It is important to note that the present essay does not directly measure factors such as political intervention, corruption, bureaucratic capacity, or community participation. Consequently, such variables cannot be presented as empirical findings of this research.

Nevertheless, the fluctuating pattern identified in the data provides a reasonable basis for engaging with broader scholarly discussions concerning village governance. Existing studies have repeatedly pointed to uneven administrative capabilities, limited technical expertise, and weaknesses in oversight mechanisms as persistent challenges in village administration (Fahmi & Arifianto, 2022; Indra & Khoirunurrofik, 2022; Yumiriyah Abdullah, 2024). The trend identified in this study does not prove these explanations, but it is consistent with concerns raised in the literature regarding the sustainability of accountability reforms. If connecting to the public administration discourse, the most important finding is not whether village fund management improved or declined in a particular year.

But the central issue is the inability to maintain consistent progress over time. The recurring fluctuations observed between 2019 and 2023 suggest that accountability remains a work in progress within Indonesia's village governance regime. Although significant achievements have been recorded, those achievements remain vulnerable to reversal. For this reason, debating village fund management should move beyond questions of budget allocation and focus more seriously on strengthening the institutional conditions that enable accountability to function effectively. As argued by Rahman et al. (2023) and Ronaldo & Suryanto (2022), accountability must be understood not merely as administrative compliance but as a governance capacity that ensures transparency, responsiveness, and public trust. The evidence presented in Figure 1 suggests that strengthening this capacity remains a principal challenge for village governance today.

3.3 Future Outlook of Village Fund Management

The trend analysis presented in Figure 1 demonstrates that village fund management in Indonesia has not followed a consistently progressive trajectory during the period 2019-2023. The data reveal fluctuations from 76.30% in 2019 to 71.69% in 2020, followed by an increase to 78.80% in 2021, then a decline to 69.33% in 2022, and a slight recovery to 70.83% in 2023. Although these figures indicate that village fund management remained within a relatively high range, the recurring fluctuations suggest that improvements were difficult to sustain over time.

From a public administration discourse, this pattern is significant because accountability is not merely reflected in high performance at a particular moment but in the ability of governance institutions to maintain consistent performance across different circumstances. Consequently, the fluctuations identified in Figure 1 indicate that village fund management continues to face institutional challenges that prevent accountability mechanisms from operating stably and sustainably. This empirical finding led to the outlook presented in Figure 2:

Figure 2. Outlook of Village Funds Management in Indonesia

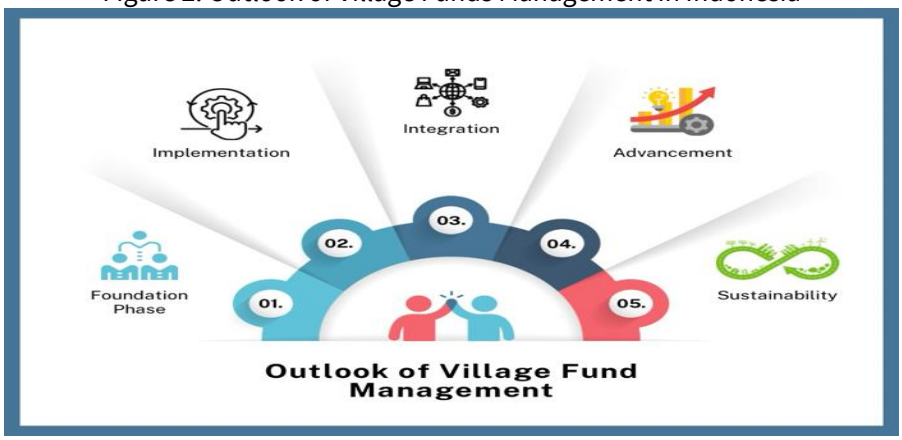

Source: Visualization by author(s), 2025

Figure 2 should not be interpreted as a predictive model or as a scheme that has been statistically tested through this essay. Here, it represents an analytical synthesis derived from the research's findings and interpreted in light of existing discussions on decentralization, accountability, and local governance. The scheme was formulated to attempt to understand how the instability observed in village fund management performance may be addressed through a gradual process of institutional strengthening.

In addition, each phase included in the framework is directly connected to the patterns identified in the empirical data and supported by the broader literature on village governance. The first phase, namely the Foundation Phase, emerges from the observation that accountability improvements have not been consistently maintained throughout the five years. The decline from 78.80% in 2021 to 69.33% in 2022 demonstrates that governance achievements remain vulnerable to reversal. This condition suggests that the institutional foundations supporting village fund management are not yet fully consolidated. Thereupon, the scheme emphasizes four essential components: regulatory frameworks, digital infrastructure, capacity building, and standard operating procedures. These elements are not proposed arbitrarily. Previous studies have repeatedly emphasized that the effectiveness of decentralization depends not only on fiscal transfers but also on the existence of capable institutions, clear regulations, and competent administrative actors. The importance of this phase becomes increasingly evident when considering that many village governments continue to encounter difficulties in interpreting administrative regulations, preparing financial reports, and implementing accountability procedures consistently across different contexts. Moreover, the Foundation Phase is intended to address the institutional weaknesses reflected in the fluctuating performance observed during the period under study.

The second phase is the Implementation Phase, which focuses on translating institutional arrangements into practical governance processes. The rationale for this phase stems from a central finding of the study: regulations alone do not guarantee stable accountability outcomes. If formal rules were sufficient, village fund management performance would likely exhibit a more consistent pattern of improvement. Instead, the data demonstrate repeated fluctuations, indicating that a gap persists between regulatory compliance and governance practice. Consequently, this phase emphasizes transparent budgeting, adaptive administrative procedures, and effective monitoring mechanisms.

The objective is to ensure accountability is embedded in daily governance practices rather than confined to formal reporting obligations. In this regard, accountability should be understood not merely as compliance with procedural requirements but as the practical ability of village governments to manage public resources transparently and responsibly. The third phase, the Integration Phase, is closely related to the broader governance environment in which village fund management operates. The fluctuations observed between 2019 and 2023 indicate that accountability challenges cannot be understood solely as village-level issues. Rather, they reflect interactions among multiple governance actors operating at different levels. Village governments operate within a complex institutional structure comprising district governments, provincial authorities, supervisory agencies, and local communities. Whereupon, inconsistencies in policy concretization often emerge when coordination among these actors is weak. The Integration Phase, emphasizes cross-agency coordination, information sharing, and policy harmonization. This phase is particularly important because accountability is not produced by individual institutions acting independently but by governance systems capable of coordinating responsibilities and sharing information effectively. In this sense, the Integration Phase responds directly to the instability observed in Figure 1 by highlighting the importance of institutional coherence across levels of government.

The fourth phase, namely the Development Phase, focuses on strengthening the adaptive capacity of village governance institutions. The data indicate that periods of improvement were frequently followed by decline, suggesting that accountability mechanisms remain vulnerable to changing conditions. Such a pattern implies that village fund management requires continuous institutional development rather than reliance on static administrative arrangements. In this context, technological innovation and digital governance become relevant. Previous studies have highlighted the potential of digital systems to improve transparency, facilitate monitoring, and reduce opportunities for misuse of public resources. Nevertheless, this study also recognizes that technological solutions should not be viewed as universal remedies. Digitalization can contribute to stronger accountability only when supported by adequate infrastructure, administrative readiness, and community accessibility. Therefore, the Development Phase emphasizes not only technological adoption but also the broader institutional capacity required to utilize such technologies effectively.

The final phase is the Sustainability Phase, which represents the framework's long-term objective. The fluctuating trend observed over the past five years suggests that accountability reforms have not yet been fully institutionalized within village governance. While periods of improvement have occurred, the inability to sustain those achievements over time indicates that accountability remains dependent on specific circumstances rather than an enduring institutional characteristic. Consequently, sustainability requires governance arrangements capable of maintaining accountability regardless of political, economic, or administrative changes. This phase emphasizes performance-based governance, local ownership, diversified development resources, and continuous institutional learning.

The underlying assumption is that sustainable village development cannot depend solely on periodic policy interventions but must be supported by governance systems that are capable of adapting to evolving challenges while preserving accountability principles. And so on, Figure 2 should be understood as an analytical interpretation of the empirical findings rather than a collection of normative recommendations. The scheme originates from the central pattern identified in Figure 1, namely the persistence of fluctuations in

village fund management performance between 2019 and 2023. Each phase addresses a specific dimension of the problem revealed by the data. The Foundation Phase responds to institutional weaknesses; the actualization Phase addresses the gap between rules and practice; the Integration Phase focuses on governance coordination; the Development Phase emphasizes adaptive capacity; and the Sustainability Phase seeks to ensure long-term accountability. Thus, the framework serves as a conceptual bridge connecting the empirical findings of this essay with broader discussions concerning the future of village fund management, accountability reform, and rural governance in Indonesia.

4. Conclusion

This essay tested trends in village fund management in Indonesia during 2019-2023. The findings display that village fund management did not experience a consistent pattern of improvement. The percentage fluctuated from 76.30% in 2019 to 71.69% in 2020, increased to 78.80% in 2021, declined to 69.33% in 2022, and slightly recovered to 70.83% in 2023. These fluctuations indicate that although village fund management has produced relatively positive outcomes, accountability and governance performance have not yet been sustained consistently over time.

The findings suggest that the principal forces lie not in the availability of village funds but in the institutional capacity to manage them effectively, transparently, and consistently. The recurring fluctuations identified over the five years align with concerns raised in previous studies regarding the importance of administrative capacity, accountability mechanisms, and governance quality in the implementation of decentralization.

Hence, strengthening village fund management requires greater attention to institutional capacity, monitoring systems, policy coordination, and community participation. Without strengthening these governance foundations, improvements in village fund management are likely to remain temporary. In sum, the effectiveness of village funds as an instrument of rural development depends not only on fiscal transfers but also on the ability of village governance institutions to sustainably maintain accountability and transparency.

References

Abustan, A. (2023). Essential dimensions of development in villages. *AMCA Journal of Community Development*, *3*(2), 35–41. https://doi.org/10.51773/ajcd.v3i2.253

Adrison, V. (2024). Fiscal Sustainability in Indonesia: Policies and Progress. *Asian Economic Policy Review*, *19*(2), 224–247. https://doi.org/10.1111/aepr.12468

Ain, Q. ul, Yousaf, T., & Tahir, M. A. (2025). Decentralization policies and sustainable rural development: A path to eradicating poverty. *Sustainable Development*, *33*(1), 700–716. https://doi.org/10.1002/sd.3147

Al-Fatih, S., Safaat, M. A., Widiarto, A. E., Al Uyun, D., & Nur, M. (2023). The Hierarchical Model of Delegated Legislation in Indonesia. *Lex Scientia Law Review*, *7*(2), 629–658. https://doi.org/10.15294/lesrev.v7i2.74651

Canare, T. (2021). Decentralization and Development Outcomes: What Does the Empirical Literature Really Say? *Revista Hacienda Pública Española*, *237*(2), 111–151. https://doi.org/10.7866/HPE-RPE.21.2.5

Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2017). *Designing and conducting mixed methods research*. Sage publications.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.

Damenta, U. A., & Digdowiseiso, K. (2023). Collaborative Governance Oversight in Corruption Prevention Efforts in Indonesia. *Journal of Governance*, *8*(3). https://doi.org/10.31506/jog.v8i3.20905

Desdiani, N. A., Sabrina, S., Husna, M., Budiman, A. C., Afifi, F. A. R., & Halimatussadiah, A. (2022). Local Budget Resilience in Times of COVID-19 Crisis: Evidence from Indonesia. *Economies*, *10*(5), 108. https://doi.org/10.3390/economies10050108

Digdowiseiso, K. (2016). Governance, fiscal decentralization, and growth in indonesia. *POPULIS*, *1*(1), 1–18.

Digdowiseiso, K. (2022). Is fiscal decentralization growth enhancing? A cross-country study in developing countries over the period 1990–2014. *Economies*, *10*(3), 62.

Digdowiseiso, K. (2023). Institutional quality as the driver of fiscal decentralization in developing countries. *Cogent Economics & Finance*, *11*(2), 2234220.

Digdowiseiso, K. (2024). Fiscal decentralization and social stability in selected developing countries: the role of institutional quality. *Cogent Social Sciences*, *10*(1). https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2432070

Digdowiseiso, K., W, N. P. L., & Andriani, F. (2023). Analisis Kemandirian Fiskal, Ketergantungan Fiskal, dan Efektivitas Fiskal Provinsi Kalimantan Utara Periode 2017-2022. *JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION*, *4*(1), 127–137. https://doi.org/10.55681/jige.v4i1.556

Dodgson, J. E. (2017). About Research: Qualitative Methodologies. *Journal of Human Lactation*, *33*(2), 355–358. https://doi.org/10.1177/0890334417698693

Fahmi, F. Z., & Arifianto, A. (2022). Digitalization and social innovation in rural areas: A case study from Indonesia. *Rural Sociology*, *87*(2), 339–369.

Hidajat, T. (2025). Village fund corruption mode: an anti-corruption perspective in Indonesia. *Journal of Financial Crime*, *32*(2), 444–455. https://doi.org/10.1108/JFC-01-2024-0042

Indra, J., & Khoirunurrofik, K. (2022). Understanding the role of village fund and administrative capacity in stunting reduction: Empirical evidence from Indonesia. *PLOS ONE*, *17*(1), e0262743. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0262743

Madubun, J. (2024). Public services in island sub-districts: Towards geography-based governance. *Australian Journal of Public Administration*, *83*(3), 308–327. https://doi.org/10.1111/1467-8500.12586

Nugroho, Y., & Sujarwoto. (2021). Two Decades of Decentralization and State Capacity in Indonesia. *Journal of Southeast Asian Economies*, *38*(3), 296–319. https://www.jstor.org/stable/27096080

Permatasari, P., Budiarso, A., Dartanto, T., Samosir, A. P., Saputro, B., Ekayana, D., Agustono, E. D., Alim, T. E., Hartono, L., Wahyuputri, F. W., & Wardhana, I. W. (2024). Village fund management and reporting systems: are they accountable? *Transforming Government: People, Process and Policy*, *18*(4), 512–528. https://doi.org/10.1108/TG-07-2023-0098

Purnamasari, R., Hasanudin, A. I., Zulfikar, R., & Yazid, H. (2024). Do internal control and information systems drive sustainable rural development in Indonesia? *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, *10*(1), 100242. https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2024.100242

Putri, C. M., Argilés-Bosch, J. M., & Ravenda, D. (2024). Creating good village governance: an effort to prevent village corruption in Indonesia. *Journal of Financial Crime*, *31*(2), 455–468. https://doi.org/10.1108/JFC-11-2022-0266

Putri, R. A., Werang, N. P. L., & Werang, M. L. F. (2026). Formulating Positive Public Administration in Indonesia: An Actor, Structure, Discourse Analysis. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, *8*(1), 91–104.

Raharjo, M. M. (2021). *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Bumi Aksara.

Raharjo, M. M. I. (2021). *Kepemimpinan Kepala Desa* (Tarmizi, Ed.). Bumi Aksara.

Rahman, M. F., Falzon, D., Robinson, S., Kuhl, L., Westoby, R., Omukuti, J., Schipper, E. L. F., McNamara, K. E., Resurrección, B. P., Mfitumukiza, D., & Nadiruzzaman, Md. (2023). Locally led adaptation: Promise, pitfalls, and possibilities. *Ambio*, *52*(10), 1543–1557. https://doi.org/10.1007/s13280-023-01884-7

Rana, J., Gutierrez, P. L., & Oldroyd, J. C. (2022). Quantitative Methods. In *Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance* (pp. 11202–11207). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-66252-3_460

Rifai, R., Kamaluddin, K., & Hidayat, R. (2024). Exploring the Roots and Solutions of Maladministration, Power Abuse, or Corruption in Contemporary Indonesian Villages. *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, *32*(3), 1115–1140. https://doi.org/10.47836/pjssh.32.3.15

Ronaldo, R., & Suryanto, T. (2022). Green finance and sustainability development goals in Indonesian Fund Village. *Resources Policy*, *78*, 102839. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.102839

Savitri, E., Andreas, & Diyanto, V. (2021). Financial Management of Allocated Village Fund. *Proceedings of the Conference on International Issues in Business and Economics Research (CIIBER 2019)*. https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210121.002

Sidik, F., & Habibi, M. (2024). A Prize for the Village Ruling Class: "Village Funds" and Class Dynamics in Rural Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, *54*(3), 387–411. https://doi.org/10.1080/00472336.2023.2193968

Smith, B. C. (2023). *Decentralization*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003404927

Sofyani, H., Pratolo, S., & Saleh, Z. (2022). Do accountability and transparency promote community trust? Evidence from village government in Indonesia. *Journal of Accounting & Organizational Change*, *18*(3), 397–418. https://doi.org/10.1108/JAOC-06-2020-0070

Temenggung, D., Saputro, A., Rinaldi, R., & Pane, D. (2021). Managing Recovery and Seizing Reform Opportunities. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, *57*(1), 1–28. https://doi.org/10.1080/00074918.2021.1908207

Wahyudi, S., Achmad, T., & Pamungkas, I. D. (2022). Prevention Village Fund Fraud in Indonesia: Moral Sensitivity as a Moderating Variable. *Economies*, *10*(1), 26. https://doi.org/10.3390/economies10010026

Werang, M. L. F. (2025a). Critical Perspectives on Indonesia Village Development Index. *Jurnal Administrasi Publik*, *16*(1).

Werang, M. L. F. (2025b). Fiscal Decentralization in Sikka Regency: Analyzing Local Financial and Intergovernmental Transfers. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, *6*(4). https://doi.org/10.24036/jmiap.v6i4.1143

Werang, N. P. L., & Werang, M. L. F. (2025). The First Generation Theory of Fiscal Federalism: How Does It Affect Regional Governance? *Indonesian Journal of Social Science Research*, *6*(1), 151–164. https://doi.org/10.11594/ijssr.06.01.14

Yu, Y., Appiah, D., Zulu, B., & Adu-Poku, K. A. (2024). Integrating Rural Development, Education, and Management: Challenges and Strategies. *Sustainability*, *16*(15), 6474. https://doi.org/10.3390/su16156474

Yumiriyah Abdullah. (2024). Dynamics of Village Community Political Participation in the Digital Era: Problems and Solutions. *Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization*, *5*(02), 103–111. https://doi.org/10.19109/ampera.v5i02.23186

BRAWIJAYA JOURNAL of SOCIAL SCIENCE

ISSN 2809-7025

ISSN 2809-7068